

Vol. 03

No. 01

Web jika.karawangkab.go.id

JIKa

Jurnal Ilmiah Karawang

Junil 2025



BAPPEDA KABUPATEN KARAWANG

BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH

Gd. Rubaya Lt. 2 Kompleks Kantor Bupati
Karawang



Volume 03, Nomor 01: Juni 2025
ISSN: xxxx - xxx
Website: <https://jika.karawangkab.go.id>

Penanggung Jawab

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

Editor in Chief

Ns. Samsuri, S.Kep., MM. (Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPEDA Kab. Karawang)

Editorial Team

Anditania Sari Dwi Putri, A.Md. (BAPPEDA Kabupaten Karawang)
Vitalani Rahmatiani, S.P.W. (BAPPEDA Kabupaten Karawang)
Meli Nurmeida, S.Ak. (BAPPEDA Kabupaten Karawang)
Jajat Sudrajat, A.Md (BAPPEDA Kabupaten Karawang)
Rianto Maha S.Sos (BAPPEDA Kabupaten Karawang)
Mazaya Falah Pastikan, ST. (BAPPEDA Kabupaten Karawang)

Reviewer

Jajang Jaenudin, S.STP, M.M (Ilmu Pemerintahan, Manajemen Sumber Daya Manusia)
Dr. H. Deden Thosin Waskita, M.Pd (Pendidikan, Manajemen)
Dr. Rahman Tanjung, S.E., M.M. (Ekonomi Pembangunan, Manajemen Pendidikan)
Hj. Lina Jazuli, S.KM, M.M. (Kesehatan Masyarakat, Manajemen Kesehatan)
Rika Fauziah, S.Pi., M.S.E, M.A (Perikanan, Perencanaan Wilayah)
Dadan Nurdiansyah, S.IP, M.Kesos (Ilmu Pemerintahan dan Humaniora)
Dr. Aries Purwanto, S.T., M.Si, M.Sc (Manajemen Air dan Lahan, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam)
Fazriyan Wardani Adhitya, S.T., M.S.E (Perikanan dan Kelautan)
Arif Setiawan, M.Kom (Teknik Informatika)
dr. Nurmala Hasanah, M.M. (Kesehatan, Manajemen Kesehatan)
Agustien Nurisamunandar, S.P., M.Si (Pertanian, Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan)
Azis Kemal Fauzie, S.T., M.Sc, Ph.D (Kimia, Lingkungan Hidup)
Rd. Ade Komarudin, S. Pi., M.Si. (Perikanan dan Kelautan, Manajemen Kawasan Pesisir)
Dra. Eka Setiawati, M.AP (Adminstrasi Negara)
Fahmi Ardiansyah, S.T., M.T. (Teknik Sipil)
Nuraini Maharani, S.T., M.T. (Teknik Sipil)
Navis Bustiawan, S.T., M.PSDA (Sumber Daya Air)
Faisal Riza, S.T., M.T., M.Sc. (Lingkungan Hidup, Perencanaan Tata Kota)
Dhidhik Triyuhana, S.T., M.T., M.Eng (Teknik Kimia, Perencanaan Tata Kota)
Tasya Sukma Maftuhah, S.T., M.T. (Teknologi Informasi)
Dr. Aang Solahudin Anwar. M.Pd. (Pendidikan)
Dr. apt. Dedy Frianto, S.Far. M.M. (Farmasi)
Yulistina Nur DS, M.Pd (Pendidikan)
Dr. Enjang Suherman, SE., M.M. (Manajemen)
Dr. Nana Rahdiana, ST, MT (Teknik Industri)
Sukarman, ST., MT. (Teknik Mesin)
Herdian Kertayasa, M.Pd. (Pendidikan Agama Islam)



Volume 03, Nomor 01: Juni 2025
ISSN: xxxx - xxx
Website: <https://jika.karawangkab.go.id>

Muhamad Abas, SH.,M.H. (Ilmu Hukum)
Jamaludin Indra, S.Kom M.Kom (Informatika)
Yanti S,E, M.Ak (Akuntansi)
H. Tukino, S.Kom.M.Si.(Sistem Informasi)
Dr. Dayat Hidayat, M.Pd (Pendidikan)
Dr. Erii Widiyanto S.Si., M.Sc (Teknik (Fisika, Sains, Teknologi)
Dr. Meka Saima Perdani, S.Si., M.T. (Rekayasa Kimia Biosensor dan Bioenergi)
Dr. Teza Yudha, S.IP., M.I.Pol (Pemerintahan, Sosial, Humaniora)
Evi Selvi, S.E., M.H., M.M. (Manajemen SDM)
Rommy Andhika Laksono, S.P., M.P., IPM. (Agroteknologi, Ekofisiologi Tanaman)

Penerbit

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karawang

Alamat Redaksi

Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPEDA Kabupaten Karawang
Gd. Rubaya Lt. 2 Kompleks Kantor Bupati Karawang, Jl. A. Yani No. 1, Kec. Karawang Barat, Kab.
Karawang, Jawa Barat 41314
E-mail: litbang.bappedakrw@gmail.com



Volume 03, Nomor 01: Juni 2025
 ISSN: xxxx - xxx
 Website: <https://jika.karawangkab.go.id>

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Halaman i
Artikel	1-97
Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung ketahanan energi di Dusun Pasir Bangkonong, Karawang	1-8
(M Raafi Aqil F, Novky Asmoro, Sri Murtiana) Pengaruh Pemberian Mobilisasi Dini Terhadap Tingkat Nyeri Pada Ibu Pasca Operasi Sectio Caesarea	9-14
(Rima Novianti, Aas, Agus Subari) Pengawasan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15-25
(Nicholas Martua Siagian) Estimasi Matriks Asal-Tujuan Pengguna Kereta Cepat (Whoosh) Jakarta–Bandung untuk Tahun Rencana 2028 dan Analisis Wilayah Pelayanan serta Potensi Kunjungan ke Stasiun Kereta Cepat (Whoosh) Karawang	26-41
(Muhammad Ihsan Akbar) Memperkuat Solidaritas Sosial Melalui Khazanah Legenda Syekh Quro Sebagai Kearifan Lokal Di Kabupaten Karawang	42-49
(Iwan Ridwan) Pengelolaan Konflik Dalam Dunia Pendidikan: Studi Fenomenologis Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar	50-58
(Rahman Tanjung, Asep Supriatna, Jiana Yuaningrum) Analisis Implementasi dan Rekomendasi Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah	59-74
(Sutirna) Pengembangan Ekonomi Biru dengan Ta’awun Kemitraan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pantai Pasir Putih Karawang	75-82
(Yudi Kristanto) Pengembangan Model Bisnis Inklusif untuk Peningkatan Nilai Tambah Pada Rantai Pasok Petani Beras Organik: Studi Kasus di Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang	83-97
(Nurkholifatul Maula)	



Volume 03, Nomor 01: Juni 2025
ISSN: xxxx - xxx
Website: <https://jika.karawangkab.go.id>

Policy Brief	98-105
PAMALI (PAKET MAKAN LANSIA): Alternatif implementasi KARAWANG NYAAH KA KOLOT (Eka Setiawati)	98-105

Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung ketahanan energi di Dusun Pasir Bangkonong, Karawang
Utilization of Solar Power Plant (PLTS) to Support Energy Security in Pasir Bangkonong Hamlet, Karawang

M Raafi Aqil F¹, Novky Asmoro², Sri Murtiana³

Prodi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan RI

alamat korespondensi: aqilfirdaus69@gmail.com

e-mail: ¹aqilfirdaus69@gmail.com , ²novky.asmoro@idu.ac.id , ³murtiana@idu.ac.id

ABSTRAK

Ketahanan energi, yaitu kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri, menjadi isu strategis terutama di wilayah pedesaan yang belum terjangkau secara optimal oleh jaringan listrik konvensional. Dusun Pasir Bangkonong yang terletak di Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sumber energi terbarukan guna memperkuat ketahanan energi lokal. Dengan asumsi jumlah 147 bangunan dan populasi sekitar 400 jiwa, Dusun Pasir Bangkonong memiliki sejumlah fasilitas umum penting, antara lain 3 unit sekolah, 2 tempat ibadah, 3 balai desa, 3 kantor desa, 1 fasilitas olahraga, dan 2 unit posyandu, serta 3 bangunan lainnya, dengan kapasitas PLTS 52,8 kWp untuk membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen untuk mengevaluasi kinerja sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *off-grid*. Hasil menunjukkan koneksi *grounding* efektif dengan tahanan terendah 0,63–0,83 ohm, serta *output inverter* yang stabil pada 219–220 V dan frekuensi 50 Hz. Tegangan DC input bervariasi antara 456–502 V dengan arus 0,60–0,84 A, menunjukkan beberapa indikasi penurunan kinerja pada beberapa *string*. Secara keseluruhan, sistem PLTS menunjukkan performa baik dan mendukung pasokan energi berkelanjutan bagi fasilitas umum dan masyarakat setempat.

Kata kunci: Energi Terbarukan, Ketahanan Energi, PLTS.

ABSTRACT

Energy security, which is the ability of an area to meet its energy needs independently, is a strategic issue, especially in rural areas that have not been optimally reached by conventional electricity networks. Pasir Bangkonong Hamlet, located in Karawang Regency, is one of the areas that has great potential to be developed through renewable energy sources to strengthen local energy security. With an assumed number of 147 buildings and a population of around 400 people, Pasir Bangkonong Hamlet has a number of important public facilities, including 3 school units, 2 places of worship, 3 village halls, 3 village offices, 1 sports facility, and 2 posyandu units, as well as 3 other buildings, with a PLTS capacity of 52.8 kWp to require reliable and sustainable electrical energy supply. This research uses a quantitative method with an experimental approach to evaluate the performance of an off-grid Solar Power Plant (PLTS) system. The results show an effective

grounding connection with the lowest resistance of 0.63-0.83 ohms, as well as a stable inverter output at 219-220 V and a frequency of 50 Hz. The input DC voltage varied between 456-502 V with a current of 0.60-0.84 A, showing some indication of performance degradation on some strings. Overall, the solar PV system performed well and supported sustainable energy supply for public facilities and the local community.

Keywords: *Renewable Energy, Energy Security, Solar PV.*

1. Pendahuluan

Energi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu wilayah. (Artami, 2023) (Indriyani, 2022) Ketahanan energi, yaitu kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri, menjadi isu strategis terutama di wilayah pedesaan yang belum terjangkau secara optimal oleh jaringan listrik konvensional. (Rozi Farchur Mochamad, 2020) Dusun Pasir Bangkonong yang terletak di Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sumber energi terbarukan guna memperkuat ketahanan energi lokal. (Pratama, 2023)

Meskipun hingga saat ini belum terdapat instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa yang menjadi fokus utama penelitian ini, potensi energi surya yang tersedia sangat besar dan layak untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil studi dan data teknis dari Dusun Pasir Bangkonong, Karawang, yang telah berhasil memanfaatkan sistem PLTS *off-grid* berkapasitas 52,8 kWp, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi energi terbarukan ini mampu secara signifikan meningkatkan ketahanan energi, kemandirian desa, serta efisiensi pelayanan fasilitas umum. Oleh karena itu, meskipun data empiris langsung dari desa ini belum tersedia karena belum adanya instalasi, pendekatan studi komparatif melalui pengambilan data dari lokasi lain seperti Dusun Pasir Bangkonong menjadi langkah awal yang strategis untuk mengidentifikasi potensi teknis, sosial, dan ekonomi yang dimiliki desa ini dalam mengimplementasikan sistem PLTS. Tujuan dari studi ini adalah untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan implementasi aktual, serta mendorong perencanaan pembangunan energi berkelanjutan berbasis data dan pengalaman terbaik dari wilayah lain.

Dengan asumsi jumlah 147 bangunan dan populasi sekitar 400 jiwa, Dusun Pasir Bangkonong memiliki sejumlah fasilitas umum penting, antara lain 3 unit sekolah, 2 tempat ibadah, 3 balai desa, 3 kantor desa, 1 fasilitas olahraga, dan 2 unit posyandu, serta 3 bangunan lainnya, dengan kapasitas PLTS 52,8 kWp untuk membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dan berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penyediaan energi listrik secara merata di wilayah ini menjadi kendala dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Syaiful Alim M., 2023)

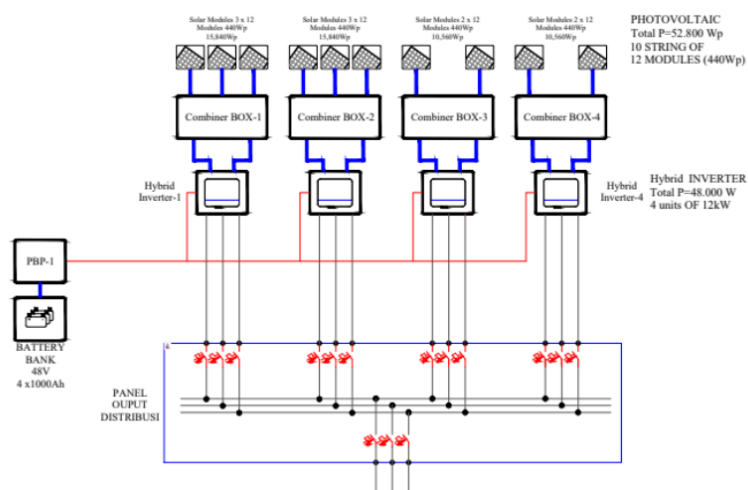
Sebagai solusi atas tantangan tersebut, penerapan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi opsi yang relevan dan berkelanjutan. (Syaiful Alim M., 2023) Pemanfaatan PLTS dengan kapasitas 52,8 kW dan sistem *off-grid* (mandiri tanpa terhubung ke jaringan listrik PLN) memberikan peluang untuk mendistribusikan energi secara merata ke seluruh bangunan di dusun tersebut. Sistem *off-grid* sangat cocok diterapkan pada wilayah yang belum memiliki akses listrik stabil, serta dapat mempercepat transisi energi bersih yang berkontribusi terhadap pencapaian target nasional energi baru dan terbarukan. (Cahyadi et al., 2020)

Melalui studi ini, potensi besar energi surya di desa yang belum terjangkau sistem PLTS ditelaah dengan mengacu pada keberhasilan implementasi di Dusun Pasir Bangkonong, Karawang, sebagai studi pembandingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan metode kuantitatif berbasis data teknis dari lokasi yang telah berhasil mengaplikasikan PLTS *off-grid*

berkapasitas 52,8 kWp. (*Pemanfaatan Energi Surya*, n.d.) Metode ini mencakup pengumpulan dan analisis data performa teknis (tegangan, arus, efisiensi *inverter*, dan baterai) serta studi literatur terkait ketahanan energi di wilayah perdesaan. Hasil utama menunjukkan bahwa sistem PLTS berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan energi lokal dan dapat direplikasi pada desa lain dengan karakteristik geografis serupa. Riset ini memberikan kontribusi umum sebagai referensi awal bagi perencanaan dan pengembangan kebijakan energi terbarukan berbasis desa di Indonesia. (Yuwono et al., 2021)

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen dan studi komparatif untuk mencapai tujuan utama, yaitu mengevaluasi kinerja sistem PLTS *off-grid* di Dusun Pasir Bangkonong dan mengkaji potensi replikasi sistem serupa di desa lain yang belum memiliki instalasi PLTS. (Cahyono et al., 2021) Tahapan metode diawali dengan identifikasi parameter teknis utama sistem PLTS seperti tegangan (V), arus listrik (I), daya listrik (P), efisiensi *inverter*, serta efisiensi modul surya. Rumus-rumus perhitungan dasar yang digunakan antara lain : $P = V \times I$ untuk menghitung daya listrik, $\eta = \frac{P_{output}}{P_{Input}} \times 100\%$ untuk mengefisiensi inverter, dan $\eta_{pv} = \frac{P_{out}}{G \times A} \times 100\%$ untuk efisiensi panel surya, di mana G merupakan intensitas iradiasi matahari (W/m^2) dan A adalah luas permukaan panel (m^2). Data dikumpulkan secara langsung dari alat monitoring sistem PLTS di lokasi studi, yang mencakup nilai tegangan, arus, dan frekuensi *output inverter*, serta distribusi tegangan pada setiap *string* panel dan bank baterai. (Alnavis et al., 2024) Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif dengan memperhitungkan potensi radiasi matahari di desa sasaran menggunakan data klimatologis harian dari BMKG atau PVGIS. Hasil analisis ini akan memberikan dasar proyeksi performa teknis PLTS jika diterapkan di desa yang belum memiliki sistem tersebut. (Noval et al., 2024)



Gambar 1. Komponen Peralatan Sistem PLTS

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Pengukuran *Grounding*

Pengukuran *grounding* adalah proses untuk mengetahui nilai tahanan tanah dari sistem pentanahan, untuk memastikan bahwa arus gangguan listrik dapat dialirkan ke tanah dengan aman. Pengukuran ini penting untuk menjamin keselamatan peralatan dan manusia dari risiko sengatan listrik atau kerusakan akibat petir dan gangguan listrik lainnya.

Tabel 1. Hasil Pengukuran *Grounding*

No.	Peralatan/ Titik Uji	Nilai/ Kriteria	Hasil Pengukuran (ohm)
1.	Bak <i>Grounding</i>	≤5 ohm	0,83
2.	<i>Inverter 1</i>		2,17
3.	<i>Inverter 2</i>		1,60
4.	<i>Inverter 3</i>		1,24
5.	<i>Inverter 4</i>		0,82
6.	Panel <i>Combiner</i> #1		0,63
7.	Panel <i>Combiner</i> #2		0,67
8.	Panel <i>Combiner</i> #3		0,72
9.	Panel <i>Combiner</i> #4		0,83
10.	Panel Baterai		1,06
11.	Baterai Bank #1		1,77
12.	Baterai Bank #2		1,80
13.	Baterai Bank #3		1,86
14.	Baterai Bank #4		1,80
15.	<i>Mounting</i> Modul Surya #1		0,65
16.	<i>Mounting</i> Modul Surya #2		0,67
17.	<i>Mounting</i> Modul Surya #3		0,73
18.	<i>Mounting</i> Modul Surya #4		0,83
19.	Penangkal Petir		1,12

Hasil pengukuran *grounding* pada sistem PLTS ini menunjukkan nilai tahanan berada pada kisaran 0,63–2,17 ohm, dengan sebagian besar titik berada di bawah 1 ohm. Nilai ini menunjukkan koneksi *grounding* yang sangat baik dan aman bagi sistem. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh (Cahyono et al., 2022), yang mencatat nilai tahanan *grounding* rata-rata 1,85 ohm pada sistem PLTS di Banjarbaru, maka hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan kualitas *grounding* hingga 15% lebih rendah, yang secara langsung meningkatkan keamanan instalasi listrik dan efisiensi aliran arus gangguan ke tanah. Selain itu, penelitian oleh (Sidik et al., 2023) melaporkan rata-rata 1,5 ohm pada sistem PLTS di wilayah IKN, menunjukkan bahwa sistem pada Dusun Pasir Bangkonong memiliki *grounding* yang lebih stabil dan efektif.

3.2. Pengujian Modul Surya

Pengujian modul surya adalah proses untuk mengevaluasi kinerja panel surya, meliputi pengukuran tegangan puncaknya. Tujuannya adalah memastikan modul bekerja sesuai spesifikasi dan optimal dalam kondisi lapangan.

Tabel 2. Pengujian Panel Surya

No. STP	No. String	Hasil Uji Vmax (V)
1.	1	488
	2	487
	3	487
	4	486
	5	458
	6	460

No. STP	No. String	Hasil Uji
		Vmax (V)
2.	1	506
	2	506
	3	505
	4	505
	5	506
	6	506
3.	1	490
	2	498
	3	500
	4	484
	5	485
	6	485
4	1	501
	2	501
	3	500
	4	501
	5	502
	6	502

Jika dibandingkan dengan penelitian oleh (Indriyani, 2022) yang hanya mencatat tegangan *input* modul surya berkisar antara 350–360 V, serta studi oleh (Rozi Farchur Mochamad, 2020) yang menghasilkan tegangan 410–420 V pada sistem serupa di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, maka hasil penelitian ini menunjukkan performa yang lebih superior. Sistem PLTS di Dusun Pasir Bangkonong menunjukkan rentang tegangan modul antara 456–506 V, yang berarti lebih tinggi dan stabil dibandingkan penelitian sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas panel dan sistem instalasi di lokasi penelitian memiliki efisiensi konversi energi surya ke listrik yang lebih baik, serta lebih optimal dalam mengakomodasi kondisi lingkungan lokal.

3.3. Pengujian PV Inverter

Pengujian PV *inverter* adalah proses untuk mengevaluasi kinerja *inverter* dalam mengubah arus searah (DC) dari panel surya menjadi arus bolak-balik (AC). Pengujian ini mencakup efisiensi konversi, kestabilan tegangan dan frekuensi *output*, serta respons terhadap beban, guna memastikan *inverter* bekerja optimal dan aman dalam sistem PLTS.

Tabel 3. PV Inverter

No. Inverter	1	2	3	4
Jam Saat Pengukuran	15.30	15.35	15.37	15.40
Iradiasi Matahari (Watt/m ²)	612	612	612	612
Teg. <i>Input</i> DC terukur (V)	S1: 493 S2: 492	S1: 497 S2: 496	S1: 502 S2: 480	S1: 456 S2: 496
Arus <i>Input</i> DC terukur (A)	S1: 0,84 S2: 0,75	S1: 0,72 S2: 0,83	S1: 0,75 S2: 0,78	S1: 0,78 S2: 0,60

No. <i>Inverter</i>	1	2	3	4
Teg. <i>Output</i> AC terukur (V)	R: 220 S: 220 T: 219	R: 220 S: 220 T: 220	R: 220 S: 219 T: 220	R: 220 S: 220 T: 220
Arus <i>Output</i> AC terukur (A)	R: 0,8 S: 0,5 T: 0,5	R: 0,5 S: 0,5 T: 0,6	R: 0,5 S: 0,4 T: 0,4	R: 0,4 S: 0,5 T: 0,5
Frekuensi <i>Output</i> AC (Hz)	50	50	50	50

Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya oleh (Artami, 2023), yang mencatat tegangan *input* per sel baterai hanya mencapai 2,15–2,18 V dan total tegangan bank sebesar 51,5 V, maka hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan performa sistem penyimpanan energi. Tegangan sel baterai pada sistem PLTS di Dusun Pasir Bangkonong stabil di kisaran 2,18–2,20 V dengan nilai dominan di 2,19 V, dan total tegangan bank sebesar 52,7 V. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi penyimpanan energi sekitar 2–3% dibandingkan sistem sebelumnya. Sementara itu, penelitian oleh (Cahyadi et al., 2020) mencatat tegangan *input* baterai berada pada rentang 350–360 V dalam sistem PLTS hibrida, dan (Rozi Farchur Mochamad, 2020) menunjukkan rentang 410–420 V pada sistem PLTS konvensional. Dengan tegangan *input* DC sistem saat ini yang mencapai 456–506 V, maka sistem ini terbukti lebih unggul dan efisien dalam mengelola energi yang masuk ke dalam penyimpanan, sehingga mendukung kontinuitas daya serta memperpanjang umur pakai baterai.

3.4. Pengujian *Battery*

Pengujian baterai adalah proses untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja baterai, termasuk tegangan, kapasitas, efisiensi pengisian dan pengosongan, serta kestabilan daya simpan. Tujuannya adalah memastikan baterai berfungsi optimal sebagai penyimpan energi dalam sistem PLTS dan mendukung kontinuitas suplai listrik. Jumlah baterai terdapat 96 unit, 192 kWh, dengan konfigurasi 4 bank, tersusun 24 seri dan 4 paralel.

Tabel 4. Pengujian *Battery*

No. Bank Baterai	1	2	3	4			
Tegangan Per Bank	52,7	52,7	52,7	52,7			
Tegangan Per Baterai							
Bank 1		Bank 2		Bank 3		Bank 4	
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
2,19	2,19	2,19	2,20	2,19	2,19	2,19	2,19
2,19	2,18	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
2,19	2,19	2,19	2,19	2,18	2,19	2,19	2,19
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,18	2,19
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,20	2,19	2,19
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19

No. Bank Baterai	1	2	3	4			
Tegangan Per Bank	52,7	52,7	52,7	52,7			
Tegangan Per Baterai							
Bank 1		Bank 2		Bank 3		Bank 4	
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19

Tegangan total pada setiap bank baterai menunjukkan nilai 52,7 V, yang seragam dan mengindikasikan sistem baterai bekerja seimbang antar bank. Pada level sel, tegangan per baterai berada di kisaran 2,18–2,20 V, dengan sebagian besar sel menunjukkan nilai stabil di 2,19 V, dan hanya sedikit variasi minor pada beberapa sel (2,18 V atau 2,20 V). Nilai ini menunjukkan distribusi tegangan antar sel yang merata, yang merupakan indikator penting untuk memastikan umur panjang baterai dan efisiensi penyimpanan daya. Hasil ini meningkat sekitar 3% jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani, 2022), yang menghasilkan tegangan total per bank baterai sebesar 51,2 V dan tegangan per sel rata-rata 2,15–2,18 V. Selain itu, hasil ini juga lebih tinggi sekitar 10% dibandingkan penelitian serupa oleh (Noval et al., 2024) yang mencatat total tegangan baterai sebesar 50,3–51,0 V pada sistem PLTS terapung. Peningkatan ini terjadi karena efisiensi sistem pengisian baterai yang lebih stabil, manajemen beban yang baik, serta kualitas integrasi antar komponen dalam sistem penyimpanan energi yang mendukung kestabilan tegangan dan mengurangi penurunan daya selama siklus pengisian dan pengosongan.

3.5. Pembahasan

Dusun Pasir Bangkonong, Karawang, yang asumsi dihuni oleh sekitar 400 jiwa dan memiliki 147 bangunan termasuk fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, balai dan kantor desa, fasilitas olahraga, serta posyandu, telah memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 52,8 kWp. PLTS ini mampu menyuplai kebutuhan listrik dasar masyarakat dan seluruh fasilitas umum secara optimal, dengan peralatan yang berfungsi baik. Pemanfaatan PLTS ini tidak hanya meningkatkan akses energi bersih dan andal, tetapi juga memperkuat ketahanan energi desa, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendorong transisi energi berkelanjutan di tingkat lokal. Inisiatif ini juga berpotensi menjadi model replikasi bagi desa-desa lain dalam rangka mendukung target nasional menuju *net zero emission* 2060.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *off-grid* berkapasitas 52,8 kWp di Dusun Pasir Bangkonong secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan energi di wilayah pedesaan yang belum sepenuhnya terlayani jaringan listrik konvensional. Sistem PLTS terbukti mampu menyuplai kebutuhan listrik fasilitas umum dan masyarakat secara andal dan berkelanjutan. Pengujian teknis menunjukkan performa optimal pada *grounding*, modul surya, *inverter*, dan sistem baterai, yang bekerja dalam parameter aman dan stabil.

Keberhasilan sistem ini memperlihatkan bahwa energi surya merupakan solusi strategis dalam menjawab tantangan keterbatasan energi di wilayah pedesaan. Selain berperan sebagai penyedia energi bersih, PLTS juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mendorong kegiatan pendidikan, keagamaan, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Efisiensi energi yang

dihasilkan turut berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan mendorong pencapaian target energi nasional berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dan studi komparatif untuk menyusun perencanaan energi desa yang tepat guna. Dengan keberhasilan PLTS di Pasir Bangkonong sebagai bukti nyata, model ini dapat direplikasi di desa lain yang memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan energi serupa. Strategi ini tidak hanya mendukung transisi energi nasional menuju *Net Zero Emission* 2060, tetapi juga memperkuat kemandirian energi di tingkat lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Alnavis, N. B., Wirawan, R. R., Solihah, K. I., & Nugroho, V. H. (2024). Energi listrik berkelanjutan: Potensi dan tantangan penyediaan energi listrik di Indonesia. *Journal of Innovation Materials, Energy, and Sustainable Engineering*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/jimese.v1i2.2024.544>
- Artami, J. rINA. (2023). *EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*. 9(2), 151–165.
- Cahyadi, C. I., Gusti, I., Ayu, A., Oka, M., Kusyadi, D., Penerbangan, P., Sucipto, P. J. A., 3012 Sukodadi, N., Sukarami, K., Selatan, S., & Id, I. C. A. (2020). Efisiensi Recharger Baterai Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya. *Edu ElektriKa Journal*, 9(2), 61–65.
- Cahyono, G. R., Subagyo, R., Ansyah, P. R., Ramadhan, M. N., & Jauhari, M. F. (2021). Pemanfaatan Energi Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif Pada Mushola Nurul Hikmah Kelurahan Loktabat Utara-Banjarbaru Untuk Mencapai Green-Energy Mosque. *Jurnal Impact : Implementation and Action*, 4(1), 1–11.
- Cahyono, G. R., Subagyo, R., Ansyah, P. R., Ramadhan, M. N., & Jauhari, M. F. (2022). Pemanfaatan Energi Surya Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif Pada Mushola Nurul Hikmah Kelurahan Loktabat Utara-Banjarbaru Untuk Mencapai Green-Energy Mosque. *Jurnal Impact : Implementation and Action*, 4(1), 1–11.
- Indriyani, Y. (2022). Ketahanan Energi Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (Plts Dan Pltbg)Diboyolali. *Jurnal Inovasi Daerah*, 1(1), 10–18.
- Noval, M., Broto, S., Purwa Laksana, E., Musafa, A., & Fath, N. (2024). Rancang Bangun Sistem Pendingin Air Pada Panel Surya Terapung Di Perairan. *Jurnal MAESTRO*, 7(2), 19–25.
- Pemanfaatan Energi Surya*. (n.d.).
- Pratama, R. J. (2023). Dampak Optimasi Pemanfaatan Plts Terhadap Ketahanan Energi Satuan Di Kodam Xii/Tpr. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.80314>
- Rozi Farchur Mochamad, S. A. N. (2020). Pemanfaatan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Untuk Mendukung Ketahanan Energi. *Jurnal Program Studi Universitas Pertamina*, 6(1), 39–60.
- Sidik, W. M., Lumbantobing, H., Indrawan, B., Putra, Y., Imamulhak, Y., & Rinaldi, R. (2023). Studi Potensi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mendukung Sistem Ketenagalistrikan di Wilayah IKN. *Jurnal Sistem Komputer Dan Kecerdasan Buatan*, 6(2), 137–144.
- Syaiful Alim M., T. S. (2023). Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebagai Alternatif Ketahanan Energi Nasional Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 2427–2435. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1480>
- Yuwono, S., Diharto, D., & Pratama, N. W. (2021). Manfaat Pengadaan Panel Surya dengan Menggunakan Metode On Grid. *Energi & Kelistrikan*, 13(2), 161–171. <https://doi.org/10.33322/energi.v13i2.1537>

Pengaruh Pemberian Mobilisasi Dini Terhadap Tingkat Nyeri Pada Ibu Pasca Operasi *Sectio Caesarea*

The Effect Of Early Mobilization On Pain Levels In Post Operation Sectio Caesarean Mothers

Rima Novianti¹, Aas², Agus Subari³

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Horizon Indonesia

e-mail: rima.novianti.krw@horizon.ac.id

ABSTRAK

Latar Belakang: Salah satu masalah utama yang dialami oleh pasien pasca operasi *sectio caesarea* adalah nyeri yang dapat mengganggu toleransi terhadap aktivitas sehari-hari. Nyeri ini umumnya muncul ketika efek anestesi mulai menghilang, sehingga pasien merasakan ketidaknyamanan yang cukup signifikan. Salah satu upaya non-farmakologis yang dapat dilakukan untuk mengurangi intensitas nyeri adalah mobilisasi dini. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian mobilisasi dini terhadap tingkat nyeri pada ibu pasca operasi *sectio caesarea*. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *true experiment*, yaitu *post-test only control group design*. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Total sampel berjumlah 30 responden, terdiri dari 15 orang pada kelompok intervensi (mobilisasi dini) dan 15 orang pada kelompok kontrol (tanpa mobilisasi dini). Instrumen penelitian menggunakan *Comparative Pain Scale* untuk mengukur tingkat nyeri. **Hasil:** Data tingkat nyeri terdistribusi normal, sehingga analisis dilakukan menggunakan uji t independen. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan rerata tingkat nyeri sebesar 1,13 antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, dengan tingkat nyeri yang lebih rendah pada kelompok intervensi. Hasil uji t independen menunjukkan nilai $p = 0,013$ ($p < 0,05$), yang berarti terdapat perbedaan bermakna antara kedua kelompok. **Kesimpulan:** Pemberian mobilisasi dini terbukti berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan tingkat nyeri pada pasien pasca operasi *sectio caesarea*. Oleh karena itu, mobilisasi dini perlu diajarkan dan dianjurkan oleh tenaga kesehatan sedini mungkin agar pasien dapat melakukan gerakan yang tepat dan efektif dalam mempercepat pemulihan dan mengurangi nyeri.

Kata kunci: Mobilisasi Dini, Pasca operasi partum, Nyeri, Sectio caesarea

ABSTRACT

Background: One of the main problems experienced by postoperative patients of *sectio caesarea* is pain that can interfere with tolerance to daily activities. This pain generally appears when the effects of anesthesia begin to disappear, so the patient feels considerable discomfort. One of the non-pharmacological efforts that can be made to reduce pain intensity is early mobilization. **Objective:** This study aims to determine the effect of early mobilization on the level of pain in mothers after cesarean section. **Methods:** This study uses a quantitative approach with a true experiment

design, namely post-test only control group design. The sampling technique was carried out by purposive sampling based on inclusion and exclusion criteria. The total sample was 30 respondents, consisting of 15 people in the intervention group (early mobilization) and 15 people in the control group (without early mobilization). The research instrument used the Comparative Pain Scale to measure the level of pain. Results: The pain level data was normally distributed, so the analysis was performed using an independent t-test. The results showed that there was a difference in average pain level of 1.13 between the intervention group and the control group, with lower pain levels in the intervention group. The results of the independent t-test showed a value of $p = 0.013$ ($p < 0.05$), which means that there was a significant difference between the two groups. Conclusion: Early mobilization has been shown to have a significant effect on reducing pain levels in postoperative patients by cesarean section. Therefore, early mobilization needs to be taught and recommended by health workers as early as possible so that patients can make appropriate and effective movements in accelerating recovery and reducing pain.

Keywords: *Early Mobilization, Pasca operasi Partum, Pain, Sectio Caesarea*

1. Pendahuluan

Persalinan merupakan proses fisiologis penting dalam kehidupan seorang perempuan, yang secara umum dilakukan melalui dua metode, yakni persalinan pervaginam dan persalinan melalui tindakan operasi, atau yang dikenal dengan *sectio caesarea* (SC). *Sectio caesarea* adalah tindakan medis berupa pembedahan untuk mengeluarkan janin dari dalam rahim melalui insisi pada dinding abdomen dan uterus, yang dilakukan apabila persalinan normal tidak memungkinkan karena indikasi maternal atau fetal (Cunningham, 2018; Ayuningtyas, et al., 2018).

Meskipun *sectio caesarea* memberikan beberapa keuntungan, seperti proses kelahiran yang lebih cepat dan tidak mengganggu jalan lahir, tindakan ini juga menimbulkan sejumlah risiko (Novianti & Putri, 2020). Beberapa di antaranya adalah peningkatan risiko kematian, infeksi luka operasi, perlekatan organ, hingga nyeri yang lebih lama dibandingkan persalinan normal (Sari, 2018). Nyeri pasca operasi *sectio caesarea* disebabkan oleh trauma jaringan akibat insisi dan sangat dipengaruhi oleh ambang nyeri individu (Astutik & Kurlinawati, 2017).

Pengelolaan nyeri pasca operasi dapat dilakukan melalui pendekatan farmakologis seperti pemberian analgesik, serta pendekatan non-farmakologis. Salah satu pendekatan non-farmakologis yang terbukti efektif adalah mobilisasi dini. Mobilisasi dini merupakan aktivitas gerak tubuh yang dilakukan secara bertahap dalam waktu 6–24 jam setelah operasi. Aktivitas ini mencakup latihan pernapasan, miring kanan dan kiri, hingga duduk dan berjalan, yang secara fisiologis berperan dalam memperlancar sirkulasi darah, mempercepat penyembuhan luka, serta menurunkan intensitas nyeri (Mawarni, 2018; Asnaniar, et al., 2023). Tahapan mobilisasi dini meliputi: Tahap 1 (4–6 jam pasca operasi): pasien melakukan latihan ringan berupa gerakan pasif dan aktif sederhana, seperti menekuk dan meluruskan tangan serta kaki untuk mencegah kekakuan otot dan meningkatkan sirkulasi. Tahap 2 (8–10 jam pasca operasi): pasien melanjutkan latihan tahap pertama dan ditambah dengan gerakan miring ke kanan dan ke kiri. Tahap 3 (12–24 jam pasca operasi): pasien dilatih untuk duduk secara mandiri dan diarahkan untuk mulai berjalan perlahan dengan bantuan, sebagai bagian dari transisi ke mobilisasi aktif penuh (Helmi, 2012; Kozier, 2010).

World Health Organization (WHO) pada tahun 2019 mencatat bahwa angka *sectio caesarea* terus meningkat di negara-negara berkembang, mencapai 10–15% dari seluruh kelahiran. Di Indonesia, menunjukkan data RISKESDAS tahun 2018 bahwa prevalensi *sectio caesarea* adalah sebesar 9,8%, dengan proporsi tertinggi di DKI Jakarta sebesar 19,9% dan terendah di Sulawesi

Tenggara sebesar 3,3% (KEMENKES, 2018). Di RSUD X, pada bulan Agustus 2023 tercatat 55 pasien menjalani operasi *sectio caesarea*, dengan mayoritas merupakan *sectio caesarea* ulang.

Studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar ibu pasca operasi *sectio caesarea* belum melakukan mobilisasi dini. Hasil observasi mengungkapkan bahwa sebagian pasien melaporkan tingkat nyeri sedang hingga berat dan menghindari pergerakan karena takut mengalami perdarahan atau peningkatan nyeri. Padahal, penundaan mobilisasi dini berisiko memperlambat penyembuhan luka dan meningkatkan lama perawatan di rumah sakit. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus menguji pengaruh mobilisasi dini terhadap tingkat nyeri pasca operasi *sectio caesarea* di fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan fakta tersebut, terlihat bahwa edukasi dan intervensi mobilisasi dini menjadi penting dalam penatalaksanaan nyeri pada pasien pasca operasi *sectio caesarea*.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik yang menggunakan desain *true experiment*. Desain yang digunakan adalah *post-test only control group design*, yaitu desain yang membandingkan dua kelompok (intervensi dan kontrol) tanpa melakukan *pre-test*, namun hanya dilakukan pengukuran *post-test* pada masing-masing kelompok. Desain ini dipilih untuk menghindari efek *pre-test* terhadap hasil pengukuran, serta untuk menguji perbedaan efek intervensi secara langsung antar kelompok (Notoatmodjo, 2018). Intervensi mobilisasi dini dilakukan bertahap dalam 24 jam pertama pasca operasi *sectio caesarea*. Prosedur ini dilaksanakan tiga kali sehari, dengan masing-masing sesi latihan berdurasi antara 15 hingga 30 menit. Mobilisasi dini diberikan sebanyak tiga kali dalam satu hari pada hari pertama pasca operasi *sectio caesarea*, dengan pengulangan latihan dilakukan sebanyak lima kali per sesi. Waktu pengambilan *post-test* disesuaikan dengan masa efektivitas analgesik yang diberikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien pasca operasi *sectio caesarea* yang menjalani perawatan yang berjumlah sebanyak 55 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Federer untuk menentukan jumlah minimal sampel yang dibutuhkan pada setiap kelompok (Sugiyono, 2013). Berdasarkan perhitungan, diperoleh total 30 responden, 15 responden pada kelompok intervensi, yang diberikan perlakuan berupa mobilisasi dini dan 15 responden pada kelompok kontrol, yang menunda mobilisasi dini. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, dengan menetapkan beberapa kriteria inklusi sebagai berikut: pasien pasca operasi *sectio caesarea* yang baru dipindahkan dari ruang pemulihan dalam waktu 2 jam. Pasien menjalani operasi *sectio caesarea* dengan metode *transperitoneal profunda* dan *anestesi spinal*. Pasien menjalani SC untuk pertama kali. Pasien mendapatkan terapi farmakologis yang sama (*Ketorolac/ Ketoprofen*).

Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti: variabel mobilisasi dini diukur menggunakan lembar observasi, yang mencakup tahapan mobilisasi dari gerakan pasif hingga aktif dalam kurun waktu 4–24 jam pasca operasi. Sedangkan variabel tingkat nyeri diukur menggunakan *comparative pain scale*, yaitu skala penilaian nyeri berbasis numerik dan deskriptif yang mengklasifikasikan intensitas nyeri dari skor 0 (tidak nyeri) hingga 10 (nyeri sangat berat). Analisis data, untuk uji normalitas diketahui bahwa distribusi data berbentuk kurva normal sehingga uji beda *mean* yang digunakan adalah *uji t independen*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Nyeri Kelompok *Intervensi* Dan Kelompok *Kontrol*

Tingkat Nyeri	Intervensi		Kontrol	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Nyeri Ringan	3	20	0	0
Nyeri Sedang	12	80	12	80
Nyeri Berat	0	0	3	20
Total	15	100	15	100

Sumber: Rima Novianti, Aas, Agus Subari/ Universitas Horizon Indonesia, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil distribusi frekuensi dari 30 responden pada kelompok *Intervensi* terbanyak intensitas nyeri sedang sebanyak 12 responden (80%) sedangkan pada kelompok *kontrol* terbanyak pada intensitas nyeri sedang sebanyak 12 responden (80%).

Tabel 2. Pengaruh Pemberian Mobilisasi Dini Terhadap Tingkat Nyeri Pada Ibu *Pasca operasi Sectio Caesarea*

Kelompok	N	Mean	St. Deviasi	Hasil Uji t Independent	
				Nilai t	P Value
Intervensi	15	4,60	,0737	-2,646	0,013
Kontrol	15	5,73	,0884		
Selisih		1,13	0,147		

Sumber: Rima Novianti, Aas, Agus Subari/ Universitas Horizon Indonesia, 2023.

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh perbedaan rata-rata (mean) tingkat nyeri antara kelompok *intervensi* dan kelompok *kontrol* sebesar 1,13, dengan nilai rata-rata tingkat nyeri masing-masing yaitu 4,60 pada kelompok *intervensi* dan 5,73 pada kelompok *kontrol*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pasien pada kelompok *intervensi* yang telah diberikan mobilisasi dini mengalami penurunan tingkat nyeri yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok *kontrol*. Hasil uji *t* independen menunjukkan nilai $p = 0,013$, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan tindakan mobilisasi dini terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien *pasca operasi sectio caesarea*.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian mobilisasi dini terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien *post operasi sectio caesarea*. Selisih rata-rata tingkat nyeri antara kelompok *intervensi* dan *kontrol* sebesar 1,13 menunjukkan bahwa kelompok *intervensi* yang menerima mobilisasi dini mengalami nyeri yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok *kontrol*. Analisis statistik dengan uji *t independen* menghasilkan nilai $p = 0,013$ ($p < 0,05$), yang menunjukkan bahwa hasil tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, H_0 ditolak, yang berarti bahwa mobilisasi dini berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada pasien *pasca sectio caesarea*.

Secara fisiologis, mobilisasi dini memberikan berbagai manfaat terapeutik yang mendukung percepatan pemulihan *pasca operasi*. Mobilisasi dini membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi diameter konduksi saraf nyeri, menekan respon inflamasi jaringan, serta menurunkan pelepasan mediator inflamasi yang memperkuat sensasi nyeri. Selain manfaat tersebut, mobilisasi

dini juga berfungsi sebagai intervensi non-farmakologis yang dapat dilakukan oleh perawat secara mandiri untuk menurunkan intensitas nyeri pasien dan meningkatkan kenyamanan pasca operasi (Ananda, et al., 2021; Daiyana, et al., 2024)

Mobilisasi dini tidak hanya berdampak fisiologis, tetapi juga psikologis dan fungsional. Banyak ibu pasca *sectio caesarea* merasa takut bergerak karena khawatir menambah nyeri atau memicu perdarahan. Padahal, dengan edukasi dan pendampingan dari tenaga kesehatan, pasien dapat melakukan gerakan secara bertahap, aman, dan efektif. Gerakan seperti latihan pernapasan dalam, batuk efektif, dan pergerakan tungkai jika dilakukan minimal 6 jam setelah operasi selama 15–20 menit per sesi, terbukti bermanfaat dalam mempercepat penyembuhan luka dan menstimulasi involusi uterus secara optimal (Cunningham, 2018; Kozier, 2010).

Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa mobilisasi dini berpengaruh signifikan dalam menurunkan nyeri dan meningkatkan kemandirian ibu *post* operasi (Sylvia & Rasyada, 2023; Mawarni, 2018; Sari, 2018). Dengan melibatkan pasien dalam proses mobilisasi sejak dini, perawat secara tidak langsung juga membantu mempercepat pemulihan, mencegah komplikasi, dan mengurangi lama hari rawat (Hamim, et al., 2024).

Mobilisasi dini sebaiknya dijadikan sebagai bagian dari standar prosedur asuhan keperawatan *post* operasi, bukan hanya sebagai aktivitas tambahan. Tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi tentang pentingnya mobilisasi dini sejak pasien di ruang pemulihan, serta melakukan pendampingan selama prosesnya agar gerakan yang dilakukan tepat dan aman. Hal ini akan membantu pasien dalam mengurangi nyeri, memulihkan fungsi tubuh secara optimal, serta mendukung kemandirian ibu dalam merawat dirinya dan bayinya sejak dini. Mobilisasi dini merupakan strategi penting dalam pendekatan keperawatan holistik, yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan keluhan nyeri, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan percepatan proses pemulihan pasien *post sectio caesarea*

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mobilisasi dini berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat nyeri pada ibu pasca operasi *sectio caesarea*. Pasien yang mendapatkan intervensi mobilisasi dini menunjukkan rata-rata tingkat nyeri yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol yang tidak menerima mobilisasi. Hasil uji statistik (uji t independen) memberikan nilai $p = 0,013$ ($p < 0,05$), yang menandakan bahwa perbedaan tersebut bermakna secara statistik. Temuan ini mendukung bahwa mobilisasi dini merupakan strategi non-farmakologis yang efektif dan aman untuk mengurangi nyeri serta mempercepat proses pemulihan pasca operasi. Oleh karena itu, pemberian edukasi dan pendampingan mengenai mobilisasi dini sejak dini sangat penting untuk diterapkan dalam praktik keperawatan di ruang pemulihan pasca operasi.

Daftar Pustaka

- Ananda, A. R., Inayati, A. & L., 2021. Penerapan Mobilisasi Dini Terhadap Proses Penyembuhan Luka Pada Pasien Dengan Post Operasi Appendiktomi Di Kota Metro. *Jurnal Cendikia Muda*, 1(4), pp. 436-444.
- Asnaniar, W. O. S. et al., 2023. *Mobilisasi Dini Pada Pasien Post Operasi Di Ruang Bedah RSUD Kota Makassar*. Kendal, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Astutik, P. & Kurlinawati, E., 2017. Pengaruh Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea. *STRADA : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 6(2), pp. 30-37.
- Ayuningtyas, D., Oktarina, R., Misnaniarti, M. & Sutrisnawati, N. N. . D., 2018. Etika Kesehatan pada Persalinan Melalui Sectio Caesarea Tanpa Indikasi Medis.. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(1), pp. 9-16.
- Cunningham, F. G., 2018. *Obstetri Williams. Edisi 23. Volume 1*. Jakarta: EGC.
- Daiyana, I., H., Hanum, L. & Raharjo, S. B., 2024. Mobilisasi Dini dan Proses Penyembuhan Luka Post Operasi Abdominal Pada Fase Inflamasi. *Journal Keperawatan*, 3(1), pp. 44-52.

- Hamim, N., Salam, A. Y. & Kurniawati, K., 2024. Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Kejadian Post Operative Nausea And Vomiting (Ponv) Pada Pasien Dengan Anestesi Intravena Di Ruang Mina Rumah. *Jurnal Ilmu Kesehatan Mandira Cendikia*, 3(11), pp. 1-11.
- Helmi, Z. N., 2012. *Buku ajar gangguan muskuloskeletal*. Jakarta: Salemba Medika.
- KEMENKES, 2018. *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*, Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- Kozier, B., 2010. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses & Praktik*. 7 penyunt. Jakarta: EGC.
- Mawarni, P. A., 2018. *Penerapan Mobilisasi Dini Pada Ibu Post Sectio Caesarea Dengan Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas Di Bangsal Nusa Indah 2 RSUD Sleman*, s.l.: Poltekes Kemenkes Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S., 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novianti, R. & Putri, D. . N., 2020. Analysis Factors Of Caesarean Section. *Journal of Maternity Care and Reproductive Health*, 3(4), pp. 286-300.
- Sari, C. I. A., 2018. *Pengaruh Ambulasi Dini Terhadap Intensitas Nyeri Post Sectio Caesarea.*, Jombang: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang..
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sylvia, E. & Rasyada, A., 2023. Mobilisasi Dini Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Post Operasi Sectio Caesarea. *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan*, 15(1), pp. 74-85.

Pengawasan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Supervision Of The Authority Of Regional Head In Management Of Regional-Owned Enterprises

Nicholas Martua Siagian

Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Asah Kebijakan Indonesia

e-mail: nicholas.martua@ui.ac.id

ABSTRAK

Pasca pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perwujudan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. BUMD memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kepala daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan umum BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga memiliki posisi sentral dalam pengelolaan BUMD. Namun, kewenangan yang luas ini perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada kepentingan publik dalam pengelolaan BUMD. Penelitian ini membahas urgensi pengawasan terhadap kewenangan kepala daerah guna memastikan pengelolaan BUMD yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan mendukung efektivitas otonomi daerah.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, BUMD, Kepala Daerah, Pengawasan, Tata Kelola

ABSTRACT

Following the implementation of regional autonomy, local governments have been granted the authority to establish Regional-Owned Enterprises (BUMD) as part of the decentralization principles outlined in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 22 of 1999, which was later revised by Law No. 32 of 2004, and most recently regulated under Law No. 23 of 2014 on Regional Government. BUMD play a strategic role in supporting local economic development and generating local own-source revenue (PAD). The regional head holds a central position as the general authority over BUMD, as stipulated in Article 331 of Law No. 23 of 2014. However, this strategic authority must be balanced with effective oversight mechanisms to ensure that BUMD are managed accountably, transparently, and in the public interest. This study examines the urgency of oversight over the regional head's authority to ensure that BUMD management aligns with good governance principles and supports the effectiveness of regional autonomy.

Keywords: Regional Autonomy, BUMD, Regional Head, Oversight, Governance

1. Pendahuluan

Perusahaan Daerah merupakan entitas produksi yang bertujuan menyediakan layanan, menyelenggarakan kemanfaatan bagi publik, serta menghasilkan pendapatan. Istilah ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah secara khusus dan pembangunan ekonomi nasional secara umum, sejalan dengan prinsip ekonomi terpimpin yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui prioritas industrialisasi, ketenagaaan, dan kepuasan kerja, demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Secara filosofis, pelaksanaan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk merealisasikan program ekonomi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Manifesto Politik Republik Indonesia pada 17 Agustus 1959. Manifesto tersebut kemudian diperkuat melalui Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 yang menegaskan perlunya reorganisasi alat produksi dan distribusi dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan dinamika sistem pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tidak lagi dijadikan dasar hukum bagi pengelolaan perusahaan daerah. Terminologi "perusahaan daerah" mengalami perubahan menjadi "Badan Usaha Milik Daerah" (BUMD). Istilah BUMD secara resmi diperkenalkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 yang mengatur bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah. Dalam peraturan tersebut, BUMD dapat berbentuk Perusahaan Daerah ataupun Perseroan Terbatas. BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perusahaan Daerah, sementara BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah—yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah—memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen dalam mendukung pelaksanaan otonomi di wilayahnya masing-masing. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa daerah-daerah otonom memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri dan optimal.

Dalam kerangka otonomi tersebut, setiap daerah diberikan keleluasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan, yang menuntut tersedianya sumber daya keuangan dan kewenangan yang memadai. Dalam konteks pengelolaan BUMD, kepala daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena posisi kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan umum pemerintahan di daerah.

Seiring berjalannya waktu, data dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK menunjukkan sejumlah permasalahan dalam kinerja BUMD. Tercatat 274 BUMD mengalami kerugian, 291 berada dalam kondisi tidak sehat (mengalami kerugian dan memiliki ekuitas negatif), 17 BUMD memiliki nilai kekayaan yang lebih rendah dibandingkan kewajibannya, 186 BUMD menunjukkan ketidakseimbangan struktur organisasi dengan jumlah dewan pengawas dan komisaris yang melebihi jumlah direksi, serta 60% BUMD tidak memiliki unit pengawasan internal. Padahal, BUMD diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen andalan Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Selain itu, keuntungan dari BUMD seharusnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan kritis: apakah eksistensi BUMD

masih relevan dan dibutuhkan, ataukah perlu dicari alternatif solusi agar pendirian BUMD benar-benar sejalan dengan tujuan awal pembentukannya?

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan prinsip-prinsip hukum terkait kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah dan pengelolaan BUMD. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, jurnal, buku hukum administrasi negara, serta artikel ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Melakukan telaah kritis terhadap undang-undang terkait kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan BUMD dan prinsip-prinsip desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengevaluasi peran kepala daerah dalam pengelolaan BUMD serta mekanisme pengawasan terhadap kewenangan tersebut. Analisis ini akan mempertimbangkan aspek akuntabilitas, transparansi, dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Metode ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang komprehensif mengenai hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan BUMD oleh kepala daerah, dan pengawasan kewenangan tersebut guna menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Istilah BUMD mulai dikenal secara resmi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, dan kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan karena pendirian serta regulasi terkait BUMD hingga kini masih merujuk pada ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Secara hukum, Undang - Undang tersebut masih tetap berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Lampiran III dinyatakan tidak berlaku hanya apabila telah ada undang-undang pengganti yang diberlakukan secara resmi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 mengenai Perusahaan Daerah masih tetap berlaku hingga ada undang-undang pengganti yang disahkan. Namun, hingga saat ini undang-undang

pengganti tersebut belum juga ada, sementara isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut memiliki semangat yang berbeda dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Karena itu, pelaksanaan undang-undang tersebut dianggap sudah tidak relevan dan kurang efektif dalam mengatur penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).¹

Dalam perkembangan pengaturannya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur sebagai bagian dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Bab XII yang memuat ketentuan dari Pasal 331 hingga Pasal 343. Saat ini, landasan hukum BUMD didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang mulai diterapkan sejak Desember 2017. Namun, regulasi mengenai BUMD yang ada sampai saat ini belum menciptakan pengelolaan yang ideal karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur BUMD secara menyeluruh, melainkan hanya diatur secara terpisah dalam konteks pemerintahan daerah.²

Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang modalnya dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh pemerintah daerah. Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3), dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai Badan Usaha Milik Daerah.³

Oleh karena itu, permasalahan yang ditemukan adalah Peraturan pemerintah ini merujuk kepada Undang-Undang Pemerintah Daerah bukan terhadap Undang-Undang khusus yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini menjadi permasalahan penting terhadap keseluruhan dasar hukum dari peraturan pemerintah ini. Padahal, di samping Undang-Undang Pemerintah Daerah terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang berlaku sebagian hingga saat ini sebagai dasar hukum.

Permasalahan ini semakin tampak jelas dalam Pasal 405 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa saat undang-undang ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana yang berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387) tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang baru tersebut.

3.2. Pembahasan

Analisis Permasalahan Terhadap Kewenangan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam konteks desentralisasi fiskal di era otonomi daerah, penguatan dan ekspansi kewenangan pemerintah daerah menuntut adanya kerangka hukum yang komprehensif dan ketat untuk mencegah diskoordinasi dalam perumusan kebijakan publik. Otonomi dalam pengelolaan urusan pemerintahan oleh daerah mensyaratkan adanya ruang bagi inisiatif lokal, yang pada gilirannya memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang memadai. Untuk itu, mekanisme

¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, UU Nomor 6 Tahun 1969, LN Tahun 1969, selanjutnya disebut UU 6/1969.

² Ditjen PP Kemenkumham, "Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah" [³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Daerah*, PP Nomor 54 Tahun 2017, LN Tahun 2017, selanjutnya disebut PP 54/2017, Ps.331.](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2943:kewenangan-kepala-daerah-terhadap-badan-usaha-milik-daerah&catid=103&Itemid=184&lang=en#:~:text=Dasar%20hukum%20pembentukan%20BUMD%20adalah,merupakan%20kekayaan%20daerah%20yang%20dipisahkan., diakses 10 Juni 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=)

pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu diatur secara normatif dan tegas guna meminimalisir potensi tumpang tindih kewenangan serta menghindari konflik fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan sebagai pengelola keuangan daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut, kepala daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan daerah yang mencakup, antara lain, ringkasan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketentuan ini menegaskan bahwa BUMD merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, optimalisasi peran strategis BUMD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam aspek yuridis, ketentuan mengenai BUMD diatur dalam Pasal 304 serta Pasal 331 hingga Pasal 343 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, pengaturan yang lebih rinci mengenai tata kelola BUMD—meliputi proses pendirian, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan—diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Hubungan antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan implementasi otonomi daerah tercermin dari klasifikasi BUMD ke dalam dua bentuk, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Perumda memiliki mandat utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta potensi lokal masing-masing daerah. Sebaliknya, Perseroda didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan lebih diarahkan pada tujuan komersial, yaitu pencapaian keuntungan.

Permasalahan terkait pembagian kewenangan kepala daerah dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tampak semakin kompleks, terutama karena dipengaruhi oleh dinamika politik yang berbeda-beda di setiap daerah. BUMD, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah, kerap kali dijadikan alat tawar-menawar dalam transaksi kepentingan politik oleh kepala daerah terpilih pasca-pemilihan. Indikasi ini diperkuat melalui temuan-temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), antara lain:⁵

1. "Tata kelola dan kinerja BUMD belum memadai, sehingga BUMD belum dapat melayani dan memenuhi tanggung jawab kepada publik secara optimal;
2. Pemerintah Daerah tidak menjabarkan peran dan arah pengembangan BUMD dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga tidak ada pedoman untuk merumuskan langkah pengembangan dan pembinaan BUMD;
3. Ketidakjelasan visi dan misi pemerintah daerah terkait tujuan pembentukan BUMD, sehingga BUMD sulit untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, misalnya BUMD tidak dapat memenuhi tujuan penyediaan barang/jasa kepada masyarakat daerah, sekaligus mendapatkan untung dari usaha BUMD tersebut;
4. Rekrutmen Dewan Komisaris/Badan Pengawas, direksi dan karyawan BUMD yang tidak melalui proses yang terbuka dan transparan, sehingga banyak yang meragukan kompetensinya;

⁴ Ditjen PP Kemenkumham, "Kewenangan Kepala Daerah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah" [⁵ Badan Pemeriksa Keuangan, "BPK Laporkan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemda, BUMD, BLUD Ke DPD", <https://www.bpk.go.id/news/bpk-laporkan-hasil-pemeriksaan-kinerja-pemda-bumd-blud-ke-dpd>, diakses 10 Juni 2023.](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2943:kewenangan-kepala-daerah-terhadap-badan-usaha-milik-daerah&catid=103&Itemid=184&lang=en#:~:text=Dasar%20hukum%20pembentukan%20BUMD%20adalah,merupakan%20kekayaan%20daerah%20yang%20dipisahkan., diakses 10 Juni 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=)

5. Respon atau izin Pemerintah Daerah atas keputusan bisnis seringkali lambat, sehingga BUMD tidak mampu bersaing dengan sektor swasta yang pada gilirannya akan mengalami kerugian;
6. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam aspek permodalan BUMD.”

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan wajib berlandaskan pada asas legalitas, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Setiap pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan prinsip-prinsip AUPB. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diartikan sebagai pelaksana urusan pemerintahan oleh kepala daerah bersama dengan DPRD, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda), kepala daerah memiliki otoritas penuh, mengingat seluruh modal Perumda bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah selaku pemilik modal sekaligus organ tertinggi dalam struktur Perumda merupakan bentuk tindakan hukum publik yang bersumber dari kewenangan atribusi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁶ Dalam struktur pengelolaan Perseroda, kepala daerah berperan sebagai pemegang saham dengan otoritas pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang BUMD. Berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kepemilikan saham oleh pemerintah daerah terhadap Perseroda dapat berbentuk kepemilikan penuh (100%) atau minimal 51% dari total saham yang beredar. Dengan proporsi kepemilikan tersebut, pemerintah daerah memiliki posisi sebagai pemegang saham mayoritas. Status ini memberikan pengaruh signifikan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), khususnya terkait kebijakan permodalan dan pengambilan keputusan strategis Perseroda.⁷

Peraturan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai BUMD memberikan otoritas yang sangat besar kepada kepala daerah. Selain menjalankan fungsi utama sebagai pemimpin pemerintahan di daerah, kepala daerah juga memegang peran sentral dalam pengelolaan BUMD, baik yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) maupun Perseroan Daerah (Perseroda). Luasnya kewenangan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), yang pada akhirnya dapat melemahkan tata kelola BUMD.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 343 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pengelolaan BUMD sekurang-kurangnya harus mencakup aspek-aspek berikut: *“Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: a. tata cara penyertaan modal; b. organ dan kepegawaian; c. tata cara evaluasi; d. tata kelola perusahaan yang baik; e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; f. kerjasama; g. penggunaan laba; h. penugasan Pemerintah Daerah; i. pinjaman; j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; l. perubahan bentuk hukum; m. kepailitan; dan n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.”*

⁶ Ryan Surya Pradhana., “Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah,” *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 4.

⁷ Ibid, hlm.5

Maladministrasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Keuangan Negara (Studi Kasus : Maladministrasi Seleksi Organ BUMD Kota Makassar)

Birokrasi memegang peranan strategis dalam memastikan efektivitas pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Roskin menggarisbawahi bahwa birokrasi tidak semata-mata berfungsi sebagai penyedia layanan publik yang optimal, melainkan juga sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan politik pemerintah dalam mencapai tujuan nasional, khususnya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, birokrasi sering kali tidak dijalankan secara optimal dan malah menimbulkan berbagai bentuk maladministrasi. Menurut Nurtjahjo, fenomena tersebut merupakan salah satu faktor utama yang menghambat proses reformasi birokrasi.⁸

Salah satu contoh faktual maladministrasi dalam penyelenggaraan birokrasi adalah dalam pemilihan direksi dan dewan pengawas sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar. Kasus ini bermula ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyelenggarakan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan direksi dan dewan pengawas dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, Perusahaan Perseroan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, PT Bank Pengkreditan Rakyat (Perseroda), dan PD Rumah Potong Hewan Kota Makassar pada bulan Mei 2022.⁹

Publik dikejutkan setelah mengetahui bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M. Ansar, yang diamanatkan sebagai Ketua Tim Seleksi (Timsel) untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), justru lolos sebagai calon Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar.¹⁰ Kemudian, diketahui pula bahwa Walikota Makassar, Danny Pomanto, meniadakan tahap wawancara kepada beberapa peserta seleksi.¹¹ Ia beralasan bahwa banyak peserta seleksi merupakan orang-orang terdekatnya sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).¹² Atas kejadian tersebut, 4 orang peserta seleksi akhirnya mengadukan proses seleksi tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan atas dasar indikasi pelanggaran maladministrasi dan cacat prosedural.¹³ Pada akhirnya, ORI Perwakilan Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi kepada Pemkot Makassar untuk memperbaiki prosedur tersebut, yaitu untuk melakukan wawancara dengan tenggat waktu 30 hari.¹⁴

Meski demikian, ORI Perwakilan tidak memberikan sanksi atau rekomendasi atas keikutsertaan Sekda sebagai peserta seleksi, meskipun ia merupakan ketua Timsel. Guna mengupas bentuk penyimpangan birokrasi yang terjadi, maka penting untuk melihat kesesuaian proses seleksi di atas

⁸Hendra Nurtjahjo, et. al., *Memahami Maladministrasi* (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013), hlm. 2.

⁹Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, "Pengumuman Terbuka Seleksi Calon Direksi, Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Pemkot Makassar," <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/474>, diakses pada 6 Juni 2023.

¹⁰ Ibnu Munsir, "Ombudsman Periksa Sekda Makassar Soal Dugaan Maladministrasi Seleksi BUMD," <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6229484/ombudsman-periksa-sekda-makassar-soal-dugaan-maladministrasi-seleksi-bumd>, diakses pada 6 Juni 2023.

¹¹ Tim detikSulsel, "Maladministrasi Seleksi BUMD Makassar gegara Walkot Tiadakan Wawancara," <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6388858/maladministrasi-seleksi-bumd-makassar-gegara-walkot-tiadaan-wawancara>, diakses pada 6 Juni 2023.

¹² *Ibid.*

¹³Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, "Ombudsman Dalam Aduan Maladministrasi Seleksi Jabatan BUMD Makassar," <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-dalami-aduan-maladministrasi-seleksi-jabatan-bumd-makassar>, diakses pada 6 Juni 2023.

¹⁴ Dahrul Amri Lobubun, "Ombudsman Temukan Maladministrasi saat Seleksi BUMD Makassar," <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/dahrul-lobubun/ombudsman-temukan-maladministrasi-saat-seleksi-bumd-makassar?page=all>, diakses pada 6 Juni 2023.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, persyaratan mengenai Direksi, Dewan Pengawas, dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017). Pasal 39 dan 58 PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa pemilihan organ perusahaan tersebut harus dilakukan melalui seleksi yang sekurang-kurangnya meliputi tahap UKK.¹⁵

Proses seleksi anggota organ BUMD sesungguhnya merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan dalam birokrasi publik, yang bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pengembangan BUMD. Oleh sebab itu, Pemkot Makassar perlu memperhatikan prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, yaitu: (a) prinsip legalitas; (b) prinsip perlindungan hak asasi manusia; dan (c) prinsip-prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).¹⁶ Pertama, asas legalitas mengandung makna bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh lembaga maupun pejabat pemerintahan.¹⁷

Apabila ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku, keikutsertaan Sekda sebagai peserta seleksi sekaligus ketua timsel sebenarnya tidak dilarang. Pasal 38 PP 54/2017 tidak memuat persyaratan bahwa anggota Dewan Pengawas/Komisaris tidak boleh berasal dari ASN atau perangkat daerah. Justru, PP yang sama mensyaratkan bahwa anggota tersebut memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kualitas yang dimiliki oleh Sekda. Pun tidak ada larangan bahwa anggota Timsel dalam UKK tidak boleh merangkap sebagai peserta. Oleh karena itu, persoalan keikutsertaan Sekda bukan merupakan persoalan hukum. Namun, terdapat benturan terhadap asas-asas lainnya.

Persoalan peniadaan wawancara oleh Walikota Makassar sejatinya tidak dapat dipungkiri sebagai bentuk pelanggaran dan penyimpangan hukum dan maladministrasi. Dari segi birokrasi publik, peniadaan tersebut justru merupakan penyimpangan birokrasi publik, sebab tidak memberikan pelayanan publik yang sesuai tujuan. Walikota Makassar sebagai birokrat tidak menunjukkan perannya sebagai katalisator atau memberikan contoh yang baik bagi masyarakat maupun aparatur, yaitu dengan melakukan penyimpangan hukum tanpa alasan yang sah dan konstruktif.¹⁸ Kedua, peniadaan wawancara akhir terhadap peserta tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini, Walikota Makassar tidak bersikap adil dan tidak memperlakukan peserta-peserta tertentu secara sama di hadapan hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perilaku yang sama juga tercermin dalam keikutsertaan Sekda sebagai peserta. Meskipun bukanlah perbuatan melawan hukum, kedudukan Sekda yang memiliki kewenangan lebih untuk menentukan calon anggota yang lolos UKK sejatinya menunjukkan ketidakadilan. Ketiga, peniadaan wawancara akhir terhadap orang-orang tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap AUPB, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.¹⁹

Hal ini juga masuk pada definisi Maladministrasi, yaitu perbuatan melawan hukum untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut dan menimbulkan kerugian, baik materiil maupun

¹⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah, PP No. 54 Tahun 2017, LN 2017 No. 305, TLN No. 6173, Ps. 39 dan Ps. 58.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 292, TLN No. 5601, Ps. 5.

¹⁷ Ibid., Penjelasan Ps. 5.

¹⁸ Yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan* (Bandung: Alfabet, 2021), hlm. 31.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 292, TLN No. 5601, Ps. 10.

immateriil, kepada peserta seleksi lainnya. Selain itu, apabila ditinjau berdasarkan syarat pemenuhan birokrasi publik yang demokratis menurut Frederick C. Mosher, maka Walikota Makassar tidak cermat memperhatikan dua nilai yang saling berbenturan, yaitu *efficiency* dan *equity*.²⁰ Secara sekilas, terdapat persoalan efisiensi dalam mewawancarai orang terdekat Walikota, sebab Walikota tersebut pastinya sudah tahu kepribadian, performa, hingga gagasan yang dibawa sehingga mubazir agaknya untuk melakukan wawancara akhir.

Namun, dalam kasus *a quo*, hal *efficiency* sebenarnya bukanlah hal yang patut dipermasalahkan, sebab tidak ada hambatan ataupun kerugian yang dapat menghambat birokrasi publik. Seharusnya, Walikota Makassar tetap bersikap profesional dan berusaha memperhatikan prinsip *equity* terhadap peserta lainnya, sebab ia tahu bahwa ia akan bersikap biasa terhadap peserta tertentu. Adapun terdapat kritik terhadap tanggapan dan rekomendasi ORI. Terlihat bahwa ORI menutup mata terhadap dugaan maladministrasi berupa partisipasi Sekda sebagai peserta dan tim seleksi. Sebagaimana telah diungkapkan, partisipasi tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

Namun, keikutsertaan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014. Tidak dapat dipungkiri bahwa timbul pula *conflict of interest* dalam diri Sekretaris Daerah (Sekda) tersebut. Sekda akan lebih mengutamakan dirinya, pun kenyataannya Sekda tersebut lolos sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas. Lebih lanjut, perbuatan demikian juga masuk pada definisi maladministrasi, yaitu menggunakan wewenang untuk tujuan lain (meloloskan diri sendiri) dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut dan menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, kepada peserta seleksi lainnya. Oleh karena itu, ORI juga keliru dalam memberikan rekomendasi dan tanggapan.

Komparasi Karakteristik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyatakan bahwa BLUD merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dari dinas atau badan daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, yang diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sebagai bentuk pengecualian dari sistem pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Secara prinsip, keberadaan BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan kebermanfaatan. Seluruh proses pengelolaan dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Terminologi Badan Layanan Umum (BLU) awalnya merujuk pada satuan kerja atau instansi di kementerian/lembaga yang pada dasarnya masih mengikuti prinsip universalitas dalam pengelolaan keuangan negara.²¹ Dibentuklah Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa: "*BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.*"

²⁰Gerald L. Zandstra, "Public Administration Theory and Views of the Human Person," (Disertasi Doktor Western Michigan University, Michigan, 2007), hlm. 168.

²¹ Henny Juliani, "Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, Desember 2018, hlm. 5

Seiring dinamika dalam birokrasi, pemerintah daerah juga akhirnya memiliki badan layanan umum yang dinamakan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam pelaksanaannya, Badan Layanan Umum Daerah memiliki perbedaan dan persamaan. Dari sisi persamaan, BUMD maupun BLUD dikelola oleh kepala daerah. Hal tersebut menunjukkan peran kepala daerah yang sentral dan kewenangan yang luas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah tentang BUMD, dan Permendagri tentang Badan Layanan Umum. Dari sisi perbedaan, BUMD menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah tentang BUMD yaitu:

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.”

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dijelaskan bahwa *“BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.”* Jadi, dapat kita simpulkan bahwa BUMD bertujuan untuk berorientasi pada profit, sedangkan BLUD bertujuan untuk tidak hanya berorientasi pada profit namun pelayanan umum.²²

4. Kesimpulan

Saat ini, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih belum didukung oleh dasar hukum yang kokoh dan jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang mengatur pengelolaan BUMD. Proses harmonisasi ini harus dilakukan secara vertikal maupun horizontal, mencakup seluruh tingkatan regulasi—dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi hingga yang paling rendah. Baik BUMD maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dikelola oleh kepala daerah selaku penyelenggara tertinggi dalam struktur pemerintahan daerah. Namun, besarnya kewenangan kepala daerah perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang (*conflict of interest*), sebagaimana telah diuraikan dalam studi kasus sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, BUMD dan BLUD memiliki peran yang krusial, baik dalam memberikan pelayanan publik maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, keduanya merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun demikian, agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awal pendiriannya dan menghindari potensi kerugian negara, keberadaan serta operasionalisasi BUMD dan BLUD harus ditegaskan dan diawasi secara lebih ketat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai BUMD, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

²² Sekretariat Kabinet RI. “Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Peningkatan Perekonomian Daerah”, <https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/>, diakses 12 Juni 2023

1. Diperlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Penting dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, atau bahkan mengganti undang-undang tersebut dengan regulasi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika BUMD saat ini.
3. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah pusat terhadap kewenangan kepala daerah untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang. Pengawasan ini bisa dilakukan dengan mendelegasikan wewenang tersebut langsung kepada kementerian terkait atau lembaga audit negara.

Daftar Pustaka

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN Tahun 2014.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 292, TLN No. 5601.
- Indonesia. (1969). Undang-Undang tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, UU No. 6 Tahun 1969, LN Tahun 1969.
- Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah, PP No. 54 Tahun 2017, LN Tahun 2017.
- Roskin, M. G., et al. (2012). *Political Science: An Introduction*. New Jersey: Pearson Education International.
- Nurtjahja, H., et al. (2013). *Memahami Maladministrasi*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Rusfiana, & Supriatna, Y. C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Bandung: Alfabet.
- Pradhana, R. S. (2019). Wewenang kepala daerah dalam pengelolaan badan usaha milik daerah. *Jurnal Hukum PERATUN*, 2(2), 4.
- Juliani, H. (2018). Eksistensi badan layanan umum sebagai penyelenggara pelayanan publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(Desember), 5.
- Medcom.id. (2023, Juni 5). KPK: 274 BUMD Rugi, 291 Sakit. Diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybDDmYPb-kpk-274-bumd-rugi-291-sakit>
- Ditjen PP Kemenkumham. (2023, Juni 10). Kewenangan Kepala Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2943:kewenangan-kepala-daerah-terhadap-badan-usaha-milik-daerah&catid=103&Itemid=184&lang=en#:~:text=Dasar%20hukum%20pembentukan%20BUMD%20adalah
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023, Juni 10). BPK Laporkan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemda, BUMD, BLUD ke DPD. Diakses dari <https://www.bpk.go.id/news/bpk-laporkan-hasil-pemeriksaan-kinerja-pemda-bumd-blud-ke-dpd>
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (2023, Juni 10). Pengumuman Terbuka Seleksi Calon Direksi, Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Pemkot Makassar. Diakses dari <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/474>
- Munsir, I. (2023, Juni 10). Ombudsman Periksa Sekda Makassar Soal Dugaan Maladministrasi Seleksi BUMD. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6229484/ombudsman-periksa-sekda-makassar-soal-dugaan-maladministrasi-seleksi-bumd>
- Tim detik Sulsel. (2023, Juni 10). Maladministrasi Seleksi BUMD Makassar Gegara Walikota Adakan Wawancara. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6388858/maladministrasi-seleksi-bumd-makassar-gegara-walkot-tiadakan-wawancara>
- Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. (2023, Juni 10). Ombudsman Dalami Aduan Maladministrasi Seleksi Jabatan BUMD Makassar. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia-ombudsman-dalami-aduan-maladministrasi-seleksi-jabatan-bumd-makassar>
- Lobubun, D. A. (2023, Juni 10). Ombudsman Temukan Maladministrasi saat Seleksi BUMD Makassar. Diakses dari <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/dahrul-lobubun/ombudsman-temukan-maladministrasi-saat-seleksi-bumd-makassar?page=all>
- Sekretariat Kabinet RI. (2023, Juni 12). Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Peningkatan Perekonomian Daerah. Diakses dari <https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/>

Estimasi Matriks Asal-Tujuan Pengguna Kereta Cepat (*Whoosh*) Jakarta–Bandung untuk Tahun Rencana 2028 dan Analisis Wilayah Pelayanan serta Potensi Kunjungan ke Stasiun Kereta Cepat (*Whoosh*) Karawang

*Estimation of Origin-Destination Matrix for Jakarta–Bandung High-Speed Rail (*Whoosh*) Users in the Planned Year of 2028 and Analysis of Service Area Coverage and Market Share Potential at the Karawang High-Speed Rail (*Whoosh*) Station*

Muhammad Ihsan Akbar¹

Perumnas Bumi Telukjambe Blok R

e-mail: ¹Ihsanakbar0810@gmail.com

ABSTRAK

Pesatnya pembangunan di kota-kota besar dan pertumbuhan penduduk di Indonesia telah memicu arus urbanisasi dan migrasi yang signifikan, terutama di wilayah Jabodetabek serta meluas ke Kab. Karawang, Kab. Bandung, dan Kab. Bandung Barat. Sebanyak 14,9% dari 29,6 juta penduduk usia kerja di Jabodetabek merupakan komuter pada tahun 2023, dan ketiga kabupaten tersebut tercatat sebagai wilayah dengan arus migrasi masuk tertinggi di Jawa Barat tahun 2022. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga meningkatkan risiko kemacetan. Kehadiran Kereta Cepat Jakarta–Bandung diharapkan menjadi solusi, dengan target menyerap 11% dari 256 ribu pergerakan kendaraan pribadi. Penelitian ini bertujuan mengestimasi jumlah pengguna Kereta Cepat pada tahun 2028 melalui analisis Matriks Asal-Tujuan (MAT) model gravitasi serta menganalisis cakupan pelayanan dan potensi kunjungan ke Stasiun Kereta Cepat Karawang menggunakan metode *service area* dan *market share* berbasis GIS. Hasil menunjukkan estimasi jumlah pengguna mencapai 96,7 juta orang/tahun atau 268.670 orang/hari, melampaui target 30.000 orang/hari. Pergerakan terbanyak berasal dari Kota Jakarta Timur, sedangkan kunjungan ke Stasiun Kereta Cepat di Kab. Karawang paling banyak berasal dari Kota Jakarta Timur, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Bandung. Cakupan pelayanan Stasiun Karawang mencakup area inti TOD (0,5–1 km) dan area luar TOD (hingga 5 km), dengan potensi kunjungan tertinggi berasal dari wilayah tengah Kab. Karawang.

Kata kunci: Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Matriks Asal-Tujuan, Service Area, Market Share Area.

ABSTRACT

The rapid development of major cities and population growth in Indonesia have triggered significant urbanization and migration flows, particularly in the Greater Jakarta area (Jabodetabek) and expanding into Karawang, Bandung, and West Bandung Regencies. In 2023, 14.9% of the 29.6 million working-age population in Jabodetabek were commuters, while these three regencies recorded the highest inward migration rates in West Java in 2022. This condition can drive regional

economic growth but also increases the risk of traffic congestion. The Jakarta–Bandung High-Speed Rail (*Whoosh*) is expected to serve as a solution, aiming to absorb 11% of the 256,000 daily private vehicle movements along the corridor. This study aims to estimate the number of *Whoosh* users in 2028 using the Gravity-based Origin-Destination (OD) Matrix analysis, and to analyze the service coverage and potential visits to the Karawang Station using service area and market share analysis in a GIS environment. The results indicate that projected usage may reach 96.7 million passengers annually or 268,670 passengers per day, far exceeding the initial target of 30,000 passengers per day. The highest movement originates from East Jakarta, while visits to Karawang Station are mainly from East Jakarta, West Bandung, and Bandung. The service coverage of Karawang Station includes a TOD core area (0.5–1 km) and an outer area (up to 5 km), with the highest visit potential concentrated in the central region of Karawang Regency.

Keywords: *Jakarta–Bandung High-Speed Rail, Origin-Destination Matrix, Service Area, Market Share Area*

1. Pendahuluan

Dewasa ini, pesatnya pembangunan di kota-kota besar serta masifnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia telah memicu lonjakan arus migrasi dan urbanisasi yang signifikan dilintas perdesaan & perkotaan. Migrasi merupakan fenomena mobilitas penduduk secara spasial yang melibatkan perubahan tempat tinggal dari tempat asal ke tempat tujuan (Rusli, 2014). Migrasi terbagi dalam dua bentuk, yaitu migrasi permanen atau menetap dan migrasi non-permanen atau sementara / komuter (Mantra, 2012). Pola migrasi di negara berkembang seperti Indonesia, umumnya menunjukkan suatu pemusatan arus migrasi ke wilayah-wilayah tertentu, khususnya ke perkotaan (Firman, 1994). Hal ini disebabkan oleh poros kekuatan ekonomi yang masih terpusat di wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan dan biaya menjadi alasan utama penduduk mengambil keputusan untuk bermigrasi (Todaro, 1981). Hal serupa juga diutarakan oleh (Hidayati, 2019) bahwa volume migrasi didorong oleh motif ekonomi seperti pertimbangan jarak terhadap keberadaan kawasan industri, transportasi dan perdagangan. Pada saat yang sama, hal ini juga memicu fenomena urbanisasi atau kenaikan proporsi jumlah penduduk di perkotaan (Bintaro, 1984).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 56,7% pada tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035, serta 70% diantaranya akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2045. Fenomena ini tidak hanya terpusat di wilayah metropolitan seperti Jabodetabek tetapi juga meluas ke wilayah-wilayah lain, seperti Kab. Karawang, Kab. Bandung, dan Kab. Bandung Barat. Seperti diketahui bahwa jumlah komuter di Jabodetabek tahun 2023 mencapai 14,9% dari 29,6 juta penduduk usia kerja Jabodetabek (*Statistik Komuter Jabodetabek Tahun 2023*, 2024). Selain itu, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah penduduk migrasi masuk antar Kabupaten/Kota di Prov. Jawa Barat tahun 2019-2022, Kab. Bandung secara konsisten menempati posisi teratas, Kab. Bandung Barat menempati urutan 5 dari sebelumnya urutan 22, dan Kab. Karawang menempati urutan 6 dari sebelumnya urutan 14. Fenomena ini dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan aktivitas industri, perdagangan, dan jasa. Namun, fenomena ini juga dapat berdampak negatif, terutama peningkatan kemacetan lalu lintas akibat dari tidak seimbangnya antara jumlah mobilitas yang terjadi dengan ketersediaan sarana dan prasarana lokal. Menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peran sistem transportasi umum sebagai pengendali mobilitas kegiatan urbanisasi, salah satunya melalui peran kereta cepat (*whoosh*) Jakarta - Bandung.

Kereta Cepat (*Whoosh*) Jakarta–Bandung, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, 2016) yang dirancang untuk mempercepat konektivitas antara dua pusat pertumbuhan ekonomi utama di Pulau Jawa. Dengan kecepatan operasional mencapai 350 km/jam dan waktu tempuh hanya sekitar 40 menit, moda ini diharapkan dapat mereduksi tekanan pada jalan tol Jakarta–Bandung, meningkatkan produktivitas perjalanan harian, serta memperkuat integrasi kawasan megapolitan Jakarta–Bandung. Melalui kehadiran Kereta Cepat Jakarta–Bandung (*Whoosh*), juga diharapkan dapat menyerap 11% dari total 256 ribu pergerakan kendaraan pribadi Jakarta-Bandung pada tahun 2023 (Arief, 2023). Terdapat 4 stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung (*Whoosh*), yaitu Stasiun Halim di Kota Jakarta Timur, Stasiun Padalarang di Kab. Bandung Barat, Stasiun Tegalluar di Kab. Bandung, dan Stasiun Karawang di Kab. Karawang.

Posisi strategis Kab. Karawang dalam lintasan pelayanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, memiliki potensi besar sebagai simpul transit, destinasi potensial bagi komuter, serta kawasan pengembangan baru. Sejalan dengan itu, Berdasarkan (*Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Transit Oriented Development Kereta Cepat Dan Sekitarnya Tahun 2023-2043*, 2023), kawasan sekitar stasiun kereta cepat di Karawang dirancang sebagai *Transit Oriented Development* (TOD). TOD ini bertujuan untuk mengintegrasikan transportasi publik dengan pengembangan kawasan yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Keberadaan stasiun kereta cepat di Karawang juga berpeluang mengakselerasi pertumbuhan kawasan industri dan hunian terpadu, mengingat saat ini Kab. Karawang menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi jumlah pengguna Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada tahun rencana 2028 menggunakan metode analisis matriks asal tujuan fungsi gravitasi pada Kota Jakarta Timur, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Karawang sebagai wilayah transit/stasiun Kereta Cepat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi jangkauan pelayanan stasiun Kereta Cepat Kab. Karawang sesuai dengan konsep *Transit Oriented Development* (TOD) dalam (*TOD Standard*, 2017) yaitu 0,5 - 1 Km untuk area inti TOD dan 5 Km untuk jangkauan di luar TOD menggunakan metode analisis *service area* dengan pertimbangan kondisi jaringan jalan pada GIS. Pada saat yang sama, penelitian ini juga akan menganalisis kecamatan asal dari potensi kunjungan masyarakat Kab. Karawang ke Stasiun Kereta Cepat Karawang menggunakan metode analisis *market share area* dengan pertimbangan kondisi jaringan jalan pada GIS.

2. Metodologi

2.1. Analisis Matriks Asal Tujuan (MAT) Model *Gravity* untuk Estimasi Pengguna Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Matriks Asal Tujuan (MAT) merupakan matriks berdimensi dua yang merepresentasikan besarnya pergerakan antar lokasi (zona) di dalam daerah tertentu. Terdapat 2 informasi dalam tabel MAT, yaitu baris sebagai informasi zona asal dan kolom sebagai zona tujuan. Zona asal dapat juga dimaknakan sebagai data bangkitan atau jumlah pergerakan yang dibangkitkan pada zonal asal. Sedangkan, zona tujuan dapat dimaknakan sebagai data tarikan yaitu jumlah pergerakan yang tertarik ke lokasi tujuan.

Dalam hal ini, digunakan model MAT Gravity (GR) sebagai metode umum untuk memperoleh MAT dengan anggapan bahwa ciri bangkitan dan tarikan pergerakan erat kaitannya dengan beberapa parameter zona asal, seperti populasi, nilai sel MAT, dan aksesibilitas sebagai fungsi jarak, waktu, atau biaya (Astridayanti & Legowo, 2021). Adapun, syarat yang harus dipenuhi pada matriks asal tujuan berupa :

- Total sel matriks untuk setiap baris (i) harus sama dengan besarnya jumlah pergerakan pada zona i (O_i atau bangkitan)
- Total sel matriks untuk setiap kolom (d) harus sama dengan besarnya jumlah pergerakan yang menuju ke zona tujuan d (D_d atau tarikan)
- Total matriks harus memiliki nilai jumlah bangkitan (O_i) dan tarikan (D_d) yang sama

Ilustrasi lebih jelasnya adalah sebagai berikut,

Tabel 1. Tabel Matriks Asal Tujuan (MAT)

Zona	1	2	...(N)	O_i
1	T_{11}	T_{12}	...	O_1
2	T_{21}	T_{22}	...	O_2
... (N)	...	...	...	O_N
D_d	D_1	D_2	D_N	T

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

Keterangan :

- T_{id} = pergerakan dari zona asal i ke zona tujuan d.
 O_i = jumlah pergerakan yang berasal dari zona asal i (Bangkitan).
 D_d = jumlah pergerakan yang menuju zona tujuan d (Tarikan).
T = total matriks.

Dikarenakan belum terdapatnya data Matriks Asal Tujuan (MAT) untuk topik penelitian ini, sehingga berikut adalah tahapan yang akan ditempuh untuk mengestimasi tabel MAT,

- 1) Uraian data variabel penelitian berdasarkan variabel dependen dan independen untuk dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan *software* SPSS.

Tabel 2. Variabel Penelitian Analisis Matriks Asal Tujuan (MAT)

Variabel Dependen	Sumber
• Bangkitan & tarikan perjalanan orang tahun 2023 sesuai wilayah operasional stasiun kereta cepat	Portal SDTN Sistem <i>Database</i> Transportasi Nasional
Variabel Independen	Sumber
• PDRB ADHB tahun 2023 setiap wilayah operasional stasiun kereta cepat • PDRB ADHB per kapita tahun 2023 setiap wilayah operasional stasiun kereta cepat • Jumlah penduduk tahun 2023 setiap wilayah operasional stasiun kereta cepat • PDRB ADHK tahun 2023 setiap wilayah operasional stasiun kereta cepat • PDRB ADHK per kapita tahun 2023 setiap wilayah operasional stasiun kereta cepat	Badan Pusat Statistik

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

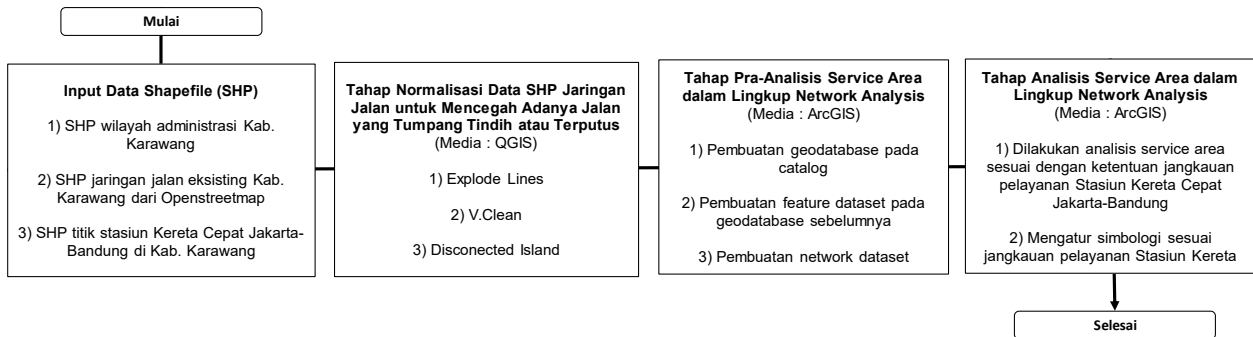
- 2) Melakukan uji normalitas berdasarkan *Shapiro Wilk* sebagaimana jumlah sampel penelitian yang berada di bawah 50 dan data terdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.
- 3) Melakukan analisis regresi linear berdasarkan prosedur *forward* atau secara otomatis akan memilih *variable predictor* dengan korelasi tertinggi.

- 4) Melakukan analisis proyeksi pada data variabel *independent* yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.
- 5) Memasukkan data variabel *independent* hasil proyeksi ke dalam rumus persamaan regresi linear berganda untuk mendapatkan data bangkitan dan tarikan pada tahun rencana 2028.
- 6) Menyusun tabel MAT kab/kota dalam Kws. Metropolitan Jabodetabek untuk tahun rencana 2028 menggunakan metode model MAT *Gravity*.
- 7) Menghitung *demand* pengguna kereta cepat berdasarkan modal *share* 11%, dengan rumus perhitungan [modal *share* kereta cepat (%) x pergerakan orang dalam tabel MAT].

2.2. Analisis Service Area dalam GIS Untuk Mengetahui Cakupan Pelayanan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Analisis *service area* digunakan untuk menentukan cakupan wilayah yang dapat dijangkau dalam batasan tertentu, seperti waktu tempuh atau jarak. Analisis ini sering digunakan dalam perencanaan transportasi, respons darurat, dan aksesibilitas fasilitas publik. Adapun, tahapannya adalah berikut

Analisis Service Area



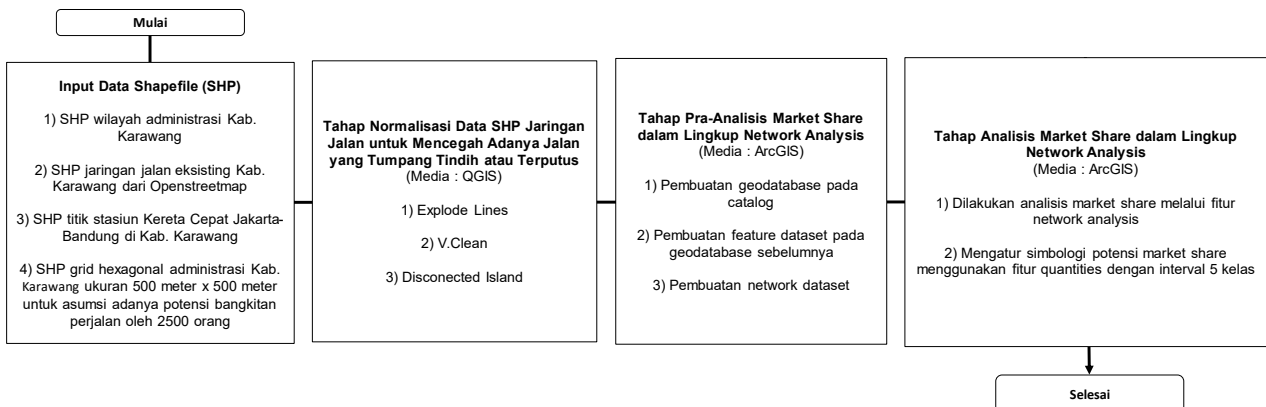
Gambar 1. Tahapan Analisis Service Area

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

2.3. Analisis Market Share dalam GIS Untuk Mengetahui Wilayah Asal Potensi Kunjungan Ke Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Analisis *market share* digunakan untuk mengukur permintaan potensial terhadap suatu produk atau layanan dalam suatu wilayah geografis tertentu. Alat ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait lokasi bisnis dan strategi pemasaran. Adapun, tahapannya adalah berikut

Analisis Market Share



Gambar 2. Tahapan Analisis Market Share

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap 2 variabel dependen dan 5 variabel independen, diketahui bahwa semuanya terdistribusi normal dengan nilai signifikansi > 0.05 /

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PDRB_ADHB	.241	4	.	.963	4	.800
PDRB_ADHK	.343	4	.	.844	4	.207
PENDUDUK	.274	4	.	.870	4	.298
PDRB_ADHB_KPT	.205	4	.	.985	4	.929
PDRB_ADHK_KPT	.286	4	.	.928	4	.585
BANGKITAN	.356	4	.	.796	4	.095
TARIKAN	.359	4	.	.790	4	.086

a. Lilliefors Significance Correction

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas
Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

3.1.2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.962 ^a	.926	.889	82089934.84	1.762

a. Predictors: (Constant), PDRB_ADHK
b. Dependent Variable: BANGKITAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-41279392.4	71951387.00		-.574	.624		
	PDRB_ADHK	1.081E-6	.000	.962	5.003	.038	1.000	1.000

a. Dependent Variable: BANGKITAN

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	PDRB_ADHB	-.875 ^b	-.959	.513	-.692	.046	21.592	.046
	PENDUDUK	.243 ^b	1.938	.303	.889	.990	1.010	.990
	PDRB_ADHB_KPT	-.451 ^b	-1.191	.445	-.766	.214	4.679	.214
	PDRB_ADHK_KPT	-1.530 ^b	-1.443	.386	-.822	.021	46.849	.021

a. Dependent Variable: BANGKITAN
b. Predictors in the Model: (Constant), PDRB_ADHK

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.964 ^a	.929	.893	80910873.87	1.756

a. Predictors: (Constant), PDRB_ADHK
b. Dependent Variable: TARIKAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-41764162.3	70917946.40		-.589	.616		
	PDRB_ADHK	1.086E-6	.000	.964	5.101	.036	1.000	1.000

a. Dependent Variable: TARIKAN

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	PDRB_ADHB	-.875 ^b	-.994	.502	-.705	.046	21.592	.046
	PENDUDUK	.241 ^b	2.025	.292	.897	.990	1.010	.990
	PDRB_ADHB_KPT	-.449 ^b	-1.235	.433	-.777	.214	4.679	.214
	PDRB_ADHK_KPT	-1.521 ^b	-1.499	.375	-.832	.021	46.849	.021

a. Dependent Variable: TARIKAN

b. Predictors in the Model: (Constant), PDRB_ADHK

Gambar 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda terhadap variabel dependen bangkitan dan tarikannya, diketahui bahwa hanya terdapat 1 variabel *independent* yang terbukti berpengaruh signifikan yaitu PDRB ADHK. Dari hasil tersebut, maka didapatkan formulasi regresi linear berganda yang akan digunakan untuk memproyeksi besaran bangkitan dan tarikan perjalanan untuk tahun rencana 2028.

Persamaan regresi linear berganda (bangkitan perjalanan orang)

$$[-41279392.4 + 0.000001086 * (\text{PDRB ADHK})]$$

Persamaan regresi linear berganda (tarikan perjalanan orang)

$$[-41764162.3 + 0.000001086 * (\text{PDRB ADHK})]$$

3.1.3. Hasil Proyeksi Bangkitan dan Tarikan untuk Tahun Rencana 2028

Berdasarkan hasil proyeksi bangkitan dan tarikan perjalanan untuk tahun rencana 2028 menggunakan rumus regresi tahapan sebelumnya, didapatkan hasil sebagai berikut,

Tabel 3. Hasil Proyeksi Bangkitan dan Tarikan untuk Tahun Rencana 2028

Nomor Zona	Lokasi	2028	
	Keterangan	Bangkitan (orang)	Tarikan (orang)
1	Kab. Bandung	73,103,232	72,618,462
2	Kab. Bandung Barat	231,975,366	231,490,597
3	Kab. Karawang	194,168,231	193,683,461
4	Kota Jakarta Timur	380,037,457	379,552,687

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

3.1.4. Hasil Perhitungan Terhadap Fungsi Gravitasi MAT

Pada pelaksanaannya, digunakan beberapa tahapan perhitungan sebagaimana detail tahapan pembahasan berikut

- Penentuan Jarak Antar Pusat Zona

Merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan dalam perhitungan MAT Gravity parameter aksesibilitas jarak. Dalam hal ini, digunakan alat bantu *google maps* untuk mengetahui jarak antar pusat zona di setiap kab/kota.

Tabel 4. Jarak Antar Pusat Zona Setiap Wilayah Stasiun Kereta Cepat

Jarak Antar Pusat Zona (Km)				
Zona	1	2	3	4
1	0	26	83	118
2	26	0	59	92
3	83	59	0	42
4	118	92	42	0

Kodefikasi Zona Wilayah	
1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bandung Barat
3	Kabupaten Karawang
4	Kota Jakarta Timur

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

- Perhitungan MAT Fungsi Gravitasi

Merupakan tahapan inti untuk mendapatkan tabel Matriks Asal Tujuan (MAT) pada wilayah studi, meliputi perhitungan berdasarkan fungsi gravitasi itu sendiri serta tahapan iterasi berdasarkan formasi baris (bangkitan) dan formasi kolom (tarikan) untuk digunakan kembali pada tahapan kalibrasi guna mendapatkan tabel MAT yang ideal. Berikut adalah hasilnya

Tabel 5. Perhitungan MAT Fungsi Gravitasi

K	2.5
Sum Cid	840
N	16
Cid = Sum(Cid)/N	52.5
Beta (k/cid)	0.047619048

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

Keterangan :

- ✓ K = 2.5 (merupakan nilai fungsi gaya gravitasi)
- ✓ Sum Cid = 840 (merupakan hasil penjumlahan total tabel matriks jarak antar pusat zona)
- ✓ N = 16 (merupakan jumlah total data pada tabel matriks jarak antar pusat zona)
- ✓ Cid = 52.5 (merupakan hasil pembagian antara nilai Sum Cid terhadap N)
- ✓ Beta = 0.047 (merupakan hasil pembagian antara nilai K terhadap Cid)

Berikutnya dilakukan perhitungan kembali dengan menggunakan rumus $[Exp(-(Beta \times \text{nilai pada setiap zona dalam tabel matriks antar pusat zona}))]$, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut,

Tabel 6. Perhitungan MAT Fungsi Gravitasi

Zona	1	2	3	4	Oi
1	0.000	0.290	0.019	0.004	73,103,232
2	0.290	0.000	0.060	0.013	231,975,366
3	0.019	0.060	0.000	0.135	194,168,231
4	0.004	0.013	0.135	0.000	380,037,457
Dd	72,778,961	232,002,229	194,111,534	380,391,562	879,284,286

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

Setelahnya, dilakukan perhitungan iterasi berdasarkan formasi baris dan kolom yang mengacu pada nilai bangkitan dan tarikan hasil proyeksi. iterasi dianggap selesai apabila telah didapatkan pola iterasi yang serupa. Berikut adalah dokumentasinya.

Gambar 5. Proses Iterasi dalam Perhitungan MAT Fungsi Gravitasi
Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

- Kalibrasi Perhitungan MAT Fungsi Gravitasi

Pada tahapan ini, akan dilakukan kalibrasi berdasarkan hasil perhitungan ditahap sebelumnya untuk mendapatkan tabel Matriks Asal Tujuan (MAT) yang layak digunakan, yaitu menunjukkan nilai E_i (kalibrasi bangkitan) dan E_d (kalibrasi tarikan) sebesar 1 atau mendekati 1. Adapun, berikut adalah hasil yang didapatkan

Tabel 7. Tabel MAT Tahun Rencana 2028 Hasil Kalibrasi dalam Perhitungan MAT Fungsi Gravitasi

ZONA	1	2	3	4	oi	Oi	Ei	Ai
1	-	55,700,148.37	375,622.78	17,027,401.01	73,103,172.16	73,103,231.80	1.0000008	0.75
2	55,468,459.66	-	3,470,409.65	173,036,835.04	231,975,704.34	231,975,366.40	0.9999985	0.70
3	373,744.58	3,467,480.01	-	190,327,325.96	194,168,550.54	194,168,231.20	0.9999984	0.08
4	16,936,756.61	172,834,601.04	190,265,501.71	-	380,036,859.36	380,037,457.00	1.0000016	10.41
dd	72,778,960.84	232,002,229.42	194,111,534.13	380,391,562.00				
Dd	72,778,960.84	232,002,229.42	194,111,534.13	380,391,562.00				
Ed	1.00	1.00	1.00	1.00				
Bd	0.00	0.00	0.00	0.00				

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

Berdasarkan tabel hasil perhitungan kalibrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tabel MAT sudah sesuai atau dapat digunakan untuk kebutuhan analisis. Adapun, berikut adalah penjelasan singkat terkait isian tabel di atas, dimana :

- ✓ oi = hasil penjumlahan baris (nilai bangkitan)
- ✓ Oi = nilai bangkitan acuan
- ✓ Ei = hasil pembagian antara Oi terhadap oi, apabila menunjukkan nilai 1 atau mendekati 1 maka kalibrasi nilai bangkitan telah sesuai
- ✓ Ai = nilai akhir pada iterasi formasi baris
- ✓ dd = hasil penjumlahan kolom (nilai tarikan)
- ✓ Dd = nilai tarikan acuan
- ✓ Ed = hasil pembagian antara Dd terhadap dd, apabila menunjukkan nilai 1 atau mendekati 1 maka kalibrasi nilai tarikan telah sesuai
- ✓ Bd = nilai akhir pada iterasi formasi kolom

Adapun, nilai pergerakan setiap sel zona dalam matriks asal tujuan di atas didapatkan dari rumus perhitungan sederhana berikut $[A_i \times O_i \times B_d \times D_d \times \text{Exp}(\text{Beta} \times \text{nilai pada setiap zona dalam tabel matriks antar pusat zona})]$.

- Perhitungan *Demand* Pengguna Moda Kereta Cepat

Berdasarkan tabel Matriks Asal Tujuan (MAT) tahun rencana 2028, berikut ini adalah perhitungan permintaan pengguna kereta cepat pada tahun tersebut, dengan ketentuan modal *share* kereta cepat sebesar 11%. Dalam hal ini disertakan tabel MAT berdasarkan tahunan dan harian, guna menyesuaikan dengan target pengguna kereta cepat sebesar 30.000 orang/hari.

Tabel 8. Tabel MAT Tahun Rencana 2028 Pengguna Kereta Cepat Jakarta - Bandung

MAT Pengguna Kereta Cepat Tahun 2028 (Tahunan)					
ZONA	1	2	3	4	oi
1	-	6,127,016	41,319	1,873,014	8,041,349
2	6,101,531	-	381,745	19,034,052	25,517,327

MAT Pengguna Kereta Cepat Tahun 2028 (Tahunan)					
ZONA	1	2	3	4	oi
3	41,112	381,423	-	20,936,006	21,358,541
4	1,863,043	19,011,806	20,929,205	-	41,804,055
dd	8,005,686	25,520,245	21,352,269	41,843,072	96,721,272

MAT Pengguna Kereta Cepat Tahun 2028 (Harian)					
ZONA	1	2	3	4	oi
1	-	17,019	115	5,203	22,337
2	16,949	-	1,060	52,872	70,881
3	114	1,060	-	58,156	59,329
4	5,175	52,811	58,137	-	116,122
dd	22,238	70,890	59,312	116,231	268,670

Kodefikasi Zona Wilayah	
1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bandung Barat
3	Kabupaten Karawang
4	Kota Jakarta Timur

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

Tabel 9. Peringkat Bangkitan dan Tarikan Perjalanan Pengguna Kereta Cepat Jakarta – Bandung Tahun Rencana 2028

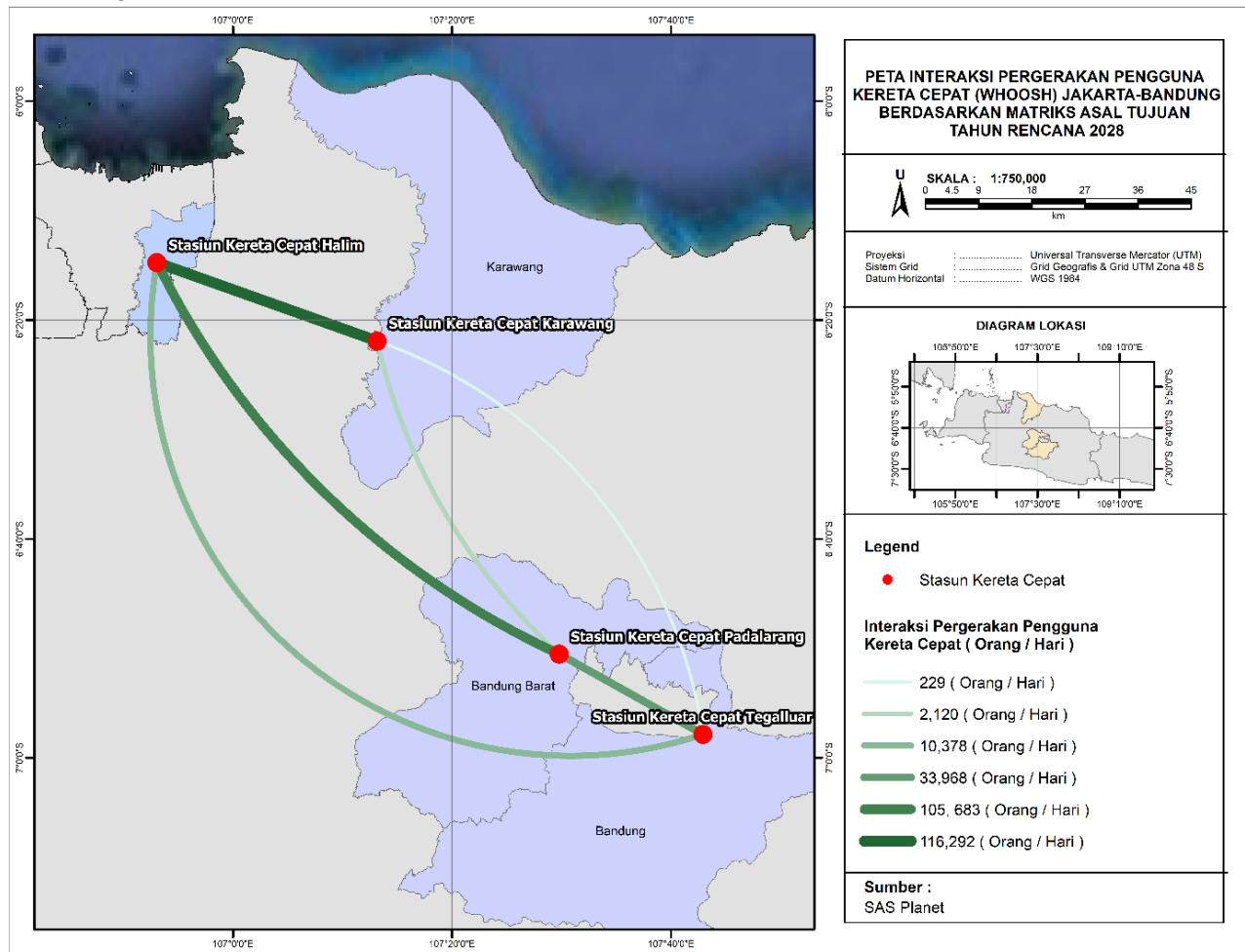
No.	Zona Stasiun Kereta Cepat	Bangkitan Perjalanan (Orang/Tahun)	Peringkat	Bangkitan Perjalanan (Orang/Hari)	Peringkat
1	Kabupaten Bandung	8,041,349	4	22,337	4
2	Kabupaten Bandung Barat	25,517,327	2	70,881	2
3	Kabupaten Karawang	21,358,541	3	59,329	3
4	Kota Jakarta Timur	41,804,055	1	116,122	1
Total Perjalanan		96,721,272		268,670	

No.	Zona Stasiun Kereta Cepat	Tarikan Perjalanan (Orang/Tahun)	Peringkat	Tarikan Perjalanan (Orang/Hari)	Peringkat
1	Kabupaten Bandung	8,005,686	4	22,238	4
2	Kabupaten Bandung Barat	25,520,245	2	70,890	2
3	Kabupaten Karawang	21,352,269	3	59,312	3
4	Kota Jakarta Timur	41,843,072	1	116,231	1
Total Perjalanan		96,721,272		268,670	

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

- Ilustrasi Peta Interaksi Pergerakan Pengguna Moda Kereta Cepat

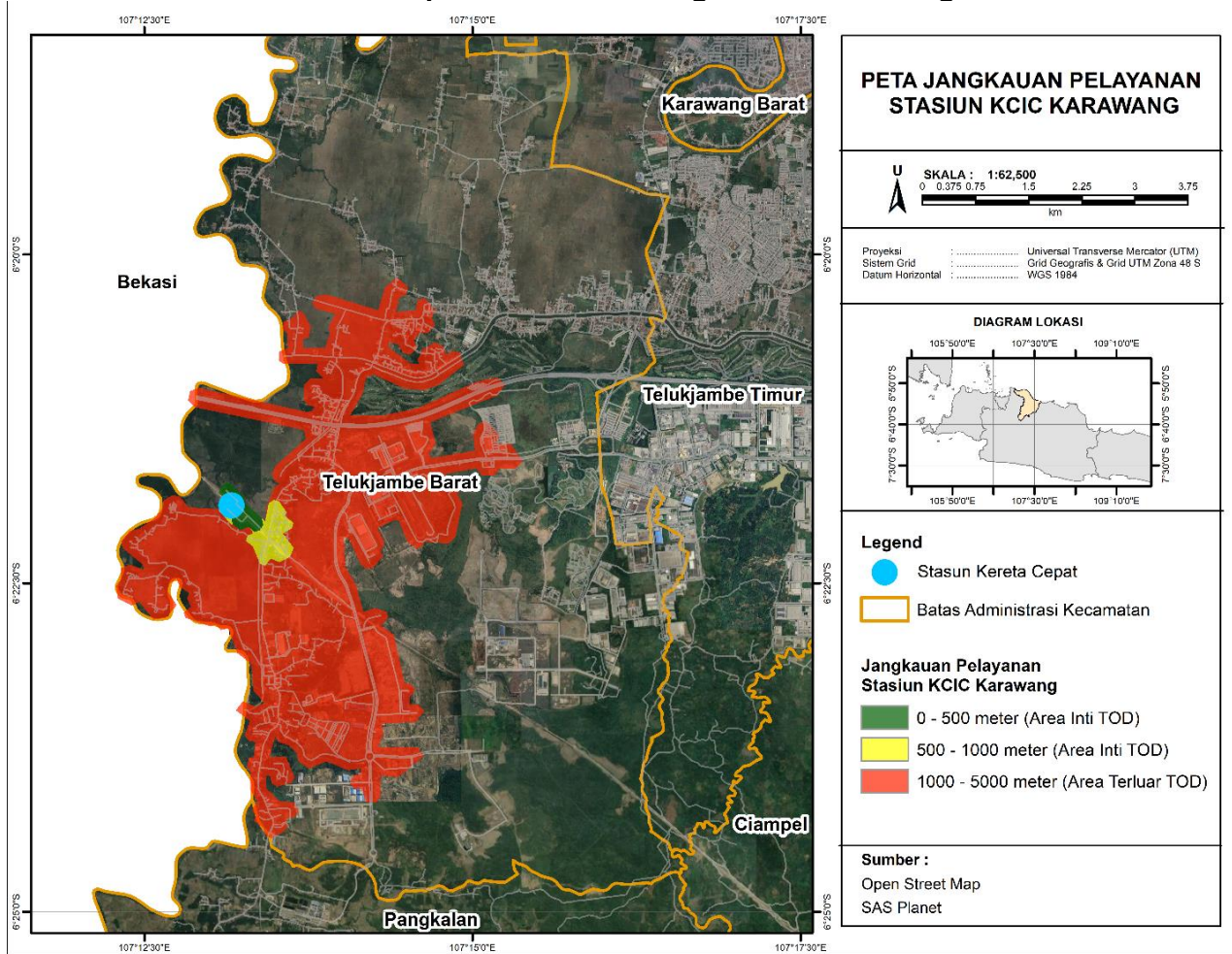
Berikut ini merupakan peta interaksi pengguna kereta cepat berdasarkan hasil total pergerakan zona asal dan tujuannya. Sebagai contoh, pergerakan harian dari zona asal 1 ke zona tujuan 3 sebesar 115 orang/hari, dan sebaliknya yaitu 114 orang/hari, sehingga total pergerakannya adalah 229 orang/hari.



Gambar 6. Peta interaksi Pergerakan Pengguna Kereta Cepat Jakarta – Bandung Tahun Rencana 2028

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

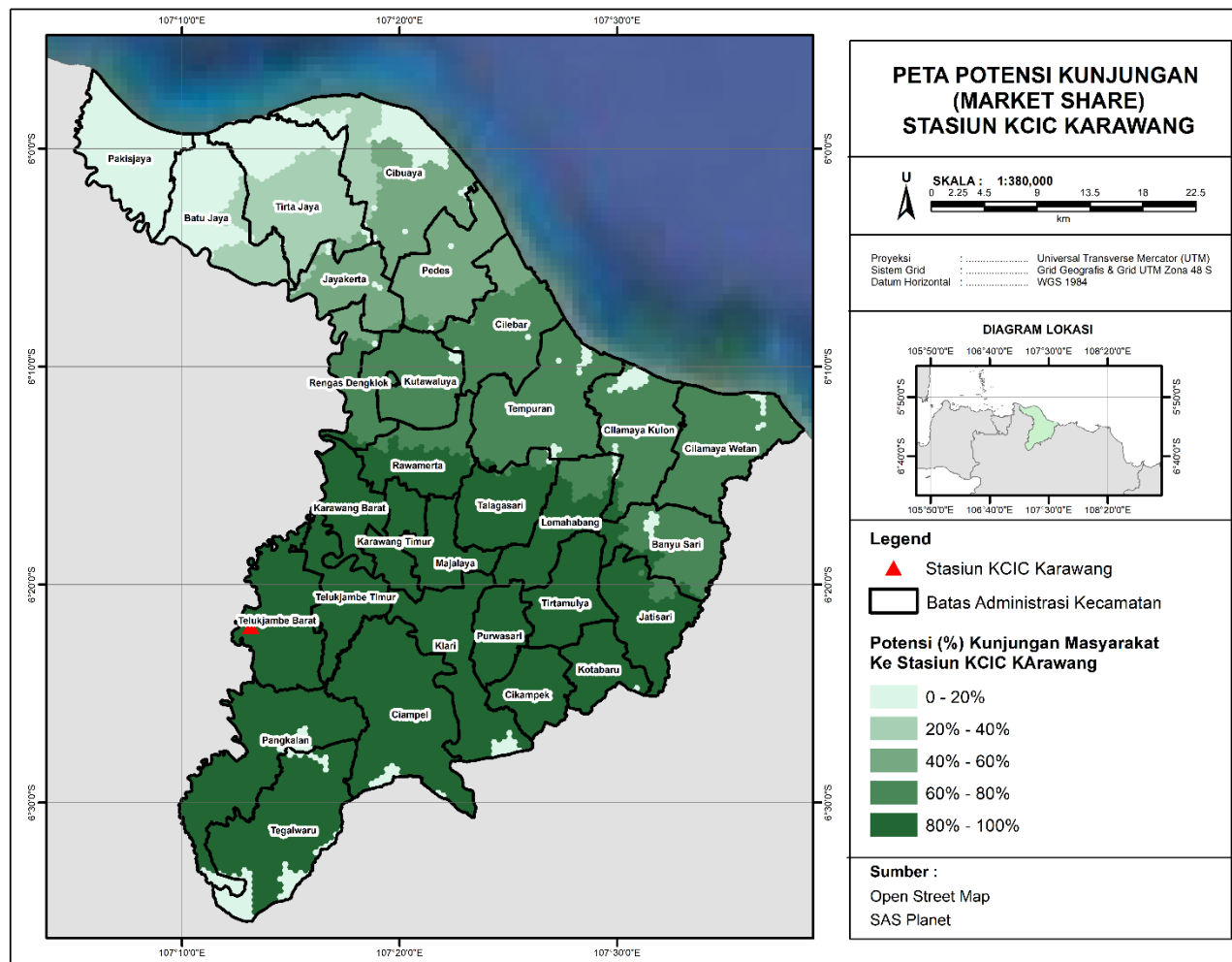
Service Area Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kab. Karawang



Gambar 7. Peta Jangkauan Pelayanan Stasiun Kereta Cepat di Kab. Karawang

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

Market Share Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kab. Karawang



Gambar 8. Peta *Market Share* / Wilayah Asal Potensi Kunjungan ke Stasiun Kereta Cepat di Kab. Karawang

Sumber: Muhammad Ihsan Akbar, 2025

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa total pengguna moda Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada tahun rencana 2028 mencapai 96,721,272 orang/tahun atau sekitar 268,670 orang/hari sebagaimana perkiraan modal *choice* Kereta Cepat yang menyerap 11% dari total pergerakan kendaraan pribadi di Jakarta - Bandung. Banyaknya pelaku perjalanan pada tahun tersebut telah melampaui target penumpang / pelaku perjalanan moda Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditetapkan, yaitu sebesar 10,950,000 orang/ tahun atau 30,000 orang/hari. Estimasi pengguna Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam tabel Matriks Asal Tujuan (MAT) tahun rencana 2028 dipengaruhi kuat oleh faktor perekonomian regional, yaitu kondisi PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) serta parameter aksesibilitas jarak di setiap wilayah stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Adapun, besarnya bangkitan dan tarikan perjalanan moda tersebut paling banyak berasal dari Kota Jakarta Timur dan terendah berasal dari Kab. Bandung. Sedangkan, interaksi perjalanan (ulang-alik) antar setiap zona paling banyak dimulai dari Kota Jakarta Timur – Kab. Karawang, Kota Jakarta Timur – Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung – Kab. Bandung Barat, Kab. Bandung – Kota Jakarta Timur, Kab. Bandung Barat – Kab. Karawang, Kab. Bandung – Kab. Karawang. Dengan demikian, dapat diketahui juga bahwa wilayah yang paling banyak melakukan

tujuan perjalanan ke Kab. Karawang dimulai dari Kota Jakarta Timur, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Bandung.

Pada konteks cakupan pelayanan Stasiun Kereta Cepat Jakarta – Bandung di Kab. Karawang terbagi ke dalam dua zona yaitu, area inti TOD (*Transit Oriented Development*) sejauh 0,5 Km sampai dengan 1 Km sebagai jarak ideal berjalan kaki terjauh, serta area terluar TOD (*Transit Oriented Development*) sejauh 5 Km. Hasil pada peta sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan jalan eksisting yang diakses dari sumber *Openstreetmap*.

Adapun, cakupan pangsa pasar atau potensi kunjungan ke Stasiun Kereta Cepat Jakarta – Bandung di Kab. Karawang paling banyak berasal dari wilayah tengah yang semakin menurun ke wilayah Utara pada Kecamatan di Kab. Karawang. Besarnya potensi pasar tersebut didasarkan oleh faktor aksesibilitas jaringan jalan eksisting yang diakses dari sumber *Openstreetmap*.

4. Kesimpulan

Secara garis besar, total pengguna moda Kereta Cepat Jakarta – Bandung pada tahun rencana 2028 mencapai 96,721,272 orang/tahun atau 268,670 orang/hari, dimana angka tersebut telah melampaui target pengguna yang ditetapkan sebesar 10,950,000 orang/ tahun atau 30,000 orang/hari. Besarnya angka tersebut dipengaruhi kuat oleh faktor perekonomian wilayah berupa PDRB ADHK dan jarak antar setiap wilayahnya. Besarnya bangkitan dan tarikan perjalanan moda tersebut paling banyak berasal dari Kota Jakarta Timur dan terendahnya berasal dari Kab. Bandung. Interaksi perjalanan (ulang-alik) pengguna moda tersebut paling banyak berlangsung pada wilayah Kota Jakarta Timur – Kab. Karawang dan terendahnya pada Kab. Bandung – Kab. Karawang. Sedangkan, wilayah yang paling banyak melakukan perjalanan ke Kab. Karawang berasal dari Kota Jakarta Timur, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Bandung. Dalam konteks lain, cakupan pelayanan Stasiun Kereta Cepat di Kab. Karawang berada dalam dua zona, yaitu area inti TOD sejauh 0,5 Km – 1 Km dan terluar TOD sejauh 5 Km dalam wilayah administrasi Kecamatan Telukjambe Barat. Sedangkan potensi kunjungan / target pasar Stasiun Kereta Cepat di Kab. Karawang paling banyak berasal dari wilayah tengah kecamatan di Kab. Karawang.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan variabel independen, seperti tidak disertakannya variabel *independent* terkait minat responden terhadap moda, waktu dan biaya perjalanan, frekuensi dan tujuan perjalanan, serta karakteristik sosiodemografis responden. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel-variabel tersebut agar hasil lebih komprehensif. Selain itu, melalui hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi keseimbangan *supply* dan *demand*, melalui perbandingan antara kapasitas angkut Kereta Cepat dengan proyeksi jumlah pengguna pada tahun rencana 2028.

Daftar Pustaka

- Arief, A. M. (2023). KCIC Targetkan Penumpang Kereta Cepat *Whoosh* Capai 30 Ribu/Hari. *Katadata*. <https://katadata.co.id/berita/industri/652f400648028/kcic-targetkan-penumpang-kereta-cepat-whoosh-capai-30-ribuhari>
- Astridayanti, N., & Legowo, S. J. (2021). *ESTIMASI PARAMETER MODEL GRAVITY DENGAN METODE INFERENSI-BAYES DAN FUNGSI HAMBATAN PANGKAT (STUDI KASUS KABUPATEN SUKOHARJO)*. Jurnal Matriks Teknik Sipil.
- Bintaro, R. (1984). *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Firman, T. (1994). *Urbanisasi dan Perkembangan Wilayah di Indonesia*. LP3ES.
- Hidayati, N. (2019). *Dinamika Migrasi Penduduk dan Dampaknya terhadap Pembangunan Wilayah*. Pustaka Geografi.
- Mantra, I. B. (2012). *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Transit Oriented Development Kereta Cepat dan Sekitarnya Tahun 2023-2043. (2023).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.* (2016).
- Rusli, M. (2014). *Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Statistik Komuter Jabodetabek Tahun 2023* (Vol. 3). (2024). Badan Pusat Statistik.
- TOD Standard.* (2017). ITDP (Institute For Transportation And Development Policy).
- Todaro, M. P. (1981). *Economic Development in the Third World (2nd ed.)*. Longman.

Memperkuat Solidaritas Sosial Melalui Khazanah Legenda Syekh Quro Sebagai Kearifan Lokal Di Kabupaten Karawang

*Strengthening Social Solidarity Through The Treasures Of The Legend Of Syekh Quro As
Local Wisdom In Karawang Regency*

Iwan Ridwan

LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Karawang, Karawang

iwanridwan.ri95@gmail.com

ABSTRAK

Legenda "Syekh Quro" sebagai legenda keagamaan menyimpan khazanah kearifan lokal yang berharga untuk pembangunan mental masyarakat Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai solidaritas sosial dalam legenda "Syekh Quro" berdasarkan telaah struktur, fungsi, dan makna. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan tradisi lisan sebagai prinsip penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara dengan *peneliti* sebagai instrumen kunci (*human instrument*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur legenda "Syekh Quro" menggambarkan alur cerita yang menopang misi penyebaran agama Islam. Struktur tersebut berkaitan dengan fungsi legenda tersebut sebagai sistem proyeksi, pengesah kebudayaan, alat pendidikan, alat kritik sosial, dan alat pemaksa berlakunya norma-norma sosial dalam masyarakat. Hal ini terungkap dalam wujud strategi pengislaman yang meliputi strategi pernikahan, pendidikan, perniagaan, kekuasaan, dan kebudayaan. Strategi tersebut berpotensi dijadikan upaya pemerkuat solidaritas sosial dalam masyarakat di tengah keretakan solidaritas kebangsaan sehingga urgensi penelitian ini akan berdampak pada peningkatan iklim masyarakat Karawang yang madani kini dan nanti.

Kata kunci: *solidaritas sosial, kearifan lokal, legenda Syekh Quro*

ABSTRACT

The legend of "Syekh Quro" as a religious legend contains a treasure trove of local wisdom that is valuable for the mental development of the Karawang society. This study aims to reveal value of reinforcing social solidarity in the legend of "Syekh Quro" based on a study of structure, function, and meaning. This study uses ethnographic methods with oral tradition as the research principle. The techniques used in this study are observation and interview techniques with researchers as key instruments (human instruments). The study results show that the structure of the legend "Syekh Quro" describes the storyline that support the mission of spreading Islam. This structure is related to the function of the legend as a projection system, cultural endorser, educational tool, tool for social criticism, and tool for enforcing in society. This is revealed in the form of an Islamization strategy that includes strategies of marriage, education, commerce, power, and culture. This strategy has the potential to be used as an effort to strengthen social solidarity in society in the midst of a rift in

national solidarity so that the urgency of this research will have an impact on improving the civil climate of Karawang society now and in the future.

Keywords: *social solidarity, local wisdom, The legend of “Syekh Quro”*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di tengah pesatnya industrialisasi, solidaritas sosial menjadi isu pembangunan yang menarik dalam kajian etnografi. Solidaritas sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai gambaran pembangunan manusia di Kabupaten Karawang. Laporan BPS Karawang (BPS Karawang, 2025) berjudul *Kabupaten Karawang dalam Angka 2025* menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Karawang terus mengalami pertumbuhan dan telah mencapai 73,82 pada 2024. IPM Karawang mengalami pertumbuhan sebesar 1,47 sejak IPM 2023 yang sebelumnya mencapai 72,35. Hal ini menandakan sebuah tren positif tentang kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karawang.

Adanya gerakan solidaritas sosial di Karawang dalam berbagai aksi tanggap kemanusiaan dan kebencanaan menunjukkan adanya kepedulian antarmasyarakat. Solidaritas sosial tersebut menarik untuk direfleksikan berdasarkan salah satu kearifan lokal yang masih melekat di Kabupaten Karawang, yakni legenda “Syekh Quro”. Bagi masyarakat Karawang, nama “Syekh Quro” sendiri merupakan sosok penyebar agama Islam yang terukir sebagai nama masjid Agung dan nama jalan ikonik (Jalan Syekh Quro).

Adanya cerita lisan penyebaran agama Islam di Karawang tidak terlepas dari Islamisasi yang terjadi di Nusantara, khususnya di Jawa Barat. Islamisasi merupakan awal dari proses perubahan yang penting. Agama Islam datang dengan menempuh jalan perdamaian (Ricklefs, 2008). Cerita-cerita orang suci yang menyebarkan agama Islam menjadi bagian legenda keagamaan. Legenda keagamaan turut memuat unsur-unsur penyebaran agama Islam yang diperankan oleh tokoh ulama dan dipersepsi sebagai orang-orang saleh (Danandjaja, 1984).

Legenda “Syekh Quro” merupakan legenda keagamaan yang mengisahkan perjuangan seorang ulama Campa-Kamboja dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Karawang. Sebagai mutiara peradaban, legenda ini menjadi memori kolektif masyarakat Karawang tentang kiprah para ulama penyebar agama Islam sehingga legenda “Syekh Quro” amat penting untuk dijaga eksistensinya.

Kajian yang mengupas kontribusi tokoh penyebaran agama Islam di Nusantara sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada 2011, Fatimah (Fatimah, 2011) menemukan bahwa ulama perempuan turut memiliki andil dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari sosok Nyi Mas Rara Santang sebagai ibu kesuksesan di balik kegemilangan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sementara itu, penelitian Kuswandi (Kuswandi, 2013) menekankan bagaimana pentingnya peran Syekh H. Zainudin sebelum masa Sunan Gunung Jati. Kuswandi mengungkapkan bahwa orang-orang saleh selain Wali Sanga (Anita, 2014) juga memiliki sumbangsih yang sama terhadap Islamisasi di Indonesia.

Selanjutnya, pada 2015, Hafid (Hafid, 2015) meneliti penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Nurun Baharuddin di Bantaeng-Sulawesi Selatan. Ia menyebarkan agama Islam dengan cara memediasi penguasa atau raja yang berkuasa. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Saefudin tentang legenda Banjar di Banjar-Kalimantan Selatan mengkaji sosok para Datu penyebar agama Islam melalui dakwah secara lisan, perbuatan, dan karya-karya (Saefudin, 2015).

Adapun kajian yang spesifik mengungkap peran Syekh Quro tampak pada beberapa penelitian berikut. Dalam (Apandi, 2011) membahas peranan Syekh Quro dalam penyebaran agama Islam di

Jawa Barat abad XV M melalui perspektif sejarah. Dalam penelitiannya, Apandi melihat kontribusi Syekh Quro dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, tetapi belum menggali solidaritas sosial melalui strategi pengislaman yang dilakukan Syekh Quro. Sementara itu, (Zailani, 2011) menemukan bahwa Syekh Quro menjadi sosok penyebar agama Islam yang penting. Akan tetapi, penelitian itu belum mengungkap secara mendalam strategi pengislaman yang dilakukan oleh Syekh Quro. Selanjutnya, (Syatibi, 2012) meneliti peran Syekh Quro sebagai tokoh penting dalam Islamisasi di Karawang dan Jawa Barat. Dalam penelitian tersebut ditemukan persoalan bahwa peran Syekh Quro belum terlacak dengan baik karena masalah sumber yang masih terbatas. Artinya, penelitian Syatibi membuka peluang agar peneliti menggali lebih dalam kiprah Syekh Quro dari perspektif tradisi lisan.

Menurut Saidi dalam (Zailani, 2011), Syekh Quro turut mengislamkan orang-orang Betawi yang berada di Karawang dalam fase awal penyebaran Islam. Karakteristik orang Campa yang terkenal plural turut memudahkan penyebaran agama Islam kepada masyarakat Karawang yang majemuk. Hal ini tidak terlepas dari corak kebudayaan Karawang yang mengalami akulturasi budaya dengan tradisi Hindu-Buddha (Saddhono, 2016). Oleh sebab itu, ulama ini menjadi obor penyebaran agama Islam di Jawa Barat sebelum masa kejayaan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (Lubis, 2011).

Strategi pengislaman yang mengutamakan kemaslahatan dilakukan Syekh Quro dan para ulama lainnya sebagai upaya membangun solidaritas sosial dengan corak masyarakat Pajajaran yang berprofesi sebagai pedagang di pelabuhan yang masih menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Aktivitas perniagaan tersebut menjadi penunjang Islamisasi yang dilakukan karena memaksimalkan kemegahan jalur perdagangan Nusantara pada abad ke-13 (Syafrizal, 2015).

Hal ini berpotensi mencerminkan nilai kearifan lokal yang memperkuat solidaritas kebangsaan. Gagasan tersebut berhubungan dengan dimensi sastra dan budaya sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga fenomena itu amat relevan jika dikaji dengan pendekatan tradisi lisan. Strategi tersebut diungkap melalui analisis struktur dan semantis (alur, tokoh, dan latar), fungsi, dan maknanya dalam legenda "Syekh Quro". Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) naratologi Todorov (Todorov, 1985) untuk mengungkap struktur legenda "Syekh Quro". Melalui analisis tersebut, legenda "Syekh Quro" akan diurai komponen alur cerita utamanya, tokoh, dan latar yang turut menunjang terungkapnya solidaritas sosial; (2) fungsi tradisi lisan menurut Hutomo (Hutomo, 1991) dan (3) teori sosiologi sastra Durkheim (Durkheim, 1984) untuk mengungkap solidaritas sosial dalam legenda "Syekh Quro" berdasarkan kerangka solidaritas sosial.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai solidaritas sosial yang terkandung dalam legenda *Syekh Quro* sebagai legenda keagamaan di Kabupaten Karawang. Dengan upaya tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi penguat khazanah kearifan lokal dalam membangun mental manusia Indonesia, khususnya manusia Kabupaten Karawang dalam upaya menguatkan solidaritas sosial.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan tradisi lisan sebagai prinsip penelitian. Dalam penelitian etnografi, peneliti merupakan instrumen kunci (Sudikan, 2015). Adapun sumber data penelitian ini berupa cerita yang diperoleh dari penutur yang menjadi *pakuncen* makam keramat Syekh Quro di Desa Pulokalapa, Kecamatan Lemahabang. Informan dipersepsi sebagai wakil kaumnya sehingga berkompeten menjadi penutur (Amir, 2013).

Dalam mengungkap solidaritas sosial dalam legenda Syekh Quro, peneliti dipandu dengan langkah-langkah berikut (Sudikan, 2015). Pertama, peneliti menganalisis data cerita yang sudah

ditranskripsi dan ditransliterasi untuk mengungkap struktur legenda “Syekh Quro” sehingga alur cerita, tokoh, dan latar dapat terungkap. Kedua, peneliti mengolah analisis struktur tersebut untuk mengungkap fungsi legenda “Syekh Quro”. Ketiga, peneliti menginterpretasikan data untuk mengungkap solidaritas sosial dalam legenda “Syekh Quro” berdasarkan kerangka solidaritas sosial Durkheim (Durkheim, 1984). Durkheim menyatakan bahwa sastra bertalian dengan pembangunan solidaritas sosial yang menjadi kekuatan utama terbentuknya tatanan sosial. Jika dianalogikan dengan fungsi agama dalam masyarakat, sastra berfungsi memberikan pengalaman kepada anggota masyarakat akan adanya sebuah realitas yang melampaui batas-batas dunia pengalaman langsung individual (Bamualim, 2015). Dalam teori Durkheim, solidaritas sosial terbagi atas solidaritas sosial organik dan solidaritas sosial mekanik. Solidaritas organik berkaitan dengan konteks masyarakat tradisional yang menunjukkan adanya sosial kemasyarakatan yang homogen (sama), sedangkan solidaritas mekanik berkaitan konteks masyarakat modern yang menunjukkan sosial kemasyarakatan yang heterogen atau campuran.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Dari hasil analisis data diperoleh struktur (alur cerita, tokoh, dan latar), fungsi, dan makna legenda “Syekh Quro”. Berikut adalah pemaparan hasil penelitian tersebut.

A. Struktur Legenda Syekh Quro

Analisis struktur meliputi analisis sintaksis/naratologi Todorov, tokoh, dan latar. Dari hasil analisis sintaksis legenda “Syekh Quro” diperoleh alur cerita yang saling menunjang kisah penyebaran agama Islam oleh Syekh Quro di Karawang. Berikut adalah alur cerita legenda Syekh Quro dengan poin urutan ide alur cerita naratologi Todorov berikut.

1. Keinginan Syekh Quro untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat.
2. Tindakan Syekh Quro menyebarkan agama Islam di Jawa Barat.
3. Tersebarnya agama Islam pada masyarakat Jawa Barat.
4. Kemarahan Prabu Anggalarang atas tersebarnya agama Islam.
5. Perintah pengusiran dakwah Syekh Quro oleh Prabu Anggalarang kepada Raden Pamanah Rasa/Siliwangi.
6. Tindakan Siliwangi mencari keberadaan Syekh Quro.
7. Kedatangan Siliwangi di Pesantren Syekh Quro untuk membunuh Syekh Quro.
8. Tindakan Nyi Subang Larang mengaji Al-Qur'an.
9. Keterpukauan Siliwangi mendengar suara merdu Nyi Subang Larang ketika mengaji Al-Qur'an.
10. Tindakan Siliwangi mengurungkan niatnya untuk mengusir Syekh Quro.
11. Keinginan Siliwangi menikahi Nyi Subang Larang setelah ia diberi kekuasaan di Pajajaran sebagai pengganti ayahnya.
12. Tindakan Syekh Quro mengajukan syarat kepada Siliwangi untuk mengambil *bintang kretejejer 100* (tasbih).
13. Tindakan Siliwangi menyanggupi syarat Syekh Quro dengan angkuh.
14. Tindakan Siliwangi menemui Imam Mekah.
15. Pertemuan Siliwangi dengan Imam Mekah.
16. Permintaan Siliwangi kepada Imam Mekah untuk mendapatkan *bintang kretejejer 100* untuk mahar pernikahannya.
17. Pemberian syarat masuk Islam dari imam Mekah kepada Siliwangi berupa *bintang kretejejer 100* (tasbih).
18. Tindakan Siliwangi menganggap mudah mahar pernikahannya dengan Nyi Subang Larang.
19. Hilangnya kekuatan Siliwangi ketika hendak pulang dari Mekah.
20. Tindakan Siliwangi meminta nasihat dari imam Mekah.

21. Tindakan imam Mekah yang menasihati Siliwangi agar mempelajari Islam dengan baik.
22. Tindakan Siliwangi mempelajari agama Islam kepada para ulama Mekah.
23. Pulihnya kembali kekuatan Siliwangi setelah belajar agama Islam dengan baik.
24. Kepulangan Siliwangi ke pesantren Syekh Quro untuk menikahi Nyi Subang Larang.
25. Pernikahan Siliwangi dengan Nyi Subang Larang.
26. Kelahiran Walangsungsang, Kian Santang, dan Rara Santang.
27. Perintah Nyi Subang Larang kepada Walangsungsang dan Rara Santang untuk belajar Islam kepada Syekh Nur Jati.
28. Tindakan Walangsungsang dan Rara Santang belajar Islam ke Syekh Nur Jati di Cirebon.
29. Perintah Syekh Nur Jati agar Walangsungsang dan Rara Santang berziarah ke Mekah.
30. Tindakan Walangsungsang dan Rara Santang pergi ke Mekah untuk berziarah.
31. Pertemuan Sultan Mesir dengan Rara Santang.
32. Ketertarikan Sultan Mesir kepada Rara Santang.
33. Pernikahan Sultan Mesir dengan Rara Santang.
34. Kelahiran Syarif Hidayatullah/Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah.
35. Kesulitan Pangeran Cakrabuana/Walangsungsang dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon.
36. Keinginan Syarif Hidayatullah membantu penyebaran agama Islam di Cirebon.
37. Kepergian Syarif Hidayatullah dan Rara Santang dari Mesir ke Cirebon.
38. Kedatangan Syarif Hidayatullah dan Rara Santang di Cirebon.
39. Penyambutan Pangeran Cakrabuana atas kedatangan Syarif Hidayatullah dan Rara Santang.
40. Anggapan Pangeran Cakrabuana bahwa Syarif Hidayatullah dapat memimpin Cirebon.
41. Diberikannya tahta Cirebon dari Walangsungsang/Pangeran Cakrabuana kepada Syarif Hidayatullah.
42. Tersebar nya agama Islam secara pesat di Jawa Barat, khususnya di Cirebon.

Alur cerita dalam sintaksis tersebut menunjukkan sebuah hubungan kausalitas yang terjalin sebagai alur cerita. Alur legenda “Syekh Quro” dilandasi oleh keinginan Syekh Quro untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Alur penggerak ini turut mengembangkan alur utama-alur utama lainnya yang turut menjalin konflik dan penyelesaiannya. Pada tahap awal, Syekh Quro menemukan hambatan dan tantangan dari para tokoh penentang penyebaran agama Islam, lalu pada pertengahan cerita digambarkan perjuangan para tokoh pendukung penyebaran agama Islam untuk menyebarkan agama Islam kepada para tokoh penentang penyebaran agama Islam sehingga pada tahap akhir cerita tergambar kesuksesan para tokoh dengan tersebar nya agama Islam di Jawa Barat.

Hubungan kausalitas dalam analisis alur turut menghadirkan tokoh pendukung penyebaran agama Islam dan tokoh penentang penyebaran agama Islam. Analisis tokoh menunjukkan bahwa ada delapan belas tokoh yang menjadi tokoh pendukung, yakni Syekh Quro, Ki Gedeng Tapa, Nyi Subang Larang, Raden Walangsungsang, Raden Kian Santang, Rara Santang, Syekh Dargom, Syekh Abdurrohman, Imam Mekah, Syekh Nur Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Nurullah, Sultan Mesir (tokoh individu); dan kelompok Wali Sanga (Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Muria), masyarakat Cirebon, masyarakat Karawang, Ulama-ulama Mekah, serta para tokoh masyarakat Karawang (tokoh kolektif). Sementara itu, tokoh penentang penyebaran agama Islam hadir dalam status sosial pemangku kerajaan, yakni tokoh Prabu Anggalarang, Prabu Siliwangi/Raden Pamanah Rasa (tokoh individu), dan Anak Buah Kerajaan Pajajaran (tokoh kolektif).

Dialektika para tokoh menyuguhkan retorika yang menarik. Kemarahan Prabu Anggalarang selaku raja di Kerajaan Pajajaran turut menyiratkan hadirnya latar pada masa penyebaran agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Karawang. Latar tersebut terdiri atas latar tempat dan latar waktu.

Latar tempat meliputi Jawa Barat, Kerajaan Pajajaran, Cirebon, Pelabuhan Cirebon (Muara Jati), Karawang, Masjid Agung Karawang, Pesantren Syekh Quro, Pelabuhan Tanjungpura (latar tempat di Indonesia); Mekah, Campa, dan Cina (latar tempat non-Indonesia). Latar tempat tersebut diperkuat dengan kehadiran latar waktu yang menandai peristiwa penyebaran agama Islam, yakni tahun 1416 M, pagi hari, siang hari, malam hari, hari jumat, masa berlayar. Kedua latar ini menyiratkan suatu gagasan tertentu seperti latar simbolis yang menggambarkan gagasan pengislaman yang menarik, misalnya tempat pengajian, langit Jawa, laut pesisir Mekah, dan tempat salat Imam Mekah. Keempat latar simbolis tersebut menopang gagasan pengislaman yang difungsikan untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat yang berkeadilan dengan sarana penunjang keagamaan.

Analisis struktur (alur, tokoh, dan latar) menunjukkan bahwa keinginan Syekh Quro untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat menampilkan sinergi yang positif ketika ulama tersebut datang ke Jawa Barat. Ulama ini mendatangi dua tempat strategis sebagai pusat penyebaran agama Islam seperti Cirebon dan Karawang (Kurnia, 2009). Kedua latar tersebut turut menghadirkan tokoh yang mendukung misi dakwah Syekh Quro seperti tampak pada tokoh Ki Gedeng Tapa (penguasa Pelabuhan Cirebon), Nyi Subang Larang, Syekh Nur Jati, Raden Walangsungsang, ataupun Rara Santang.

B. Fungsi Legenda Syekh Quro

Legenda "Syekh Quro" di antaranya berfungsi sebagai sistem proyeksi. Sistem proyeksi tampak pada tindakan Prabu Siliwangi melamar Nyi Subang Larang. Keinginannya itu harus dibayar dengan syarat, yakni mengambil *bintang kretejejer 100* di Mekah. Peristiwa ini sekaligus menuntun Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ini sekaligus menunjukkan fungsi pengesah kebudayaan bahwa suatu keinginan harus diiringi niat dan tindakan yang selaras. Sementara itu, fungsi pendidikan tergambar dalam peristiwa pendidikan keagamaan yang dilewati Prabu Siliwangi ketika ia berada di Mekah. Pertemuannya dengan Imam Mekah menggambarkan sarana pendidikan agar Prabu Siliwangi mempelajari agama Islam dengan baik melalui jalan berguru kepada para Ulama Mekah. Hal ini turut menjadi fungsi kritik sosial dalam masyarakat bahwa pentingnya berguru kepada orang yang berkompeten. Komitmen ini juga menjadi fungsi pemaksa berlakunya norma sosial dalam masyarakat bahwa suatu persoalan harus diselesaikan dengan kepala dingin tanpa jalan peperangan. Hal ini tergambar ketika peristiwa kemarahan Prabu Anggalarang dan perintahnya untuk membunuh Syekh Quro.

C. Makna Legenda Syekh Quro

Berpijak pada fungsinya, terungkaplah makna solidaritas sosial melalui strategi pengislaman yang digambarkan dalam legenda "Syekh Quro". Gagasan tersebut tampak relevan dengan misi penyebaran agama Islam di Jawa Barat yang diusung para tokoh pendukung penyebaran agama Islam, khususnya Syekh Quro. Agama Islam dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat karena strategi diplomasi kekuasaan dalam arti "melunakkan" penguasa berhasil. Hal ini tampak dalam strategi pernikahan dengan peristiwa menikahnya Nyi Subang Larang dan penguasa Pajajaran (Prabu Siliwangi) melalui syarat *bintang kretejejer 100* (strategi kebudayaan). Agama Islam kian kuat dan mengundang ketertarikan masyarakat dengan strategi pendidikan melalui tempat pengajian (pesantren). Kegemilangan ini tidak terlepas dari optimalisasi potensi dakwah Syekh Quro kepada masyarakat di Jawa Barat yang terbuka karena aktivitas perniagaan di pelabuhan (strategi perniagaan).

3.2. Pembahasan

Berkaca dari struktur, fungsi, dan makna yang terdapat dalam legenda “Syekh Quro”, ada benang merah antara keinginan untuk menciptakan solidaritas sosial, khususnya solidaritas organik (homogen). Hal itu terlihat dalam tatanan masyarakat yang berkeadaban melalui nuansa perdamaian dengan kegigihan perjuangan para tokoh pendukung penyebaran agama Islam pada saat itu. Dalam konteks masa kini, kita mampu merekayasa hal serupa melalui figur-figur tokoh kebangsaan yang terbuka menerima perbedaan, menghargai keragaman etnis, suku, dan budaya di Indonesia. Figur-figur tersebut tentu akan mampu menunjang terjaganya solidaritas kebangsaan. Adapun hambatan-hambatan yang berpotensi merusak ikatan solidaritas kebangsaan, sebagaimana konsep Durkheim, dapat disiasati melalui penanaman nilai-nilai pendidikan yang memanusiakan manusia seperti halnya keberhasilan Syekh Quro dalam “mendidik” Prabu Siliwangi untuk meredam murka dan angkara sehingga mampu menjaga hubungan baik antar sesama manusia.

Kolektivitas masyarakat Cirebon dan Karawang sebagaimana terekam dalam legenda “Syekh Quro” justru membuktikan bagaimana solidaritas sosial dapat dilandasi dengan etika masyarakat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang bermartabat. Kemartabatan ini senantiasa dijaga dengan terbuka menerima kemajuan zaman, tetapi tetap mempertahankan identitas sebagai bangsa yang plural dan berbudi luhur. Nilai-nilai inilah yang perlu ditingkatkan dan diamalkan dalam konteks kehidupan bangsa kita saat ini sehingga cita-cita untuk mengikat rasa satu nusa, satu bangsa akan tetap lestari pada masa kini dan nanti. Dengan demikian, keragaman masyarakat dengan segala ciri khasnya menjadi perisai untuk tetap saling menghormati, menghargai, dan gotong royong sebagai bangsa yang meraih kemerdekaan sesungguhnya. Bukan tidak mungkin, nilai solidaritas sosial organik dalam kisah penyebaran agama Islam sebagaimana terekam dalam legenda “Syekh Quro” menjadi potret kekayaan bangsa kita yang berharga.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, struktur legenda “Syekh Quro” menampilkan alur cerita yang saling berkaitan (kausalitas). Alur itu menampilkan oposisi tokoh pendukung dan tokoh penentang penyebaran agama Islam yang terdiri atas tokoh individu dan kolektif. Oposisi tokoh ini diperkuat dengan kehadiran latar yang terdiri atas latar Indonesia dan non-Indonesia yang menopang misi penyebaran agama Islam seperti Jawa Barat, Cirebon, Karawang, dan Mekah. *Kedua*, Legenda “Syekh Quro” berfungsi sebagai sistem proyeksi, pengesah kebudayaan, alat pendidikan, alat kritik sosial, dan alat pemaksa berlakunya norma-norma sosial. *Ketiga*, makna legenda Syekh Quro berkaitan dengan solidaritas sosial organik melalui strategi pengislaman yang berwujud strategi pernikahan, pendidikan, perniagaan, diplomasi kekuasaan, dan kebudayaan.

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut ke dalam kerangka multidisiplin lainnya yang dapat memperkaya khazanah kiprah Syekh Quro di Kabupaten Karawang. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sarana penggugah solidaritas sosial masyarakat di Kabupaten Karawang sehingga dapat diiringi penelitian lainnya yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Amir, A. (2013). *Sastra Lisan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Anita, D. (2014). "Walisongo: Mengislamkan Tanah Jawa (Suatu Kajian Pustaka)". *Jurnal Wahana Akademika*, 1 (2), 243-266.
- Apandi, F. (2011). *Peranan Syaikh Quro dalam Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat Abad XV M*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- BPS Karawang. (2025). *Karawang Dalam Angka 2025*. Karawang: BPS Karawang.
- Danandjaja, J. (1984). *Folklore Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-Lain*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Danandjaja, J. (2008). *Pendekatan Folklor dalam Penelitian Bahan-Bahan Tradisi Lisan*. (M. Pudentia, Penerj.) Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Durkheim, E. (1984). *The Division of Labour in Society*. (W. Halls, Penerj.) London: The Macmillan Press Ltd.
- Endraswara, S. (2009). *Metodologi Penelitian Folklore (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Jakarta: MedPress.
- Fatimah, S. (2011). "Peran Nyi Mas Rara Santang di Balik Kesuksesan Sunan Gunung Jati". *Jurnal Holistik*, 12 (2), 137-154.
- Hafid, A. (2015). "Budaya spiritual Mengenal Makam Syekh Muhammad Amir di Kabupaten Bantaeng". *Jurnal Sejarah dan Budaya Walasuji*, 6 (1), 139-152.
- Hutomo, S. S. (1991). *Mutiara yang Terlupakan (Pengantar Studi Sastra Lisan)*. Jawa Timur: HISKI.
- Kurnia, R. (2009). *Tempat dan Peristiwa Sejarah di Jawa Barat*. Jakarta: Sadana Panca Karya Nusa.
- Kuswandi. (2013). "Peran Syekh H. Zaenuddin dalam syiar Islam di Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya". *Jurnal Artefak*, 1 (1), 100-109.
- Lombard, D. (1992). *Wawasan Ruang dan Waktu di Kepulauan Nusantara*. (T. d. Alfian, Penyunt.) Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lubis, N. H. (2011). *Sejarah Kabupaten Karawang*. Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ricklefs, M. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rusyana, Y. d. (2000). *Prosa tradisional: Pengertian, klasifikasi, dan teks*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Saddhono, d. (2016). Dialektika Islam dalam Mantra sebagai Bentuk Kearifan Lokal Budaya Jawa. *Jurnal Akademika*, 21 (1), 83-98.
- Saefudin. (2015). "Legenda Banjar sebagai Sarana Dakwah Keagamaan". *Jurnal Metasastra*, 8 (2), 289-302.
- Spradley, J. (2006). *Metode etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sudikan, S. (2015). *Metode Penelitian Sastra Lisan*. Lamongan: Pustaka Ilalang.
- Sunanto, M. (2012). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafrizal, A. (2015). Sejarah Islam Nusantara. *Jurnal Islamuna*, 235-253.
- Syatibi, M. (2012). Penyebar Islam di Pantai Utara Jawa: Mengungkap Peran Syekh Quro Karawang. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 10 (1), 51-74.
- Todorov, T. (1985). *Tata sastra*. (d. Okke K.S. Zaimar, Penerj.) Jakarta: Djambatan.
- Zailani, d. (2011). *Genealogi Intelektual Ulama Betawi (Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Awal Abad ke-19 sampai Abad ke-21)*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).

Pengelolaan Konflik Dalam Dunia Pendidikan: Studi Fenomenologis Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar

Conflict Management in Education: A Phenomenological Study of Elementary School Principal Leadership

Rahman Tanjung¹, Asep Supriatna², Jiana Yuaningrum³

STIT Rakeyan Santang Karawang^{1,2,3}

Alamat korespondensi: Jl. Ciremai No. 5 Kel. Karangpawitan Kec. Karawang Barat

e-mail: ¹ rahmantanjung1981@gmail.com , ² aasepstea@gmail.com ,

³ jianayuaningrum21@gmail.com

ABSTRAK

Konflik dalam dunia pendidikan merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dan perlu dikelola secara bijak, termasuk salah satunya di Sekolah Dasar. Kepala Sekolah memiliki peran dalam menanganinya. Penelitian ini bertujuan memahami strategi kepala sekolah dalam mengelola konflik di sekolah dasar di Kecamatan Klari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kepala sekolah menggunakan mediasi, dialog terbuka, dan pendekatan kekeluargaan untuk meredakan konflik, dengan penekanan pada nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab. Penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional, yang diharapkan dapat berimplikasi terhadap penguatan kapasitas emosional dan sosial kepala sekolah sebagai kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan inklusif.

Kata kunci: Konflik, Kepemimpinan, Fenomenologis, Pendidikan, Sekolah Dasar

ABSTRACT

Conflict in education is a social reality that cannot be avoided and needs to be managed wisely, including in Elementary Schools. The Principal has a role in handling it. This study aims to understand the principal's strategy in managing conflict in elementary schools in Klari District. The study used a qualitative approach with a phenomenological method, where data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation. The results showed that the principal used mediation, open dialogue, and a family approach to reduce conflict, with an emphasis on the values of justice, empathy, and responsibility. This research highlights the importance of emotional intelligence-based leadership training, which is expected to impact the strengthening of the emotional and social capacity of school principals as a key to creating a harmonious and inclusive educational environment.

Keywords: Conflict, Leadership, Phenomenological, Education, Elementary School

1. Pendahuluan

Konflik merupakan bagian tak terhindarkan dari interaksi sosial manusia, dan dunia pendidikan bukanlah pengecualian (Mahesa & Hadijah, 2023). Konflik adalah pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses sosial individu atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan, disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soekanto, 2014), sedangkan menurut Soetrisno (2017), konflik di dunia pendidikan sering kali terjadi di antara sesama pendidik, antara pendidik dengan peserta didik, maupun antara pendidik dengan orang tua siswa. Konflik ini tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas, tetapi juga dalam aspek manajerial dan pengambilan kebijakan pendidikan. Dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks seperti sekolah dasar, interaksi antara siswa, guru, staf administrasi, dan komite sekolah sering kali memunculkan perbedaan pendapat, nilai, dan tujuan. Interaksi ini dapat memicu ketegangan, perselisihan, atau bahkan permusuhan jika tidak dikelola dengan baik. Konflik yang tidak dikelola dengan tepat dapat mengganggu iklim pembelajaran dan merusak hubungan antar warga sekolah, bahkan menurut Rinjani et al. (2024), konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi siswa. Di sinilah peran penting Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis melalui strategi kepemimpinan yang efektif. Kepala sekolah juga diharapkan dapat mendorong kerja tim di antara staf dan siswa, mempromosikan komunikasi terbuka untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara damai (Sabila et al., 2024) (Suhendra & Hidayat, 2023).

Konflik dalam dunia pendidikan di tingkat sekolah dasar juga terjadi secara global. Misalnya, penelitian di Kanada menunjukkan bahwa konflik di sekolah dapat dikurangi secara signifikan melalui pelatihan resolusi konflik yang melibatkan seluruh siswa dan guru, dengan hasil positif terhadap pemahaman dan penggunaan strategi damai oleh siswa (Stevahn et al., 2005). Di Kroasia, penelitian menemukan bahwa konflik antar staf sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional, dan pengelolaan konflik yang efektif bergantung pada strategi yang disesuaikan dengan keadaan afektif para pelaku konflik (Kostelić et al., 2023).

Kepala Sekolah harus mampu beradaptasi dengan tantangan unik yang disajikan oleh konflik di sekolah yang dipimpinnya dengan menerapkan teori kepemimpinan yang tepat. Menurut teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bass (1985), pemimpin yang transformasional mampu membawa perubahan positif dengan mendorong partisipasi, visi bersama, dan semangat kolektif. Kepala sekolah yang mengadopsi gaya ini tidak hanya mengatur dan mengontrol, tetapi juga menjadi inspirator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik. Teori ini diperkuat oleh temuan dari Zhang et al (2015) dan Wang et al (2020) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dalam institusi pendidikan efektif menurunkan tingkat konflik dan meningkatkan kolaborasi. Selain itu, pendekatan kepemimpinan situasional juga relevan, yang menekankan perlunya adaptasi gaya kepemimpinan sesuai situasi dan karakteristik pihak yang terlibat (Hersey & Blanchard, 2016).

Dalam pengelolaan konflik, kepala sekolah harus mampu menyesuaikan pendekatannya apakah bersifat partisipatif, direktif, atau delegatif, tergantung pada tingkat kesiapan dan keterlibatan pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara itu, Thomas dan Kilmann (1974) mengidentifikasi lima gaya pengelolaan konflik: kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi, yang bisa dipilih kepala sekolah dalam menyelesaikan konflik berdasarkan konteks yang dihadapi (Thomas & Kilmann, 1974). Konflik dalam sekolah tidak hanya disebabkan oleh perbedaan personal atau profesional, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya lokal. Penelitian oleh Dewi et al. (2021) menekankan pentingnya pemahaman kepala sekolah terhadap konteks sosial tempat mereka memimpin, sementara itu Kusumawati dan Ningsih (2024) menggarisbawahi perlunya keterampilan komunikasi agar dapat membangun hubungan yang harmonis dalam menciptakan lingkungan yang positif dan produktif.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait peran kepemimpinan Kepala Sekolah dalam penanganan konflik di sekolah, seperti yang dilakukan oleh Msila (2012) mengenai kepemimpinan dan manajemen konflik dalam pendidikan menunjukkan bahwa kepala sekolah yang memiliki pendekatan mediatif lebih berhasil dalam meredakan konflik di sekolah dibandingkan dengan kepala sekolah yang menggunakan pendekatan autoritatif. Ridho dan Chaniago (2024) melakukan penelitian tentang peran kepala sekolah dalam mengelola konflik melalui pendekatan berbasis empati dan komunikasi serta penelitian dari Zhang et al (2015) dan Wang et al (2020) tentang pengelolaan konflik dalam institusi pendidikan, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang transformasional dapat mengurangi tingkat konflik dengan menciptakan visi bersama dan kolaborasi antara semua pihak di sekolah. Ketiga penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan *literature review* dan hanya satu yang menggunakan pendekatan kualitatif, namun dilakukan di Sekolah Menengah Atas, sehingga penelitian yang dilakukan penulis ini penting, karena masih minim studi yang mengeksplorasi secara mendalam pengalaman subjektif kepala sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar dalam mengelola konflik berdasarkan nilai-nilai lokal dan realitas sosial tertentu. Kebaruan (*novelty*) dari studi ini terletak pada penggunaan pendekatan fenomenologis yang menggali makna pengalaman kepemimpinan kepala sekolah dalam menyelesaikan konflik serta pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam proses resolusi konflik, khususnya di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Klari, yang memiliki kompleksitas sosial dan budaya tersendiri.

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian pada beberapa Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Kecamatan Klari dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat heterogenitas sosial yang tinggi dan dinamika organisasi sekolah yang kompleks, sehingga sering terjadi konflik dalam berbagai bentuk. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh beberapa pemberitaan tentang konflik seperti tawuran sekolah (Khumaini, 2022) dan pungutan liar (Nurjatinews.com, 2024) ((Alexanews.id, 2025). Pemberitaan yang terjadi ini, sejalan dengan beberapa penelitian di Indonesia terkait konflik yang terjadi di sekolah, seperti misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2017), menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru sering menghadapi persoalan sosial seperti konflik antara guru dan orang tua siswa yang membutuhkan pendekatan komunikasi dan konseling efektif untuk diselesaikan. Penelitian lain yang memperkuat adalah yang dilakukan oleh (Susanto, 2017) menjelaskan bahwa permasalahan perilaku sosial siswa seperti perundungan dan kekerasan, termasuk potensi tawuran di sekolah dasar, mencerminkan pentingnya peran guru dan kepala sekolah dalam menanamkan karakter dan menyelesaikan konflik secara preventif dan edukatif.

Selain itu, hal lain yang menyebabkan penulis memilih Kecamatan Klari sebagai lokasi penelitian, adalah karena Kecamatan Klari merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah lembaga pendidikan formal cukup banyak, sehingga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menjangkau beragam pengalaman kepala sekolah dalam konteks yang berbeda-beda. Kompleksitas relasi antara guru, siswa, orang tua, dan kepala sekolah di wilayah ini menjadi latar yang relevan untuk dikaji secara fenomenologis. Berdasarkan data di situs kemendikbud.go.id, jumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Klari sebanyak 53 sekolah, terdiri dari 41 Sekolah Dasar Negeri dan 12 Sekolah Dasar swasta (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kepala sekolah mengidentifikasi dan mengelola konflik di lingkungan sekolah, serta mengeksplorasi strategi penyelesaian konflik yang digunakan, dengan mempertimbangkan dinamika lokal dan pendekatan kepemimpinan yang mereka anut.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Metode penelitian fenomenologis menurut Moustakas (1994) adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman manusia secara mendalam, dengan fokus pada bagaimana individu merasakan dan memaknai fenomena tertentu. Lokasi penelitian di 6 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan utama adalah kepala sekolah dasar dengan pengalaman minimal 3 tahun dan pernah menangani konflik di sekolahnya.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan *member-check*. Triangulasi dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) data, serta memastikan bahwa hasil penelitian lebih kredibel (Sugiyono, 2015). Data dianalisis dengan menggunakan model Moustakas (1994), yang mencakup *horizontalization* (mengidentifikasi pernyataan penting dari wawancara), *clustering meaning units* (mengelompokkan pernyataan ke dalam tema utama), *textural description* (menggambarkan apa yang dialami), *structural description* (menjelaskan bagaimana pengalaman terjadi), dan *synthesis of meaning* (merangkum esensi pengalaman kepala sekolah dalam mengelola konflik secara menyeluruh).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama tiga bulan (Desember 2024 – Februari 2025) di 6 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, didapatkan temuan dalam penelitian yang mengacu pada dua fokus utama, yaitu:

3.1.1. Strategi Kepala Sekolah dalam Mengidentifikasi dan Menyikapi Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah dasar di Kecamatan Klari mengidentifikasi konflik melalui pendekatan dialogis, laporan guru, serta pengamatan langsung terhadap dinamika interpersonal di sekolah. Proses identifikasi ini tidak bersifat seragam, namun bergantung pada kepekaan sosial dan pengalaman kepemimpinan masing-masing kepala sekolah. Dalam satu kasus, kepala sekolah menyadari potensi konflik melalui penurunan performa guru dan meningkatnya keluhan dari orang tua siswa. Selain itu, komunikasi informal dengan guru dan staf menjadi instrumen awal untuk menangkap sinyal-sinyal konflik yang belum muncul secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa strategi deteksi konflik memerlukan kepekaan emosional dan pendekatan relasional yang kuat.

Strategi penyikapan konflik yang digunakan kepala sekolah bervariasi, mulai dari mediasi langsung, fasilitasi dialog antarpihak, hingga penerapan kebijakan administratif. Kepala sekolah umumnya memilih pendekatan mediatif sebelum menerapkan tindakan administratif formal. Sebagian besar kepala sekolah juga mengedepankan nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam komunitas sekolah yang masih memiliki ikatan sosial kuat. Strategi ini bertujuan menjaga harmonisasi lingkungan kerja dan menghindari eskalasi konflik. Namun, dalam kasus tertentu, sanksi administratif tetap diperlukan jika konflik berlarut dan mengganggu proses pembelajaran.

Berikut adalah data hasil wawancara yang merangkum strategi pengelolaan konflik:

Tabel 1: Strategi Kepala Sekolah dalam Menyikapi Konflik di Sekolah (N=6)

No	Strategi	Jumlah Kepala Sekolah	Persentase (%)
1	Mediasi langsung	5	83%
2	Dialog antarpihak	4	67%
3	Penerapan kebijakan formal	3	50%
4	Pendekatan kekeluargaan	6	100%
5	Konsultasi dengan pengawas	2	33%

Strategi pengelolaan konflik yang digunakan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal seperti kekeluargaan dan musyawarah. Sebanyak 100% kepala sekolah menempatkan nilai kekeluargaan sebagai dasar utama penyelesaian konflik. Ini diwujudkan dalam praktik mediasi langsung, musyawarah antar pihak, serta penciptaan forum informal untuk menyerap aspirasi dan keluhan. Dialog antarpihak juga diterapkan oleh 67% responden, menunjukkan pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif. Dalam praktiknya, kepala sekolah juga menggunakan forum musyawarah sekolah (rapat guru, komite, dan pertemuan orang tua) sebagai wadah resolusi konflik. Forum ini tidak hanya efektif dalam meredakan ketegangan, tetapi juga memperkuat partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Sejumlah kepala sekolah mengakui bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti pengawas atau tokoh masyarakat diperlukan saat konflik melibatkan pihak eksternal seperti wali murid. Pendekatan kolektif ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah tidak bersifat otoriter, tetapi kolaboratif. Ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional yang menekankan pada relasi dan nilai-nilai bersama. Pengalaman emosional kepala sekolah dalam menyikapi konflik juga menjadi temuan penting. Beberapa kepala sekolah mengalami tekanan psikologis dan kelelahan akibat beban mediasi yang terus menerus. Meski demikian, mereka menganggap konflik sebagai bagian dari dinamika organisasi yang harus dihadapi secara bijak. Kepala sekolah yang berhasil mengelola emosinya umumnya memiliki latar belakang pelatihan kepemimpinan dan manajemen konflik. Hal ini memperkuat pentingnya pelatihan kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional bagi para pemimpin sekolah.

3.1.2. Nilai-Nilai yang Mendasari Pengelolaan Konflik oleh Kepala Sekolah

Berikut adalah data hasil pengkodean nilai-nilai yang muncul dalam pengelolaan konflik:

Tabel 2: Nilai yang Mendasari Pengelolaan Konflik oleh Kepala Sekolah (N=6)

No	Nilai Dominan	Frekuensi Muncul	Persentase (%)
1	Keadilan	6	100%
2	Musyawarah	5	83%
3	Empati	4	67%
4	Tanggung jawab	6	100%
5	Toleransi	3	50%

Nilai utama yang melandasi pengelolaan konflik oleh Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Klari adalah nilai keadilan, musyawarah, empati, dan tanggung jawab. Nilai keadilan sangat kuat menjadi dasar kepala sekolah dalam mengelola konflik yang terjadi (100%), ini tercermin dari upaya kepala sekolah untuk memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam wawancara, para kepala sekolah menyebutkan bahwa mereka menghindari pengambilan keputusan yang berat sebelah dan selalu mendasarkan penyelesaian pada fakta dan asas manfaat.

Nilai musyawarah tampak kuat (83%) dalam setiap upaya penyelesaian konflik, terutama melalui forum informal yang melibatkan guru dan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah memahami konteks sosiokultural masyarakat tempat sekolah berada. Nilai empati juga menjadi faktor penting dalam meredam konflik yang melibatkan emosi pribadi. Kepala sekolah yang menunjukkan empati mampu menciptakan ruang aman bagi guru atau siswa yang mengalami tekanan psikologis akibat konflik. Beberapa kepala sekolah secara aktif mendengarkan keluhan pihak yang merasa dirugikan dan merespon dengan pendekatan suportif. Selain itu, rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan mendorong kepala sekolah untuk tidak menunda penyelesaian konflik. Dalam pengambilan keputusan, nilai tanggung jawab yang juga paling kuat (100%) tercermin dari keinginan menjaga citra lembaga pendidikan tetap positif di mata masyarakat.

Nilai toleransi hanya muncul sebesar 50% dalam temuan penelitian, karena tidak semua kepala sekolah menjadikan nilai ini sebagai landasan eksplisit dalam pengelolaan konflik yang mereka lakukan. Dari hasil wawancara dan observasi, beberapa kepala sekolah mungkin menerapkan sikap toleran dalam praktik, namun tidak menyebutkannya sebagai nilai inti yang mereka sadari atau komunikasikan secara eksplisit. Artinya, toleransi hadir secara tersirat dalam bentuk empati atau sikap mendengarkan, namun tidak selalu diidentifikasi sebagai nilai tersendiri.

Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi fondasi praksis dalam gaya kepemimpinan kepala sekolah. Mereka menyadari bahwa dalam dunia pendidikan, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh kurikulum dan pembelajaran, tetapi juga oleh kualitas relasi sosial. Dalam konteks ini, kepemimpinan kepala sekolah yang berbasis nilai menjadi jantung dari pengelolaan sekolah yang sehat. Penguatan nilai-nilai ini berperan dalam menciptakan budaya sekolah yang kondusif, adaptif, dan resilien terhadap konflik. Oleh karena itu, ke depan, pendidikan nilai harus diintegrasikan dalam program pelatihan calon kepala sekolah.

3.2. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh juga, menunjukkan bahwa kepala sekolah dasar di Kecamatan Klari mengelola konflik dengan pendekatan yang lebih mengutamakan keadilan, musyawarah, dan empati. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Jannah (2020), yang juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan berbasis nilai-nilai keadilan dan musyawarah sangat penting dalam mengelola konflik di sekolah. Temuan penelitian ini juga memperkuat gagasan bahwa pengelolaan konflik yang efektif dalam pendidikan bergantung pada kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai humanistik dan komunikasi interpersonal. Kepala sekolah yang mampu membangun relasi emosional dengan warga sekolah lebih sukses dalam menciptakan solusi yang diterima semua pihak (Dewi et al., 2021).

Pendekatan yang lebih informal dan berbasis nilai kekeluargaan sebagaimana diterapkan di Sekolah Dasar di Kecamatan Klari mencerminkan penerapan kepemimpinan transformasional dalam konteks lokal. Kepala sekolah bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial di sekolah. Hal ini berbeda dari temuan Permadani, et al (2018) yang menunjukkan bahwa kepala sekolah cenderung lebih memilih keputusan regulatif daripada pendekatan mediatif, penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Klari lebih memilih pendekatan mediatif terlebih dahulu. Temuan ini mengindikasikan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan konflik yang lebih menghargai proses penyelesaian yang bersifat inklusif dan kolektif. Hal ini juga diperkuat dengan temuan bahwa Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Klari sering melibatkan pihak ketiga seperti pengawas dan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang lebih kompleks. Pendekatan seperti ini lebih mencerminkan karakter kepemimpinan transformasional, yang tidak hanya mengutamakan otoritas tetapi juga melibatkan seluruh komponen sekolah dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini,

strategi mediasi yang digunakan juga mencerminkan teori Thomas & Kilmann (1974) tentang gaya kolaborasi dan kompromi sebagai solusi jangka panjang dalam organisasi.

Perbandingan secara internasional memperlihatkan bahwa tantangan konflik di sekolah dasar bersifat universal, meskipun pendekatan penyelesaiannya bisa berbeda tergantung pada konteks budaya dan kebijakan pendidikan. Di Filipina, kepala sekolah dasar menunjukkan gaya kepemimpinan kolaboratif sebagai pendekatan dominan dalam menyelesaikan konflik, yang berdampak langsung terhadap moral guru dan lingkungan kerja yang harmonis (Illescas & Perez, 2020). Di Pakistan, penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang mampu mendorong komunikasi terbuka dan kolaboratif berkontribusi besar terhadap terciptanya lingkungan pembelajaran yang sehat dan minim konflik (Hussain et al., 2023). Selain itu, penelitian di Amerika Serikat mengungkap bahwa program pelatihan resolusi konflik secara langsung berdampak pada peningkatan kemampuan siswa dalam menangani konflik secara damai dan mengurangi perilaku agresif di lingkungan sekolah (Moore, 2007).

Dalam penanganan konflik yang terjadi, Kepala sekolah di Klari memilih membangun konsensus daripada memberlakukan keputusan *top-down*. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa kepala sekolah yang mampu menunjukkan rasa empati dan bertanggung jawab atas penyelesaian konflik cenderung berhasil dalam memelihara iklim kerja yang kondusif. Hal ini mempertegas pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang tidak hanya mengatur, tetapi juga membimbing dan memberi contoh bagi guru dan staf dalam menghadapi masalah. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal tekanan emosional yang dirasakan kepala sekolah saat menjadi penengah. Sebagaimana diungkap oleh Almaidah et al (2022), peran ini sering membawa beban psikologis yang tidak ringan, terutama ketika konflik melibatkan rekan kerja atau anak didik, karena Kepala Sekolah harus berupaya mengambil jalan tengah sehingga akan memperkecil perbedaan atau kesenjangan pendapat agar konflik yang terjadi bisa diselesaikan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kepala sekolah dalam kecerdasan emosional dan teknik resolusi konflik melalui pelatihan yang komprehensif. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya kepala sekolah diberi ruang untuk menerapkan pendekatan yang kontekstual dan tidak seragam. Kebijakan pendidikan harus memperhitungkan keunikan sosial budaya lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan kepala sekolah dasar di Klari dalam menerapkan nilai lokal seperti musyawarah dan kekeluargaan sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian konflik.

Mengingat hasil penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan konflik di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang humanistik, adaptif, dan berbasis nilai lokal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap penguatan kapasitas emosional dan sosial kepala sekolah sebagai kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan inklusif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 6 (enam) Sekolah Dasar di Kecamatan Klari, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan konflik oleh Kepala Sekolah Dasar berfokus pada pendekatan mediatif yang melibatkan musyawarah dan kekeluargaan. Kepala Sekolah Dasar di wilayah ini cenderung mengutamakan hubungan interpersonal yang baik dalam menyelesaikan konflik, dengan pendekatan yang lebih mengutamakan keadilan dan tanggungjawab, yang sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional. Dimana nilai-nilai yang paling sering digunakan dalam pengelolaan konflik adalah keadilan dan tanggung jawab (100%), serta musyawarah dan empati sebagai fondasi kuat dalam resolusi damai.

Selain itu, pendekatan mediatif dan kolaboratif yang diterapkan para Kepala Sekolah Dasar tersebut terbukti efektif dalam menjaga iklim yang kondusif di sekolah dan meningkatkan keterlibatan

semua pihak yang terlibat dalam konflik, seperti guru, siswa, dan orang tua. Meskipun demikian, pengelolaan konflik lebih pada konflik internal, dan masih terbatas pada jumlah kepala sekolah yang dijadikan responden dalam penelitian ini.

Namun, pengelolaan konflik ini masih menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan formal dan pengelolaan konflik eksternal yang melibatkan pihak luar sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk memperluas cakupan penelitian dan lebih memperhatikan konflik eksternal yang dapat memengaruhi proses penyelesaian konflik internal.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini, penulis merekomendasikan untuk menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada pengembangan kecerdasan emosional kepala sekolah agar mereka dapat mengelola konflik dengan lebih efektif, terutama dalam mengatasi tantangan psikologis yang muncul saat konflik terjadi. Pelatihan ini dapat mencakup teknik mediasi, pengelolaan emosi, dan strategi komunikasi yang lebih efektif. Selain itu, Kepala sekolah juga disarankan untuk lebih melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk guru, orang tua, komite sekolah dan bahkan masyarakat sekitar, untuk memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Daftar Pustaka

- Alexanews.id. (2025). *Pungli Berkedok LKS di SDN Pancawati 1, Orang Tua Siswa Tercekik*. Wwww.Alexanews.Id. <https://alexanews.id/pungli-berkedok-lks-di-sdn-pancawati-1-orang-tua-siswa-tercekik/>
- Almaidah, A., Karina Adinda, Mohammad Dhiya'ul Muhibbin, & Mu'Alimin. (2022). Peran Kepala Sekolah Dalam Manajemen Konflik Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Guru Di Mi Miftahul Ulum Kranjingan. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 1(3), 34–41. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i3.246>
- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
- Dewi, L., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Penanaman Sikap Toleransi Antar Umat Beragama di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8060–8064. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2299>
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (2016). *Management Of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. Prentice Hall.
- Hussain, A., Kalsoom, S., & Qadar, A. (2023). Analysis of Conflict Management Practices and Strategies at the Elementary School Level in District Rahim Yar Khan. *International Journal of Social Science & Entrepreneurship*, 3(2), 387–409. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58661/ijssse.v3i2.155>
- Illescas, C. M., & Perez, D. R. (2020). Conflict Management Styles of Elementary School Heads and Their Influence to Teachers' Morale. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, INNOVATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES*, 1(3), 181–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/ZENODO.3975042>
- Jannah, L. K. (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan. *Islamika*, 2(1), 129–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.471>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. (2025). *DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) DIKDAS PER KEC. KLARI*. Wwww.Kemendikbud.Go.Id. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikdas/022104/3/jf/5/all>
- Khumaini, M. A. (2022). *Polisi Karawang razia sekelompok pelajar yang akan tawuran*. Wwww.Antaranews.Com. [https://www.antaranews.com/berita/3309543/polisi-karawang-razia-sekelompok-pelajar-yang-akan-tawuran#:~:text=Karawang \(ANTARA\) - Aparat kepolisian dari Polsek,razia sekelompok pelajar yang diduga hendak melakukan](https://www.antaranews.com/berita/3309543/polisi-karawang-razia-sekelompok-pelajar-yang-akan-tawuran#:~:text=Karawang (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Polsek,razia sekelompok pelajar yang diduga hendak melakukan)
- Kostelić, K., Paulišić, M., & Božac, M. G. (2023). Modeling Conflicts at Work: The Case of Elementary School Employees in Croatia. *Administrative Sciences*, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/admsci13010020>

- Kusumawati, S., & Ningsih, S. R. (2024). Kepemimpinan Kepala Sekolah Berdasarkan Kecerdasan Emosional (EQ) di SDN 2 Kampung Baru Kota Bandar Lampung. *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN*, 3(7), 516–522.
- Mahesa, L. P., & Hadijah, H. (2023). Manajemen Konflik dalam Lembaga Pendidikan Islam. *TADRIBUNA: Journal of Islamic Education Management*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61456/tjiec.v4i1.135>
- Moore, N. L. (2007). Conflict resolution in elementary school. *Educational Psychology Commons*. <https://rdw.rowan.edu/etd/825>
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Sage Publications.
- Msila, V. (2012). Conflict Management and School Leadership. *Journal of Communication*, 3, 25–34. <https://doi.org/10.1080/0976691X.2012.11884792>
- Nurjatinews.com. (2024). *Klarifikasi Kepsek SDN Duren III Mengenai Adanya Pungli di Sekolah*. [Www.Nurjatinews.Com](https://www.nurjatinews.com). <https://nurjatinews.com/2024/05/klarifikasi-kepsek-sdn-duren-iii-mengenai-adanya-pungli-di-sekolah/>
- Permadani, D., Maisyaroh, M., & Mustiningsih, M. (2018). KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1, 320–326. <https://doi.org/10.17977/um027v1i32018p320>
- Ridho, A., & Chaniago, N. S. (2024). Peran manajerial kepala sekolah dalam mengelola konflik di sekolah mts hubbul wathon. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 02, 667–676. <https://doi.org/10.30868/im.v7i02.7175>
- Ridwan, A. (2017). Peran Guru Agama dalam Bimbingan Konseling Siswa Sekolah Dasar. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1).
- Rinjani, A. Q., Sariasih, Y., & Haryanti, S. (2024). Manajemen Konflik dan Implementasinya dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal BELAINDIKA: Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan*, 6(3), 298–311.
- Sabila, M. S., Hartini, D. D., Rani, A. R. R., Zainiyah, S., & Mu'alimin, M. (2024). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengelola Konflik Internal Untuk Mencapai Kinerja Sekolah Yang Optimal. *Jurma: Jurnal Riset Dan Manajemen*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jurma.v2i4.2761>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soetrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana.
- Stevahn, L., Munger, L., & Kealey, K. (2005). Conflict Resolution in a French Immersion Elementary School. *The Journal of Educational Research*, 99(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.3200/JOER.99.1.3-18>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendra, M. R., & Hidayat, W. (2023). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengelola Konflik Dan Perilaku Organisasi Di SMA PGRI Situraja. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (JMPID)*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/jmpid.v5i2.2560>
- Susanto, R. (2017). *ANALISIS KETERKAITAN KEPEMIMPINAN GURU DI KELAS DAN POLA PENDEKATAN BIMBINGAN TERHADAP PEMBENTUKAN NILAI DAN KARAKTER ANAK DIDIK USIA SEKOLAH DASAR*.
- Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). *Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument*. Xicom and CPP.
- Wang, T., Wu, J., Gu, J., & Hu, L. (2020). Impact of open innovation on organizational performance in different conflict management styles: based on resource dependence theory. *International Journal of Conflict Management, ahead-of-p*. <https://doi.org/10.1108/IJCMA-09-2019-0165>
- Zhang, S., Chen, Y., & Sun, H. (2015). Emotional intelligence, conflict management styles, and innovation performance: An empirical study of Chinese employees. *International Journal of Conflict Management*, 26. <https://doi.org/10.1108/IJCMA-06-2014-0039>

Analisis Implementasi dan Rekomendasi Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah

(Analysis of Implementation and Recommendations for the Guidance Counseling Services in Elementary Schools, Communities and Local Government)

Sutirna

Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: sutirna@staff.unsika.ac.id

ABSTRAK

Pemberian layanan bimbingan dan konseling di pendidikan sekolah dasar hampir semua belum berjalan secara optimal dengan berbagai alasan, begitu pula di masyarakat (orang tua) siswa tentang pengetahuan pentingnya layanan bimbingan dan konseling hanya sebagian memahami, hal ini untuk orang tua yang strata pendidikannya SMA ke atas, dan pihak pemerintah daerah kab/kota, khususnya dinas pendidikan yang masih belum optimal menggerakkan pentingnya layanan bimbingan dan konseling terlaksana. Berdasar kepada latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian atau kajian literatur ini untuk memperkuat pentingnya layanan bimbingan dan konseling terlaksana di pendidikan sekolah dasar, masyarakat, dan terprogram di pihak pemerintah daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan literatur mengenai pentingnya layanan bimbingan dan konseling yang telah dipublikasi di jurnal, *google scholar*, dan makalah-makalah di website. Hasil penelitian kajian literatur ini disimpulkan bahwa direkomendasikan pihak pemerintah daerah untuk segera mengantisipasi ketidakefektifan layanan bimbingan konseling di pendidikan sekolah dasar, masyarakat, dan pihak pemerintah dalam merancang program pemberian penguatan bagi guru kelas, masyarakat, dan pihak pemerintah sendiri.

Kata kunci: *Bimbingan dan Konseling, Sekolah Dasar, Guru Kelas, Masyarakat, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kab/Kota.*

ABSTRACT

The provision of guidance and counselling services in primary education has almost all not been running optimally for various reasons, Similarly, in society (parents), only a portion of students understand the importance of guidance and counselling services, and the local government, particularly the education department, which has not yet optimally promoted the importance of guidance and counselling services. Based on that background, the purpose of this research or literature review is to reinforce the importance of guidance and counselling services being implemented in primary education, the community, and being programmed by the local government. This research method uses a literature approach regarding the importance of guidance and counselling services that have been published in journals, Google Scholar, and papers on websites. The results of this literature review study conclude that it is recommended for local government

authorities to promptly address the suboptimal counselling services in primary education, the community, and the government itself by designing reinforcement programs for classroom teachers, the community, and the government.

Keywords: *Guidance and Counselling, Elementary School, Classroom Teacher, Community, Local Government, District/City Education Office.*

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan investasi masa depan seseorang, sehingga pendidikan bagi pengikut Aliran Empirisme berasumsi menjadi dasar atau fundamental dalam perkembangan dan pertumbuhan seseorang dimasa yang akan datang. Tokoh aliran empirisme yaitu John Locke (1632-1704) berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa ditentukan oleh faktor lingkungan, lingkungan disini adalah pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Nama asli aliran empirisme adalah *the school of british empiricism*, sehingga doktrin dari aliran empiris yang masyhur dan abadi di dunia pendidikan sampai saat ini adalah Teori *Tabula Rasa* yang diartikan bahwa buku tulis yang kosong atau lembaran putih bersih. Hal ini diartikan dalam dunia pendidikan dan perkembangan manusia bahwa anak dengan keadaan putih bersih, faktor lingkungan pendidikanlah yang akan mencetak untuk dijadikan apa manusia tersebut, dengan kata lain bahwa pendidikan sangat berarti bagi manusia di masa mendatang, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. (Noor, 2019); (Sutirna, 2013b); (Sutirna, 2021)

Dari pendapat kaum aliran empirisme ini menimbulkan pro dan kontra, khususnya pengikut aliran Nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer (dalam Sutirna, 2025; Syamsu Yusuf Lani, 2019; Juntika Nur Ikhsan, 2021) yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak manusia lahir, pembawaan sejak lahir itulah yang menentukan perkembangannya. Pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan atau dengan kata lain pendidikan tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan manusia dimasa mendatang. Pertentangan antara aliran empirisme dan nativisme terus berdebat dengan membawa konsep kebenaran sendiri-sendiri. (Sutirna, 2025); (S. Yusuf, 2019); (Nurikhsan, 2021)

Memperhatikan terus perdebatan antara dua aliran tersebut di atas, maka muncul aliran penengah sebagai pereda perdebatan yaitu aliran kaum Konvergensi yang dipelopori oleh William Stern dalam seorang ahli pendidikan berkebangsaan Jerman yang mengatakan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang dibawa sejak lahir itu adalah petunjuk-petunjuk nasib masa depan dengan ruangan permainan. Dalam ruangan permainan itulah letaknya pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Tenaga-tenaga dari luar dapat menolong, tetapi bukanlah ia yang menyebabkan pertumbuhan itu, karena ini datangnya dari dalam yang mengandung dasar keaktifan dan tenaga pendorong. Jadi menurut William Stern seorang anak yang dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk, sehingga aliran konvergensi mengkolaborasi pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia, tidak hanya berpegang pada faktor pembawaan saja, tetapi juga ada faktor lingkungan. Inilah yang selanjutnya teori konvergensi ini memberikan teori perkembangan manusia untuk masa depannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan (pengalaman pendidikannya). (Sutirna, 2025); (Lani, 2012); (Nurikhsan, 2021))

Memperhatikan ketiga teori aliran pendidikan di atas tidak akan dapat menerka seseorang untuk masa depannya, walaupun dengan alat teknologi modern berbasis komputer atau alat canggih lainnya di dunia teknologi. Oleh karena itu, layanan pemberian bimbingan dan konseling sangat penting diimplementasikan oleh semua pendidik, orang tua, dan pimpinan instansi

pemerintah/swasta dengan optimal agar manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan masa-masa perkembangannya. Hal ini diperkuat oleh Sunaryo Kartadinata (Mantan Rektor UPI Bandung (2005-2015), Mantan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan (2019-2024) menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu atau ideal yaitu ketika tiga bidang dilaksanakan secara sinergis (bidang administrasi, bidang kurikulum (pembelajaran), dan bidang pembinaan kesiswaan (pembimbingan). Selanjutnya dikatakan jika hanya dua bidang yang dilaksanakan yaitu bidang administrasi dan bidang kurikuler (pembelajaran) dengan mengabaikan bidang bimbingan, maka akan mencetak para peserta didik yang pintar dan pandai saja, tetapi akan lemah dalam bidang psikososial. (Kartadinata, 2012)

Permasalahannya adalah layanan bimbingan dan konseling di setiap daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karawang pada jenjang sekolah dasar masih belum terlaksana dengan berbagai alasan, salah satunya tidak ada pengadaan guru bimbingan dan konseling untuk sekolah dasar. Hal ini berbeda dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK,MA) untuk pengadaan guru bimbingan dan konseling hampir setiap tahun disediakan oleh pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Hal ini dilakukan dengan semakin kompleksnya permasalahan psikologis yang dialami siswa. (Dewantara, 2024).(Novka, 2021); (A. Dewantara, 2022)

Kemudian persepsi masyarakat sebagai orang tua yang pernah menimba pendidikan di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi dimana persepsinya keliru terhadap guru bimbingan dan konseling. Kekeliruan ini misalnya guru bimbingan dan konseling sebagai penghukum siswa, polisi sekolah, menakutkan jika dipanggil guru bimbingan, dan lain-lain yang negatif. Padahal tujuan bimbingan dan konseling adalah **Pertama**, Tujuan utama dari bimbingan konseling adalah membantu individu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi mereka. Melalui proses ini, individu dapat memahami kekuatan, bakat, dan minat mereka yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. **Kedua**, Bimbingan konseling bertujuan untuk membantu individu mengembangkan keterampilan pribadi dan sosial yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini termasuk pengembangan keterampilan komunikasi efektif, kemampuan mengatasi konflik, peningkatan kepercayaan diri, pengelolaan emosi, dan pengembangan hubungan interpersonal yang sehat. menghadapi tantangan sehari-hari, **Ketiga**, Bimbingan konseling memiliki tujuan yang kuat dalam membantu individu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan karir yang baik. Ini melibatkan pemahaman tentang minat, nilai, dan kepribadian individu serta eksplorasi opsi karir yang sesuai, dan **terakhir**, Tujuan lain dari bimbingan konseling adalah membantu individu dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial yang mereka hadapi. Konselor memberikan dukungan dan panduan dalam pemecahan masalah, membantu individu mengidentifikasi sumber masalah, mengembangkan strategi penyelesaian masalah yang efektif, dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul. (Sutirna, 2013a); (Sutirna, 2021); (IPDN, 2023)

Selanjutnya pihak pemerintah yang belum peduli terhadap pentingnya layanan bimbingan dan konseling, khususnya di jenjang pendidikan sekolah dasar. Secara teori bahwa pendidikan yang terbaik untuk pondasi anak dimasa mendatang yaitu pada saat pendidikan dasar. **Golden age** merupakan periode penting dalam masa perkembangan anak. Masa golden age adalah masa emas pada anak-anak di awal kehidupannya yaitu pada usia 0-5 tahun. Fase ini penting untuk diperhatikan oleh orang tua karena pada fase ini pertumbuhan anak berkembang begitu pesat. Penelitian mengatakan sekitar 50% kecerdasan orang dewasa mulai terbentuk di usia 4 tahun. (Reny Yuli Aspiani, 2021); (Yulianto, 2022)

Berdasarkan permasalahan tentang keberadaan guru layanan bimbingan dan konseling di jenjang sekolah dasar, masyarakat (orang tua), dan pemerintah daerah penulis mencoba untuk mengkaji literatur sebagai solusi memperkuat pentingnya layanan bimbingan dan konseling harus dilaksanakan untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045.

2. Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang diambil dari berbagai sumber hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi nasional dan internasional. Teknik kajian literatur dianalisis berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian yang relevan, Hasil penelitian didasarkan kesimpulan-kesimpulan dari artikel yang dipublikasi dengan tiga kajian pentingnya bimbingan konseling untuk peserta didik di jenjang sekolah dasar, masyarakat (orang tua), dan pihak pemerintah (dinas pendidikan) yang selanjutnya disampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk pihak pemerintah daerah dalam rangka menyikapi pentingnya layanan bimbingan dan konseling.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Kajian Literatur

Hasil kajian literatur yang diambil dari publikasi jurnal terindeks Sinta Kemenristekdikti tentang pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, masyarakat, dan pihak pemerintah (dinas pendidikan) sebagai berikut:

3.1.1. Signifikan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar

Di bawah ini disajikan hasil literatur artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional yang terindeks sinta, google scholar, dan garuda kemdikbud tentang pentingnya layanan bimbingan dan konseling di jenjang pendidikan sekolah dasar. Ada enam artikel yang dijadikan sampel literatur untuk kajian pentingnya bimbingan dan konseling di jenjang pendidikan sekolah dasar.

Tabel 1. Publikasi Hasil Penelitian tentang Pentingnya Bimbingan dan Konseling bagi Peserta Didik di Jenjang Sekolah Dasar

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Kurnia Khoirunnisa, Peli Periska, Olin Yuanra, Fitria Dwi Cahyani, Atika Mahdia Pratiwi, Zubaidah. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP). Vol. 5 No. 1. Hal 59-62. Terindeks Sinta-5. Link: https://journal.al-matani.com/index.php/jkip/article/view/924/570	Pentingnya Layanan Bimbingan Konseling Bagi Peserta Didik Di SDN 106 Kota Bengkulu	Layanan bimbingan dan konseling di SDN 106 Kota Bengkulu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik mengatasi berbagai masalah memperkuat potensi mereka, dan mengatasi hambatan perkembangan. Meskipun terdapat kendala seperti tidak adanya guru khusus dan partisipasi orang tua yang rendah, upaya lebih besar diperlukan untuk meningkatkan penerapan layanan ini guna mendukung kesejahteraan holistik siswa dalam aspek emosional, sosial, akademis, dan profesional. (Khoirunnisa, Kurnia Periska et al., 2024)

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
2.	Anisa Rahman, Fadhillah Isnaini,, Robiatul Adawiyah Lubis, Umi Kalsum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Islam (IKABKI). Vol. 3 No. 1, Halaman 38-45. Terindeks Garuda. https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/almursyid/article/view/1172/787	Pentingnya Bimbingan Dan Konseling Bagi Peserta Didik Di Madrasah Ibtidaiyah	Betapa pentingnya bimbingan dan konseling untuk siswa sekolah dasar. Sehingga keberadaan guru bimbingan sangat diperlukan dalam pendidikan sekolah dasar. Disamping membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya, guru bimbingan dan konseling juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar agar layanan bimbingan dan konseling lebih maksimal lagi. Mengingat bahwa anak sering menemui hambatan dan permasalahan sehingga mereka banyak bergantung kepada orang lain, terutama orang tua dan guru. (Rahman et al., 2021)
3	Sari Nur Ariyanti, Indri Astuti ,Tulus Gover Siringo Ringo. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau	Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol. 6 No. 2. Halaman 1580 – 1588. Terindeks Sinta-4. Link: https://edukatif.org/edukatif/article/view/6081	Peran Penting Guru Bimbingan dan Konseling dalam Perkembangan Peserta Didik di Sekolah Dasar	Berdasarkan hasil diskusi mengenai pentingnya bimbingan dan konseling bagi anak-anak di lingkungan tersebut, dapat dikatakan bahwa konseling dan bimbingan sangat penting di sekolah dasar untuk membekali siswa dengan keterampilan hal-hal yang Anda butuhkan untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Mengantisipasi rencana masa depan. Selanjutnya pendidik bimbingan dan konseling akan bekerja sama erat dengan pengajar di kelas untuk memberikan nasehat dan bimbingan layanan guna memaksimalkan penyampaian layanan tersebut kepada siswa sekolah dasar. (Sari Nur Ariyanti; Indri Astuti; Tulus Gover Siringo Ringo, 2024)
4	Maryam Qonita, Kristina Betty Artati, Ani Musyarofah, Farah Wahyuni, Awaluddin Tjalla. Universitas Negeri Jakarta	Guidance: Jurnal Bimbingan dan Konseling. Vol. 19 No. 2. Halaman 106-120. Terindeks Sinta 4. Link: https://jurnal.uia.ac.id/guidance/article/view/2211	Pentingnya Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah Dasar Terhadap Perkembangan Peserta Didik	Pada umumnya di sekolah dasar tidak memiliki guru bimbingan dan konseling, guru kelaslah yang berperan ganda sekaligus sebagai guru BK. sehingga yang sering terjadi adalah ketidakmaksimalan dalam membantu memberikan bimbingan serta layanan untuk peserta didik. Agar peserta didik mampu menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik maka diperlukan peranan guru bimbingan dan konseling yang bersinergi dengan guru kelas yang tetap ambil bagian dalam melaksanakan layanan bimbingan bagi

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
				peserta didik juga berkolaborasi dengan orang tua agar bimbingan yang diberikan dapat terus berkesinambungan baik di sekolah maupun di rumah. (Maryam Qonita dkk, 2022)
5	<i>Haryatri, Universitas Terbuka Indonesia</i>	Jurnal Al-Taujih, Vol. 5 No. 1. Halaman 92-102. Terindeks Sinta 4. Link: https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attauij/article/view/758	Urgensi Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar	Bimbingan konseling di SD diperlukan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya. Selain itu guru bimbingan dan konseling juga akan membantu guru kelas dalam memberikan bimbingan dan pelayanan bagi siswa sekolah dasar agar layanan bimbingan dan konseling lebih maksimal lagi. Anak usia sekolah dasar memerlukan perhatian khusus agar siswa dapat mencapai prestasi belajar dan segenap potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan yang cukup berarti. (Haryatri, 2019)
6	<i>Sefhia Naila Sabrina, Zerlinda Veronica Amaliah, Rusmiyati Aliyyah. Mahasiswa PGSD Universitas Djuanda Bogor</i>	Jurnal Karimah Tauhid. Vol. 3 No. 9. Halaman 9905-9919/ Terindeks Google Scholar. Link: https://ojs.unida.ac.id/karimatauhid/article/view/14599/5801	Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar	Sekolah dasar biasanya tidak memiliki guru bimbingan dan konseling. Akibatnya, guru kelas berfungsi sebagai guru BK sekaligus, dan mereka seringkali tidak melakukan yang terbaik untuk membantu peserta didik mendapatkan bimbingan dan bantuan yang mereka butuhkan. Layanan BK di SD sangat penting dan bermanfaat bagi siswa. Siswa diharapkan dapat mencapai potensi terbaik mereka dan menjadi orang yang sukses di masa depan dengan layanan BK yang baik. Pada titik tertentu dalam hidup seseorang, apabila setiap siswa dapat menyelesaikan tugas perkembangan mereka dengan baik, itu akan membawa kebahagiaan, kesuksesan, dan membuka jalan untuk tugas perkembangan berikutnya. Oleh karena itu, guru kelas harus tetap menjalankan tugasnya sebagai guru bimbingan dan konseling sambil terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk mendampingi dan memahami kebutuhan semua siswa di kelasnya. (Sefhia Naila Sabrina, Zerlinda Veronica Amaliah, 2024)

3.1.2. Signifikan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Masyarakat (orang tua)

Selanjutnya hasil literatur untuk kajian pentingnya bimbingan dan konseling di masyarakat diambil 2 sampel artikel nasional terakreditasi sinta dan google scholar, 1 artikel internasional terindeks scopus Q4 di tahun 2023, dan 2 buku terindeks ISBN (*Nomor Buku Standar Internasional*) tentang pentingnya bimbingan dan konseling di masyarakat atau bimbingan dan konseling bagi orang tua sebagai guru pertama dan utama dilingkungan rumah.

Tabel 2. Publikasi Hasil Penelitian tentang Pentingnya Bimbingan dan Konseling bagi Masyarakat (Orang Tua)

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Adelia Santi Damanik Adelia, Audyna Ahmad Lubis, Muhammad Bayo, Radiah Izza Billah, Ahmad Syarqawi, dan Monadya Syiahfitri. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.	INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3672-3679. Terindeks Sinta 5. Link: https://i-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2158	Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Pada Masyarakat Di Desa Stabat Lama	Peran seorang konselor sangatlah penting baik bagi peserta didik maupun masyarakat. Sehingga sangat diperlukan bagi konselor agar melaksanakan kegiatan Sosialisasi di Masyarakat juga guna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap kegiatan pelayanan bimbingan konseling. (Adelia Santi Damanik, n.d.)
2	Yusuf Hasan Baharudin Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap	Jurnal Tawadhu, Vol. 5 No. 1. Tahun 2021. Halaman 35-43. Terindeks Google Scholar. Link: https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/twd/article/view/160/109	Profesi Bimbingan Dan Konseling Dalam Masyarakat	Khusus tentang implikasi profesi bimbingan konseling dalam masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan layanan konseling yang sifatnya sebagai profesi penolong atau pekerja sosial. Hasil dari pembahasan jurnal ini adalah konseling sebagai profesi konseling masyarakat (<i>profession counseling community</i>) adalah konsep yang melandasi peran dan fungsi konselor di masyarakat dewasa ini. Sejalan dengan dinamika kehidupan kebutuhan akan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada lingkungan sekolah saja. Dewasa ini sedang dikembangkan layanan konseling dalam setting yang lebih luas yaitu

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
				masyarakat yang di dalamnya ada keluarga, karir, lansia dan masyarakat lainnya sehingga konseling dalam masyarakat sangat dibutuhkan. (H. B. Yusuf, 2021)
3	Sutirna, Dadang Rahman Munandar, dan Kelik Waxhyudi. Universitas Singaperbangsa Karawang	<i>Journal of Higher Education Theory and Practice</i> . Vol. 23 No. 4. Tahun 2023. Halaman 101-113/ Terindeks Scopus Q4. Link: https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/5893	<i>Implementation of Guidance and Counseling Services in the Society Through FGD (Focus Group Discussion)</i>	<i>Based on the results and discussion in the earlier section, the researchers concluded that guidance and counselling services are indispensable for parents and their children in pursuing higher education. The implication and recommendation of this research are for related parties to implement program guidance and counselling services in society with various efforts from the coordination result among the education authorities, universities, and all volunteers who care about education.</i> (Sutirna et al., 2023)
4	Sri Yani, dkk. IAIN Bengkulu	PT. Cahaya Rahmat Rahmani, ISBN 978-632-884950-5.	Bimbingan dan Konseling di Masyarakat.	Buku ini membahas tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di masyarakat dan teknis pelaksanaan layanan bimbingan konseling di masyarakat. Dengan harapan buku ini akan menjadi menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi seluruh pembaca. (Sri Yani Dkk, 2023)
5	Sutirna, dkk. Universitas Singaperbangsa Karawang dan MGBK Kabupaten Karawang	PT. Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Press. ISBN 978-623-90423-8-7	Buku Ragam Kajian Layanan Bimbingan dan Konseling di Masyarakat	Layanan bimbingan dan konseling selama ini masih didominasi dilaksanakan di jalur pendidikan formal atau persekolahan. Dalam hal ini kita kaji mendalam bahwa di dunia pendidikan nonformal (luar persekolahan) seperti Program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C di mana peserta didiknya merupakan mereka yang memiliki permasalahan lebih kompleks dibandingkan dengan peserta didik yang berada di pendidikan formal. Hal disebabkan banyak faktor, di antaranya faktor ekonomi orang tua, perceraian orang tua, lingkungan tempat tinggal, letak geografis, <i>broken home</i> , kenakalan, kriminalitas dan narkoba, dan <i>drop out</i> sekolah dan masih banyak yang lainnya. Dengan memperhatikan latar belakang peserta didik di pendidikan nonformal dan ketidaktahuan orang tua (masyarakat)

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
				terhadap tujuan dan fungsi dari layanan bimbingan dan konseling, maka diperlukan usaha dan upaya dari pihak terkait untuk dapat mendorong agar layanan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan di pendidikan nonformal, agar mereka dapat menikmati hak pendidikan untuk semua sesuai dengan Deklarasi <i>Education for All</i> dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegrasi dari program pendidikan, baik itu untuk pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Oleh karena itu prinsip " <i>Guidance and Counseling for All</i> " harus dapat terimplementasikan, sehingga tidak terjadi adanya diskriminasi layanan pendidikan untuk semua. (Sutirna, 2022)

3.1.3. Signifikan kepedulian pemerintah (dinas pendidikan) dalam mendorong terlaksana layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar.

Dalam rangka memperkuat keberadaan layanan bimbingan dan konseling di Pendidikan Sekolah Dasar dan Peran Guru mata pelajaran (guru kelas) dalam melaksanakan perannya sebagai guru pembimbing, maka perlu naskah akademik (buku teori dan instruksi pimpinan) dan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat sehingga pihak pemerintah (khususnya pemerintah daerah – Dinas Pendidikan- untuk dapat mengambil langkah kepedulian pentingnya layanan bimbingan dan konseling berjalan di pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 3. Publikasi Hasil Penelitian tentang Pentingnya Bimbingan dan Konseling untuk Semua (Guidance and Counseling for All)

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Abdul Mu'ti (dalam Jalu Rahman Dewantar a. Reporter detik,Jogja/ Tanggal 13 November 2024)	Detik.com dengan online berita detikjogja. Tanggal 13 November 2024. Link: https://www.detik.com/jogja/kota-pelajar/d-7636507/abdu-l-muti-akan-perkuat-peran-guru-bk-tugasnya-	Perkuat Peran Guru BK: Tugasnya Bukan Menghukum Murid	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Hal ini dilakukan dengan semakin kompleksnya permasalahan psikologis yang dialami siswa, "Pada dasarnya guru sebagai konselor itu kan melekat di dalam Undang-undang guru dan dosen ya, jadi guru itu tidak sekedar mengajar tapi juga membimbing, maka dari itu peran guru sebagai pembimbing itu akan coba kita maksimalkan tentu nanti akan ada pelatihan konseling untuk para guru sehingga mereka ini selain sebagai pendidik yang mengajar di kelas

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
		bukan-menghukum-murid		masing-masing, di bidang studi masing-masing juga punya ketrampilan untuk konseling," ucap Mandikdasmen Abdul Mu'ti saat melakukan kunjungan kerja di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Galur, Kulon Progo, Rabu (13/11). (Dewantara, 2024)
2	Sutirna	Buku Bimbingan dan Konseling bagi Guru dan Calon Guru Mata Pelajaran	CV. Budi Utama (Deepublish) Yogyakarta ISBN 978-623-02-2369-3.	Buku Bimbingan dan Konseling (Bagi Guru dan Calon Guru Mata Pelajaran) Perkembangan dunia informasi dan teknologi semakin hari semakin tak terbayangkan oleh akal manusia sehingga hal tersebut akan berdampak sangat besar bagi dunia pendidikan. Dampak yang sangat dikhawatirkan oleh dunia pendidikan ketika peserta didik adalah dampak negatif dari pengaruh informasi dan teknologi yang cenderung ke arah prestasi belajar menurun, kepribadian yang tidak sesuai dengan harkat martabat bangsa Indonesia, dan hancurnya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling di pendidikan formal (persekolahan), pendidikan nonformal (luar sekolah), dan pendidikan informal (lingkungan keluarga) sangat diperlukan sebagai proteksi terhadap anak-anak kita semua terkena dampak negatif dari perkembangan informasi dan teknologi. Persepsi sebagian besar guru mata pelajaran, bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan tugas pokok dari guru Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan persepsi yang keliru sehingga bertumpuklah penanganan pelayanan di ruang bimbingan dan konseling. Padahal, dalam hal ini guru mata pelajaran pun memiliki peran sebagai pembimbing selain sebagai pengajar dan pendidik, kemudian guru mata pelajaranlah yang secara rutin setiap minggu bertemu dengan anak didiknya di kelas dibandingkan dengan guru bimbingan dan konseling. Permasalahannya, bagaimana cara memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran? Bagi guru Bimbingan dan Konseling memiliki ruang layanan bimbingan dan konseling. Bagi guru mata pelajaran

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
				dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling terintegrasi ketika memberikan materi pelajaran di dalam kelas melalui cerita dikaitkan dengan materi, melalui pendekatan yang humanistik dalam memberikan materi, melalui tutur kata bahasa yang digunakan, dan lain-lain. Sunaryo (2008) mengatakan pendidikan yang bermutu, efektif atau ideal adalah yang mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling. Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan instruksional dengan mengabaikan bidang bimbingan dan konseling maka hanya akan menghasilkan konseling yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian, (Sutirna, 2021)
3	Sutirna	Jurnal COUNS-Edu (The International Journal of Counseling and Education). Vol. .4, No.4, 2019, pp. 129-133. Terindeks Sinta-2.	<i>Subject teachers' perceptions of academic mentoring and counseling services</i>	<i>In developing students' potential requires, among others, psycho-education services. This effort can be provided not only by counselors but also by subject teachers at school. This research is aimed at investigating subject teachers' perceptions of academic guidance and counseling services provided by the teachers to students who had learning difficulties. Employing descriptive method, this research involved fifty counseling and guidance teachers to participate as research participants. To collect data, paper- and online-based questionnaires were used. The data gathered were then categorized and analyzed. The results indicated that the majority of the subject teachers have sufficient understanding on their roles in substantially providing academic guidance and counseling related to the students' academic problems. In addition, it was found that the counseling teachers always give the students referral to their respective teachers whenever the students get learning difficulties. (Sutirna, 2020)</i>

No	Nama	Jurnal	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian
4	Sutirna, Suprananto, Ika Rizki Meilya, Evi Karlina Ambarwati Universitas Singaperbangsa Karawang	Jurnal Abdimas Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Vol. 7 No. 2. Halaman 798- 806. Terindeks Sinta 3. Link: https://journal.umtas.ac.id/index.php/ABDI/MAS/article/view/4778/2116	<i>Empowering Subject Teachers' Professionalism Through Knowledge on Guidance and Counseling</i>	<i>Problems faced by students during the teaching-learning process are usually directed to the Guidance and Counseling Teachers. However, problems related to the students' understanding of subject matters are ideally handled by the subject's teachers. Therefore, subject teachers require knowledge and skill to guide and counsel students. The purpose of this community service program was to empower the role of subject teachers in counseling students' learning problems. The activity was carried out in the Focus Group Discussion (FGD) involving 48 junior high school teachers in Telukjambe District, Karawang Regency. The topics covered during FGD were theoretical concepts of Guidance and Counseling and practical implementation of counseling principles. The result of these activities is an increasing understanding among the subject teachers regarding the importance of skills in counseling. This program suggests the need for continuous professional development for subject teachers to increase their skill in counseling students. (Sutirna, Suprananto, Ika Rizqi Meylia, 2024)</i>
5	Sutirna	Makalah dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar Bimbingan dan Konseling, Universitas Singaperbangsa Karawang	<i>Guidance and Counseling for All.</i>	Bimbingan dan Konseling bukan hanya untuk peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang formal saja, melainkan untuk semua (<i>Formal Education, Non Formal Education, dan Informal Education</i>), Link: Video Orasi Ilmiah pada acara Pengukuhan Guru Besar Bimbingan dan Konseling di Universitas Singaperbangsa Karawang, pada tanggal 22 November 2023 adalah https://drive.google.com/drive/folders/1K6NPRlBxaKuzWAmZ_1UUXfPRqrhiwH2m

3.2. Pembahasan Hasil Studi Literatur

Dalam Permendikbud nomor 111/2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disebutkan bahwa Bimbingan dan Konseling sebagai bagian integral dari program pendidikan, merupakan upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. Dengan demikian pihak-pihak terkait (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), Lembaga-lembaga Pendidikan (*Formal dan Nonformal*), dan

Pendidikan Keluarga (*Informal Education*) seyogyanya dapat mengimplementasikan secara kontinu layanan pemberian bimbingan dan konseling bagi peserta didik/warga belajar/putra-putri di masing-masing ruang dan waktu.

Namun kenyataan di lapangan, misalnya di jenjang pendidikan sekolah dasar dengan keterbatasan tenaga guru bimbingan dan konseling, guru kelas sudah banyak tugasnya meng-cover semua mata pelajaran, dan persepsi keliru yang diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang tugas pembimbingan. Kenyataan ini diketahui berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian para dosen, mahasiswa, dan insan peduli pendidikan yang dipublikasi pada jurnal, prosiding, dan makalah-makalah di *website*. Padahal berdasarkan banyak kajian literatur menyampaikan bahwa layanan bimbingan dan konseling sangat penting diberikan sejak pendidikan dasar, sebagai pondasi peserta didik untuk menghadapi kemajuan perkembangan zaman yang semakin kompetitif,

Hal ini diperkuat oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti dalam sambutan dan kunjungan kerja di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Galur, Kulon Progo, Rabu (13/11) mengatakan bahwa penguatan peran guru sebagai konselor merupakan upaya untuk meminimalisir aksi negatif yang belakangan marak dilakukan oleh para pelajar. Hal tersebut disebabkan karena pelaku memiliki masalah pribadi, yang belum bisa tertangani oleh sekolah, khususnya para guru. "Ini karena kita melihat sekarang ini banyak masalah di lembaga pendidikan itu terkait dengan masalah psikologis para murid, kemudian juga persoalan kekerasan, persoalan kesulitan belajar, pengembangan bakat dan minat ini kan semuanya tugas konseling. Ini kan semuanya tugas konseling," ujarnya. Abdul mengatakan bimbingan konseling bagi para guru ini akan diprioritaskan kepada guru Bimbingan dan Konseling (BK). Cara ini bisa menambah kemampuan konseling para guru terutama Guru BK dalam menangani persoalan siswa, serta menghapus stigma bahwa guru BK yang dinilai tugasnya hanya memberi hukuman semata. (J. R. Dewantara, 2024)

Dengan demikian jelas sekali bahwa layanan bimbingan dan konseling harus terlaksana sejak pendidikan dasar, apalagi dengan keadaan sekarang pengaruh informasi teknologi (internet) tidak bisa kita abaikan keberadaannya atau dengan bahasa lain tidak bisa dibendung dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, sehingga diperlukan bimbingan dan konseling. Sutirna (2023) dalam orasi ilmiahnya menyampaikan bahwa bimbingan dan konseling, jika dilaksanakan di seluruh *setting* kehidupan, maka Indonesia Emas 2045 akan tercapai. <https://www.youtube.com/watch?v=Y2l4W1Kv3Jo> Selanjutnya pentingnya pendidikan diperkuat oleh podcast penulis di Radio Sturada Kabupaten Karawang pada tanggal 15 Mei 2025 disampaikan bahwa pendidikan sangat penting bagi siswa untuk masa depannya. <https://www.youtube.com/watch?v=WdhBSmDw1so&t=155s>

Bagaimana dengan masyarakat atau orang tua dengan layanan bimbingan dan konseling? Hal ini tidak boleh diragukan lagi peran orang tua dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Dalam Agama Islam sudah diinformasikan oleh Allah SWT dalam Surat Al-'Ashr · Ayat 3, yaitu:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

illalladzîna âmanû wa 'amilush-shâlihâti wa tawâshau bil-haqqi wa tawâshau bish-shabr
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. (Q:S. Al-'Ashr, Ayat 3)

Begitu pula para penganut agama dan kepercayaan di Indonesia semua memiliki peran dan tugas orang tua membimbing para putra-putrinya untuk menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan agama serta kepercayaannya. Oleh karena itu peran orang tua sebagai pembimbing merupakan kewajiban, pendidikan keluarga merupakan pintu utama untuk hidup dan kehidupan di kancah pergaulan manusia.

Bahkan Bapak Pendidikan Indonesia K.H. Dewantara telah memberikan pondasi dalam menyelenggarakan pendidikan secara umum disebut dengan Trilogi Pendidikan yaitu "Ing Ngarso

Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”, ketika kita berada di depan harus menjadi teladan bagi anak-anak, jika kita berada di tengah, harus memberikan daya (kekuatan) jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak, dan jika kita berada di belakang harus menjadi motivator yang mendorong ke arah kebaikan dan kesuksesan.(Sutirna dan Asep Samsudin, 2015); (Yusvi Maryam Uffa, 2023)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 10 dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang belum optimal terlaksana di jenjang pendidikan sekolah dasar wajib menjadi perhatian khusus, karena banyak hasil penelitian menyampaikan bahwa bimbingan dan konseling sangat penting bagi peserta didik dalam mempersiapkan diri peserta didik di masa mendatang.

Penulis sejak tahun 2012 telah banyak melakukan penelitian dan pengabdian bahkan menulis buku tentang bimbingan dan konseling dengan tujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan bagi guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, guru kelas, dan masyarakat agar mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling terlaksana di seluruh *setting* aktivitas. Oleh karena itu, di akhir pembahasan hasil kajian literatur ini, penulis merekomendasikan kepada pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah mengantisipasi realita tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Tabel 4. Rekomendasi Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah

No.	Komponen Pendidikan	Realita	Solusi	Keterangan
1.	Guru Sekolah Dasar	Hampir semua Sekolah Dasar tidak memiliki Guru Bimbingan dan Konseling	Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk memberikan pelatihan/ <i>workshop</i> kepada guru kelas secara berkelanjutan tentang Teori dan Praktik sebagai Pembimbing.	Kolaborasi dengan Dosen Bimbingan dan Konseling dan MGBK Kab/Kota,
2.	Orang Tua (Masyarakat)	Penelitian dan Pengabdian Dosen, Mahasiswa, dan Instansi Pemerintah belum optimal di desa/kelurahan	Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk bekerja sama dalam Penelitian dan Pengabdian Dosen. Mahasiswa secara khusus dalam area pemberian bimbingan dan konseling bagi masyarakat.	Kolaborasi Pemda, Dinas Pendidikan, Instansi Pemerintah Terkait, Perguruan Tinggi
3.	Pemerintah Kab/Kota	Tingkat kepedulian masih belum optimal terhadap kegiatan	Buat rencana program penguatan pelaksanaan bimbingan dan konseling	Kolaborasi dengan Dosen Bimbingan dan Konseling dan MGBK Kab/Kota

No.	Komponen Pendidikan	Realita	Solusi	Keterangan
		layanan Bimbingan dan Konseling	konseling bagi pendidikan sekolah dasar	yang diprogramkan Dinas Pendidikan

Rekomendasi ini diharapkan pihak-pihak terkait khususnya merencanakan kegiatan-kegiatan ini melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, khususnya dalam pelaksanaan pelatihan implementasi layanan bimbingan konseling bagi guru sekolah dasar, masyarakat, dan para pimpinan atau penyelenggara sekolah formal dan informal, sehingga keberlanjutan studi literatur ini akan berdampak dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Karawang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling di jenjang pendidikan sekolah dasar, masyarakat (orang tua), dan pemerintah (dinas pendidikan kab/kota) yaitu (1) Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk memberikan pelatihan/ *workshop* kepada guru kelas secara berkelanjutan tentang Teori dan Praktik sebagai Pembimbing, (2) Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk bekerja sama dalam Penelitian dan Pengabdian Dosen. Mahasiswa secara khusus dalam area pemberian bimbingan dan konseling bagi masyarakat, dan (3) Buat rencana program penguatan pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi pendidikan sekolah dasar.

Daftar Pustaka

- Adelia Santi Damanik, dkk. (n.d.). Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Pada Masyarakat Di Desa Stabat Lama. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 3672-3679. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/issue/view/8>
- Dewantara, A. (2022). *Meningkatkan level leadership seorang pemimpin*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13426/Kiat-Memiliki-Kemampuan-Berkomunikasi-yang-Baik.html>. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15086/Meningkatkan-level-leadership-seorang-pemimpin>
- Dewantara, J. R. (2024). *Abdul Mu'ti Akan Perkuat Peran Guru BK: Tugasnya Bukan Menghukum Murid*. *detikjogya*. https://www.detik.com/jogja/kota-pelajar/d-7636507/abdul-muti-akan-perkuat-peran-guru-bk-tugasnya-bukan-menghukum-murid#google_vignette
- Haryatri. (2019). Urgensi Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar. *Al Taujin (Bingkai Bimbingan Konseling Islami)*, 5(1), 92–102. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/article/view/758>
- IPDN. (2023). *Tujuan Bimbingan dan Konseling*. Unit BK IPDN. <https://bimling.ipdn.ac.id/tujuan#:~:text=Pertama%2C Tujuan utama dari bimbingan,tujuan hidup yang lebih baik>
- Kartadinata, S. (2012). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (1 ed.). Pedagogiana Press.
- Khoirunnisa, Kurnia Periska, P., Yuanra, O., Cahyani, F. D., Atika, Pratiwi, M., & Zubaidah. (2024). The Importance Of Guidance And Counseling Services For Students At SDN 106 Bengkulu City. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(1), 59–62. <https://journal.al-matani.com/index.php/jkip/article/view/924/570>
- Lani, S. Y. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (19 ed.). PT. Rosda Karya Bandung. <https://inlisilite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=23415>
- Maryam Qonita dkk. (2022). Pentingnya Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar Terhadap Perkembangan Peserta Didik. *Guidance: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 19(02), 106–120. <https://jurnal.uia.ac.id/index.php/guidance/article/view/2211/1267>
- Noor, M. (2019). *Aliran Pendidikan*. kalsel.kemenag.go.id. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/675/Mengenal-Aliran-Aliran-Klasik-#:~:text=Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan,yang diterimanya sejak kecil>
- Novka, V. K. (2021). *Sejarah Hidup Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional*. *Klasika.kompas.id*. <https://klasika.kompas.id/baca/sejarah-ki-hadjar-dewantara-bapak-pendidikan-nasional/>
- Nurikhshan, A. J. (2021). *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*. Reflika Aditama Bandung. https://books.google.co.id/books/about/Strategi_Layanan_Bimbingan_Dan_Konseling.html?id=WX7Zz

- wEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
- Rahman, A., Isnaini, F., Lubis, R. A., & Kalsum, U. (2021). PENTINGNYA BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI PESERTA DIDIK DI MADRASAH IBTIDAIYAH. *Al Mursyid*, 3(2), 37–46. <https://media.neliti.com/media/publications/363104-none-0b8a3775.pdf>
- Reny Yuli Aspiyani. (2021). *Mengenal Masa Golden Age bagi Anak*. Dinas Kesehatan Provinsi NTB. <https://dinkes.ntbprov.go.id/berita/mengenal-masa-golden-age-pada-anak/>
- Sari Nur Ariyanti; Indri Astuti; Tulus Gover Siringo Ringo. (2024). Peran Penting Guru Bimbingan dan Konseling dalam Perkembangan Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 1580–1588. <https://edukatif.org/edukatif/article/view/6081/pdf>
- Sefhia Naila Sabrina, Zerlinda Veronica Amaliah, R. R. A. (2024). LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH DASAR. *Karimah Tauhid*, 3(9), 9905. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/14599/5801>
- Sri Yani Dkk. (2023). *Bimbingan dan Konseling di Masyarakat* (Pertama). PT. Cahaya Rahmat Rahmani. chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcglclefindmkaj/http://repository.uinsu.ac.id/18546/1/Bimbingan_Konseling_di_Masyarakat.pdf
- Sutirna, Suprananto, Ika Rizqi Meylia, E. K. A. (2024). Empowering Subject Teachers' Professionalism Through Knowledge on Guidance and Counseling. *AbdimasUmtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 798–806. <https://journal.umtas.ac.id/index.php/ABDIMAS/article/view/4778/2116>
- Sutirna. (2013a). *Bimbingan dan Konseling (Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal)*. Andy Offset.
- Sutirna. (2013b). *Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik* (P. Christian (ed.); 1 ed.). Andy Offset.
- Sutirna. (2020). Subject teachers' perceptions of academic mentoring and counseling services. *COUNS-EDU* ☐ *The International Journal of Counseling and Education*, 4(4), 129–133. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.23916/0020190423040>
- Sutirna. (2021). *Bimbingan dan Konseling (Bagi Guru dan Calon Guru Mata Pelajaran)* (Pertama). Deepublish (CV. Budi Utama). https://books.google.co.id/books/about/Bimbingan_Dan_Konseling_Bagi_Guru_Dan_Ca.html?id=kXskEAAQBAJ&redir_esc=y
- Sutirna. (2025). *Guidance and Counseling for All* (B. Ismaya (ed.); 1 ed.). CV. Saba Desa. [https://drive.google.com/drive/search?q=Guidance and Counseling for all](https://drive.google.com/drive/search?q=Guidance+and+Counseling+for+all)
- Sutirna, dkk. (2022). *Ragam Kajian Layanan Bimbingan dan Konseling di Masyarakat: (Bunga Rampai Hasil Kajian Penelitian dan Pengabdian Tentang Bimbingan dan Konseling di Masyarakat) Authors* (Pertama). ITK Press. <https://itkpress.itk.ac.id/index.php/home/catalog/book/14>
- Sutirna dan Asep Samsudin. (2015). *Landasan Kependidikan (Teori dan Praktek)* (M. D. Wildani (ed.); Pertama). Refika Aditama. www.refika_aditama.com
- Sutirna, Rahman, D., & Wachyudi, K. (2023). Implementation of Guidance and Counseling Services in the Society Through FGD (Focus Group Discussion). *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(4), 101–114. <https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/5893/5587>
- Yulianto, H. S. (2022). *50 Kata-kata tentang Membaca, Membuka Pikiran dan Jendela Dunia*. <https://www.bola.com/>. <https://www.bola.com/ragam/read/4366825/50-kata-kata-tentang-membaca-membuka-pikiran-dan-jendela-dunia>
- Yusuf, H. B. (2021). Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Masyarakat. *Tawadhu*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/twd.v5i1.160>
- Yusuf, S. (2019). *Psikologi perkembangan anak dan remaja* (Cetakan Ke). Rosda Karya Bandung. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=23415>
- Yusvi Maryam Uffa. (2023). *Mengulik Makna Dari Trilogi Ki Hadjar Dewantara Sebagai Semboyan Pendidikan , Ki Hadjar Dewantara Mewariskan Tiga Sifat Yang Harus Dimiliki Oleh Pemimpin*. Indonesian Haritge Agency. <https://vredeburg.id/id/post/mengulik-makna-dari-trilogi-ki-hadjar-dewantara-sebagai-semboyan-pendidikan-ki-hadjar-dewantara-mewariskan-tiga-sifat-yang-harus-dimiliki-oleh-pemimpin>

Pengembangan Ekonomi Biru dengan Ta'awun Kemitraan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pantai Pasir Putih Karawang

Blue Economy Development with Mutual Assistance Partnership to Increase Economic Growth of the Karawang White Sand Beach Community

Yudi Kristanto¹

¹STIE Budi Pertiwi, Karawang

email: yudi.kristanto@pertiwi.ac.id

ABSTRAK

Latar Belakang : Ekonomi Biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan mata pencaharian yang seiring dengan pelestarian ekosistem laut. (Maeyangsari, 2023). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berpotensi menjadi poros maritim dunia. (Donesia et al., 2023) Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia dengan garis pantai sepanjang 61.567 mil atau 99.083 km. (Alfarizi, 2024) Konsep blue economy atau ekonomi biru merupakan pendekatan yang semakin relevan dalam mengatasi berbagai tantangan di kawasan pesisir, termasuk wilayah terpencil yang memiliki potensi laut dan perairan yang melimpah. (Policy et al., 2024). **Tujuan :** untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar Pantai Pasir Putih Cilamaya Kulon Karawang. **Metode :** Penelitian Kualitatif dan Penelitian Pengembangan (R & D) dengan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan dengan konsep ekonomi biru. Luaran yang ditargetkan adalah Jurnal penelitian yang *dipublish* pada Jurnal Ilmiah Karawang (JIKA) serta seminar dan diseminasi nasional dan *rule* model ekonomi biru berbasis ekonomi putih (syari'ah). **Hasil** penelitian adalah potensi ekonomi biru di Pantai Pasir Putih Cilamaya Kulon sudah berkembang dari mulai usaha eksplorasi ikan oleh nelayan, perahu penyebrangan ke arah pantai, UMKM produksi kerupuk rajungan serta pedagang di area pantai. **Kesimpulan :** Potensi ekonomi biru belum sepenuhnya menggandeng bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lain sebagai wujud ekonomi putih yang bebas dari riba serta belum melaksanakan prinsip ta'awun kemitraan antar pelaku usaha.

Kata kunci : Ekonomi Biru, Ekonomi Putih, Ta'awun Kemitraan

ABSTRACT

Background: Blue Economy is a concept of utilizing marine resources for economic growth, improving livelihoods and livelihoods that go hand in hand with the preservation of marine ecosystems. (Maeyangsari, 2023). Indonesia is the largest archipelagic country in the world with the potential to become the world's maritime axis. (Donesia et al., 2023) Indonesia is the second largest maritime country in the world with a coastline of 61,567 miles or 99,083 km. (Alfarizi, 2024) The concept of blue economy is an increasingly relevant approach in overcoming various challenges in

coastal areas, including remote areas that have abundant marine and water potential. (Policy et al., 2024). Method: Qualitative Research and Research and Development (R & D) with the development of the people's economic sector with the concept of a blue economy. The targeted output is a research journal published in the Karawang Scientific Journal (JIKa) as well as national seminars and dissemination and a rule model for a blue economy based on a white economy (sharia). Objective: to increase the economic growth of the community around Pasir Putih Beach, Cilamaya Kulon, Karawang. The results of the study are that the potential for the blue economy in Pasir Putih Beach, Cilamaya Kulon has developed from the start of fish exploration efforts by fishermen, boats crossing to the beach, UMKM producing crab crackers and traders in the beach area. Conclusion: The potential for the blue economy has not fully involved Islamic banks and Islamic financial institutions such as Islamic cooperatives and other Islamic financial institutions as a form of white economy that is free from usury and has not implemented the principle of ta'awun partnership between business actors.

Keywords: *Blue Economy, White Economy, Mutual Assistance Partnership*

1. Pendahuluan

Ekonomi Biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan mata pencaharian yang seiring dengan pelestarian ekosistem laut.(Maeyangsari, 2023). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berpotensi menjadi poros maritim dunia.(Donesia et al., 2023) Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia dengan garis pantai sepanjang 61.567 mil atau 99.083 km.(Alfarizi, 2024)

Konsep *blue economy* atau ekonomi biru merupakan pendekatan yang semakin relevan dalam mengatasi berbagai tantangan di kawasan pesisir, termasuk wilayah wilayah terpencil yang memiliki potensi laut dan perairan yang melimpah.(Policy et al., 2024)

Potensi besar di perairan Indonesia ini, baik di laut dan pesisir tentunya merupakan salah satu indikator yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tidak hanya optimalisasi sumber daya perairan saja tetapi juga harus tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelanjutan lingkungan.(Luturmas et al., 2024). Konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang saat ini sedang diterapkan oleh negara-negara di dunia memiliki salah satu prinsip, yaitu prinsip ke-14, Ekosistem Kelautan, dengan salah satu konsepnya, yaitu ekonomi biru.(Andaiyani et al., 2024)

Ekonomi kelautan di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi nasional di beberapa negara Asia Tenggara, mencapai 22% untuk Vietnam dan 15% untuk Indonesia.(Gusrah et al., 2024). Perekonomian kelautan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global.(Erianto et al., 2024)

Potensi pemanfaatan sektor maritim Indonesia sangat besar, namun belum termanfaatkan dengan optimal. Dalam upaya pengembangan sektor maritim, Indonesia menghadapi tantangan untuk dapat meningkatkan perekonomian di sektor maritim, namun juga harus menjaga kelestarian yang ada, yang tertuang dalam konsep *blue economy*.(Apriliana et al., 2024). Ekonomi Biru (Blue Economy) adalah sebuah konsep ekonomi yang mencoba untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip alami dan lokal.(Wibowo et al., 2022). Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,01 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia.(Rita & Dwi, 2023)

Dalam menjaga integritas di wilayah perairannya, Indonesia memiliki lima pilar untuk memperkuat sektor maritimnya, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya yang memperhatikan ekosistem kelautan.(Maria et al., 2024). Konsep ekonomi biru merupakan model pendekatan yang tidak lagi mengandalkan pembangunan dengan melakukan eksploitasi sumber

daya alam serta lingkungan yang berlebihan.(Setyawati et al., 2021). Integrasi antara isu berkelanjutan dan ekonomi biru akan melahirkan pengetahuan baru yang berpotensi membawa dampak perubahan positif bagi sebuah bangsa.(Ervianto, 2018). Pendekatan ekonomi biru bertujuan untuk menggabungkan peluang pembangunan berbasis kelautan dan perikanan dengan pengelolaan lingkungan.(Khoiriyah, 2024)

Ide Ekonomi Biru secara efektif memanfaatkan sumber daya alam tanpa limbah sekaligus memberikan dampak sosial yang signifikan. sistem produksi yang ramah lingkungan, berkelanjutan lingkungan, inovatif, dan telah mengadopsi teknologi hijau.(Rektor, 2022)

Ekonomi Biru berusaha menggabungkan peluang pembangunan berbasis laut dan perikanan dengan pengelolaan lingkungan. "Ekonomi Biru" merupakan hasil konsensus global dari Konferensi Rio+20 tahun 2012 yang didasarkan pada premis bahwa ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan akan lebih produktif, dan ini merupakan keharusan bagi implementasi ekonomi berbasis laut.(Damanik et al., 2023)

Mengenai kajian prinsip ekonomi biru, telah banyak penelitian yang mengkaji hal tersebut. (Voyer et al, 2018), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hadirnya prinsip ekonomi biru sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara eksploitasi kelautan dan isu mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan laut.(Darajati, 2024). Meskipun ekonomi biru mempunyai potensi untuk berperan dalam pembangunan kelautan yang berkelanjutan, hingga saat ini praktik-praktik untuk menerapkan konsep ekonomi biru jumlahnya masih relatif terbatas.(Sujiwo & Nurlaili, 2024). Pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah diupayakan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.(Setyawati et al., 2021).

Sangat disayangkan pengelolaan potensi kelautan di daerah-daerah kepulauan nampaknya belum didukung inovasi yang dipadupadankan dengan kearifan lokal yang didorong oleh partisipasi masyarakat.(Saksono, 2013). Ekonomi biru akhir-akhir ini menjadi isu penting karena lautan yang sehat menyediakan lapangan kerja dan pangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, mengatur iklim dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.(Dian et al., 2023). Istilah "Ekonomi Biru" semakin menjadi komponen integral dari tata kelola laut (*ocean governance*) dalam bahasa sehari-hari selama dekade terakhir sejak kemunculannya di Konvensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD) 2012 atau Konferensi Rio + 20.(Wangke, 2021)

Konsep ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada poin ke-14: Life Below Water yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem perairan, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, serta memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat pesisir.(Dwi & Ananda, 2024). Pada tahun 2010 diperkenalkan konsep "*Blue Economy*" oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul *The Blue Economy : 10 years, 100 innovations, and 100 million jobs*. Buku yang sangat inspiratif ini mengilhami sebuah konsep yang seolah mengajak masyarakat global untuk merubah paradigma bagaimana mengelola sumber daya alam secara optimal, arif dan berkelanjutan.(Mawar, Sip, Map Fisip Univ. Muhammadiyah Jakarta, n.d.)

2. Metodologi

Pendekatan: Pendekatan pemecahan masalah yang telah dirumuskan adalah pendekatan ekonomi syariah karena selama ini praktik ekonomi kerakyatan pada umumnya menggunakan ekonomi konvensional, belum mengoptimalkan pendekatan ekonomi syariah padahal jika dianalisa secara mendalam bahwa salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi itu adalah kembali kepada konsep berkah yang dijelaskan dalam Al Quran surat Al A'rof : 96. Berkah itu prinsipnya adalah bertumbuh dan bertambah dan membawa kebermanfaatn. Penelitian ini adalah akulturasi dari skema strategi penelitian yang amanatnya harus mengusung tema-tema yang ada kebermanfaatn untuk solusi persoalan salah satunya persoalan ekonomi kerakyatan dengan mengusung tema

ekonomi biru diakulturasikan dengan prinsip solusi syariah dengan pendekatan ekonomi putih yaitu ekonomi berbasis syariah yang juga sebagai sokoguru perekonomian nasional dan ta'awun kemitraan yang intinya kolaborasi antar pelaku usaha UMKM di sekitar pantai dengan prinsip mu'amalah berupa ta'awun (tolong menolong) dalam kebaikan (usaha).

Strategi: Strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan adalah dengan strategi dakwah dengan mengajak masyarakat khususnya para pelaku usaha (UMKM) sekitar pantai Pasir Putih agar kembali kepada praktik ekonomi syariah yang tidak mengenal bunga bank agar terhindar dari riba yang prinsipnya mengurangi sisi keberkahan perekonomian juga strategi kedua yaitu dengan pendekatan kolaborasi kemitraan dengan prinsip ta'awun (tolong menolong) antar pelaku usaha (UMKM) sekitar pantai Pasir Putih dimana sebagian mereka menjadi mitra usaha untuk sebagian yang lain dengan membangun mu'amalah yang syari'ah seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain.

Metode: Penelitian Kualitatif dengan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan dengan konsep ekonomi biru. Luaran yang ditargetkan adalah Jurnal penelitian yang di-*publish* pada Jurnal Ilmiah Karawang (JIKA) serta seminar dan diseminasi nasional dan *rule* model ekonomi biru berbasis ekonomi putih (syari'ah). Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Pasir Putih Cilamaya Kulon Karawang sekitar 3 bulan dari bulan Januari s.d Maret 2025 dengan subjek dan informannya adalah para pelaku usaha yang beroperasi di sekitar Pantai Pasir Putih Cilamaya Kulon Karawang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan validitas, konfirmabilitas, dependabilitas, reduksi, dan *display* data serta konklusi dari hasil redaksi data.

Penggunaan data dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang menjadi informan adalah para pelaku usaha di sekitar pantai dan partisipan adalah peneliti sendiri yang dibantu oleh mahasiswa sebagai observer partisipan untuk mengamati konteks sosial yang terjadi. Informasi tentang pengumpulan data yaitu pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lapangan dengan melakukan observasi partisipatif ke dalam konteks penelitian dan dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yaitu para pelaku usaha seputar pantai dan nelayan yang dianggap kompeten dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penjelasan tentang analisis data dilakukan dengan analisis tematik yaitu analisis yang dilakukan sesuai tema-tema yang relevan dengan tujuan pengembangan penelitian dan analisis naratif dengan menceritakan secara narasi berdasarkan kronologis kejadian ketika mengumpulkan data di lapangan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Hasil yang ditemukan berdasarkan data dan fakta di lapangan melalui metodologi penelitian yang menggunakan triangulasi sumber (orang, tempat, dan konteks sosial) dan triangulasi metode (wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi) ini adalah sebagai berikut :

- a. Potensi usaha di sektor kelautan sudah berkembang hal ini terbukti dari banyak nya usaha yang tumbuh di sekitar pantai pasir putih mencapai lebih dari 25 pelaku usaha dan meningkat sekitar 25% dari periode tahun sebelumnya
- b. Pertumbuhan ekonomi sudah mengalami peningkatan hal ini terlihat dari banyak nya pengunjung wisata pantai pasir putih yang mengalami peningkatan 20% khusus nya di musim liburan
- c. Sudah kembali ke sistem ekonomi syari'ah, hal ini terlihat dari proses pembiayaan usaha seputar pantai melalui bekerja sama kemitraan dengan bank syai'ah, koperasi syariah dan baznas melalui pembiayaan syariah dan menghindari bank 'emok' dengan sistem rentenir. Kemudian laba hasil usahanya sebanyak 2,5% dikeluarkan zakat mall nya ke Baznas

- d. Sudah komprehensifnya kesadaran dan peningkatan peran serta masyarakat dalam membayar zakat mal hal ini dibuktikan dari data potensi pemasukan dari sektor usaha kelautan yang masih sudah nampak.
- e. Data pelaku usaha secara keseluruhan di Cilamaya Kulon berdasarkan dari hasil triangulasi yang meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi adalah tersaji dalam data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelaku Usaha Menurut Usia di Kecamatan Cilamaya Kulon

USIA	JUMLAH
<15	-
15-24	67
25-34	650
35-44	1 443
45-54	2 233
55-64	1 660
>= 65	906
	6 959

Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus BPS

3.2. Pembahasan

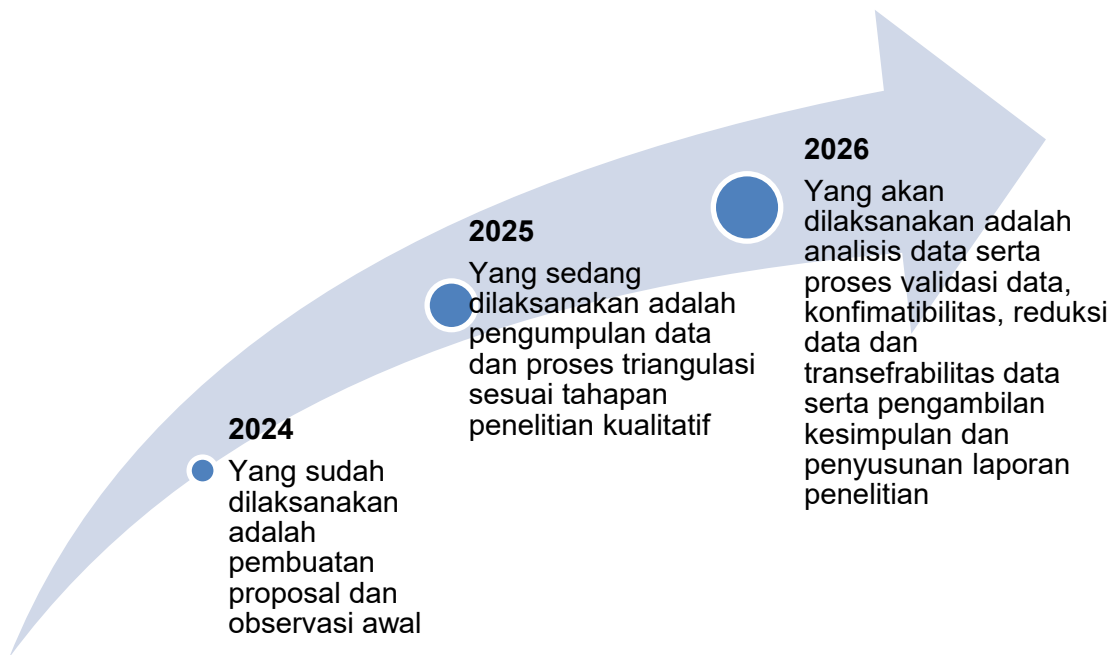
State of the Art dan Kebaruan yang menjadi keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama adalah bahwa penelitian ini menggunakan sistem ekonomi syari'ah yang ditawarkan dan ada muatan dakwahnya supaya muncul keberkahan dan menjadi solusi bagi persoalan selama perekonomian selama ini. Kebaruan usulan dari aspek **pendekatan** adalah dengan menggunakan pendekatan dakwah dengan mengajak orang (masyarakat pelaku usaha/UMKM) untuk kembali ke ekonomi syariah dengan menjauhi riba dan mengajak mereka para pelaku usaha untuk mengeluarkan zakat mal dari hasil usahanya yang sudah mencapai nishab agar berkah (bertumbuh dan bertambah) sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi benar-benar tercapai. **Metode** yang digunakan adalah dengan metode dakwah mu'amalah yaitu dengan metode ta'awun kolaborasi kemitraan (musyarakah, mudharabah, dll) antar pelaku usaha (UMKM) yang ada di sekitar Pantai Pasir Putih Cilamaya Kulon Karawang.

Peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Tahapan yang telah dicapai : adalah observasi ke tempat penelitian bahwa disana terlihat banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi

Tahapan yang akan dilakukan : adalah dengan melaksanakan penyuluhan dan pendampingan tata kelola usaha seputar pantai dengan prinsip ekonomi putih (syariah) dengan menggandeng kemitraan dari bank syariah dan lembaga ekonomi syariah seperti BAZNAS dan koperasi syari'ah

Tahapan yang direncanakan : adalah membuat suatu program pendampingan dan penyuluhan terstruktur dengan membahas sistem ekonomi putih dalam perekonomian biru (kelautan) lalu dari luaran karya jurnal yang dihasilkan akan didiseminasikan dengan seminar nasional dan hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi *role model* (percontohan) dalam penerapan ekonomi putih (syariah) untuk dakwah *positioning* perlu adanya contoh *role model* yang telah sukses untuk menjadi bukti kebenaran Al Quran terkait takwa penyebab keberkahan (pertumbuhan ekonomi)



Proses : Penyusunan proposal, penelitian, pendampingan, penulisan laporan penelitian, *publish* jurnal nasional terakreditasi, diseminasi nasional, dan seminar nasional

Luaran : Jurnal Ilmiah Karawang (JIK), diseminasi dan seminar nasional, *role model* ekonomi biru berbasis ekonomi putih

Indikator capaian yang ditargetkan : Potensi usaha di sektor kelautan bisa dikembangkan, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, kembali ke sistem ekonomi syari'ah, masyarakat anti riba, kesadaran membayar zakat mal

Anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian : Ketua tim bertanggung jawab dalam proses secara keseluruhan, anggota tim dosen membantu proses pengumpulan data dan analisis data di lapangan pada saat penelitian di lapangan, anggota tim mahasiswa membantu dalam proses pendampingan secara umum di awal, inti, dan akhir pelaksanaan penelitian.

4. Kesimpulan

Berdasarkan triangulasi sumber (orang, tempat, dan konteks sosial) dan triangulasi metode (wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi) dapat diperoleh temuan sebagai berikut :

- Potensi ekonomi biru sudah terlihat menggeliat di Pantai Pasir Putih Cilamaya Kulon Karawang hal ini terbukti dari beberapa unit usaha yang ada di seputar lokasi penelitian seperti perdagangan, perahu penyebrangan, produksi kerupuk rajungan, nelayan, tambak ikan, dan lain-lain
- Potensi ekonomi biru belum sepenuhnya menggandeng bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lain sebagai wujud ekonomi putih yang bebas dari riba
- Potensi ekonomi biru belum melaksanakan prinsip ta'awun kemitraan antar pelaku usaha sehingga lebih mudah berkembang jika hal itu dilaksanakan
- Implementasi dan penerapan ekonomi putih diimplementasikan pada proses pembiayaan usaha seputar pantai melalui bekerja sama kemitraan dengan bank syai'ah, koperasi syariah dan baznas melalui pembiayaan syariah dan menghindari bank 'emok' dengan sistem rentenir. Kemudian laba hasil usahanya sebanyak 2,5% dikeluarkan zakat mall nya ke Baznas

- e. Kebaruan (*novelty*) dari hasil penelitian ini adalah penerapan ekonomi putih yaitu ekonomi yang berbasis syariah dengan pembiayaan syariah yaitu pembiayaan menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dan menghindari pembiayaan riba serta sistem pembayaran zakat mall agar usahanya berkah dan meningkat, hal ini yang membedakan dengan penelitian lain yang belum pernah menerapkan sistem ekonomi putih

5. Rekomendasi

- a. Perlu adanya penguatan kerja sama pelaku usaha dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, baznas, dan lain-lain untuk *support* pengembangan usaha
- b. Perlu pendampingan dan pembinaan dari dinas koperasi dan UMKM agar dapat lebih dikembangkan lagi prinsip ta'awun kemitraan dan digali lebih banyak potensi usaha di seputar pantai
- c. Potensi ekonomi biru belum melaksanakan prinsip ta'awun kemitraan antar pelaku usaha sehingga lebih mudah berkembang jika hal itu dilaksanakan.

Keterbatasan studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam hal waktu dan jarak. Peneliti menyadari bahwa waktu yang digunakan untuk proses penelitian ini adalah 3 bulan belum leluasa untuk mengeksplor permasalahan serta kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga masalah yang di bawa peneliti cenderung tetap dan belum berhasil menemukan perkembangan masalah atau temuan baru dalam penelitian. Cara meningkatkan pembelajaran atau mengembangkan pengetahuan dalam penelitian ini adalah dengan menambah waktu penelitian dan personil pembantu penelitian di lapangan dari kalangan mahasiswa sehingga waktunya bisa leluasa untuk mengeksplor kemungkinan masalah yang berkembang di lapangan.

Daftar Pustaka

- Alfarizi, M. (2024). Sustainable Blue Economy of the Riau Islands: Challenges, Opportunities, and Strategic Steps Based on the Penta Helix. *Jurnal Archipelago*, 03(1), 1–15.
- Andaiyani, S., Marwa, T., & Nurhaliza, S. (2024). Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan: Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(1), 69–85.
- Apriliana, T., Fathonah, A. N., & Ali, M. (2024). Blue Economy dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 512. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1528>
- Damanik, R., Noor, R., Muliawan, I., Arman, & Saragih, M. (2023). *Proyek Strategis Ekonomi Biru Menuju Negara Maju 2045*.
- Darajati, M. R. (2024). The Urgency of Implementing the Blue Economy Concept in Indonesian Marine Governance. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(1), 15–22.
- Dian, A., Adnan, I., Hasana, S., & Assidiq, M. (2023). Implementasi Konsep Blue Economy Di Indonesia Dengan. *Sensistek*, 6(2), 134–140.
- Donesia, E. A., Widodo, P., Saragih, H. J. R., Suwarno, P., & Widodo. (2023). Konsep Blue Economy Dalam Pengembangan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950–1959.
- Dwi, F., & Ananda, S. (2024). *PAKANI: SUSTAINABLE BLUE ECONOMY MELALUI ISLAMIC DIGITAL PLATFORM DALAM UPAYA MEMBERDAYAKAN PETANI*. 03(02), 126–138.
- Erianto, R., Hasibuan, I. M., & ... (2024). Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah. ... *Ekonomi Syariah ...*, 09(01), 1–18. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1143>
- Ervianto, W. I. (2018). Studi Pendekatan Ekonomi Biru untuk Infrastruktur di Indonesia. *Umj*, 1–7.
- Gusrah, G., Anwar, A., & Parawansa, P. (2024). Implementasi Skema Ekonomi Biru dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea: Kajian Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Pesisir Sulawesi *Innovative: Journal Of Social ...*, 4(1), 416–427. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AImplementasi>
- Khoiriyah, A. Z. (2024). Implementasi Ekonomi Biru Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1331–1356. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4161>
- Luturmas, F., Maulita, M., & Syam, H. (2024). Konsep Blue economy di Daerah Pesisir Kota Samarinda dengan Pendekatan Penta Helix. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 8(1), 24–31.

- <https://doi.org/10.52475/saintara.v8i1.260>
- Maeyangsari, D. (2023). Ekonomi Biru sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Perspektif Hukum*, 23(1), 106–126. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/172>
- Maria, V., Malihatin, A., & Aprillia, A. (2024). Literatur Review: Peran Penanaman Pendidikan Ekonomi Biru Kepada Masyarakat Pesisir di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal Berkelanjutan. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 618–623. <https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2767>
- Mawar, sip, map fisip univ. muhammadiyah jakarta. (n.d.).
- Policy, D., Meningkatkan, D., Economy, B., & Desa, D. (2024). *Japs* 1,3,4 2. 5, 265–273. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i3.184>
- Rektor, U. P. B. (2022). Dialektika Publik. *Researchgate.Net*, 1987, 25–31. https://www.researchgate.net/profile/Tri-Samnuzulsari/publication/320149341_Penganggaran_Partisipatif_di_Kabupaten_Bima_Nusa_Tenggara_Barat/links/59d0f3f0aca2721f43673f92/Penganggaran-Partisipatif-di-Kabupaten-Bima-Nusa-Tenggara-Barat.pdf
- Rita, A., & Dwi, T. (2023). Kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan Peranan Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia. *Kementerian Kelautan Dan Perikanan Indonesia*.
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01–12. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>
- Setyawati, L. R., Hadistian, Cahya, D. D., Marsetio, Novarianti, A. D., & Said, B. D. (2021). Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir di Kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178–185.
- Sujiwo, A. S., & Nurlaili, N. (2024). Pengembangan Tata Kelola Ekonomi Biru Untuk Memperkuat Blue Economy Development Index di Indonesia. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 13(1), 67. <https://doi.org/10.33512/jpk.v13i1.23726>
- Wangke, H. (2021). Keamanan maritim dan ekonomi biru: transformasi ekonomi kelautan berkelanjutan di Indonesia. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130293468471432217>
- Wibowo, A., Suhufan, A. M., & Bellicia, A. (2022). Rambu-rambu Kebijakan Ekonomi Biru. *Transparency International Indonesia*, 2. <http://www.nber.org/papers/w16019>



Artikel Ilmiah

Volume 03, Nomor 1: Juni 2025

ISSN xx-xxxx

Website: <https://jika.karawangkab.go.id>

Pengembangan Model Bisnis Inklusif untuk Peningkatan Nilai Tambah Pada Rantai Pasok Petani Beras Organik: Studi Kasus di Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang

Development of an Inclusive Business Model to Enhance Value Addition in the Supply chain of Organic Rice Farmers: A Case Study in Pasirkaliki Village, Rawamerta Sub-district, Karawang Regency

Nurkholifatul Maula

STIES Khas Al-Jaelani, Cirebon - Jawa Barat

e-mail: maulanurkholifatul89@gmail.com

ABSTRAK

Beras organik mulai menjadi primadona pertanian beras di Karawang. Namun petani beras organik masih mengalami kendala dan permasalahan dalam rantai pasoknya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan tiga tahapan dalam analisis. Pertama, menganalisis rantai pasok saat ini pada beras organik, kedua, mengidentifikasi pengaruh struktural terhadap model bisnis inklusif dan ketiga, melakukan pengembangan pada model bisnis inklusif pada petani beras organik. Adapun hasil dari penelitian ini, mengidentifikasi bahwa petani beras organik Karawang telah memiliki rantai pasok yang cukup lengkap. Namun, masih terkendala dalam hal optimalisasi peran aktor dan akses pemasaran. Oleh karena itu, dikembangkan model bisnis inklusif dengan menggunakan pendekatan kolaboratif antar aktor dan menambahkan jenis produk dari beras ketan.

Kata kunci: Pengembangan, Model Bisnis Inklusif, Beras Organik, Rantai Pasok

ABSTRACT

Organic rice has begun to emerge as a leading commodity in Karawang's rice farming sector. However, organic rice farmers continue to face challenges and obstacles within their supply chains. This study employed a descriptive qualitative approach, involving three stages of analysis. First, the current supply chain of organic rice was examined; second, the structural influences on the inclusive business model were identified; and third, a development of the inclusive business model for organic rice farmers was carried out. The findings of this study reveal that while organic rice farmers in Karawang already possess a relatively complete supply chain, limitations remain in terms of optimizing the roles of stakeholders and accessing wider markets. Consequently, an inclusive business model was developed using a collaborative approach among the actors and by adding types of glutinous rice products

Keywords: Development, Inclusive Business Model, Organic Rice, Supply chain.

1. Pendahuluan

Padi merupakan salah satu komoditi utama dan terbesar di Indonesia. Karawang pernah dijuluki sebagai wilayah lumbung padi Indonesia karena memiliki area persawahan yang luas dan tercatat sebagai produsen beras terbesar kedua setelah Indramayu (Chofyan et al., 2016). Namun Karawang saat ini telah berkembang menjadi kota industri. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, Karawang menjadi salah satu kota industri terbesar di Indonesia (Purwanto, 2022). Kondisi tersebut membawa banyak orang bermigrasi ke Karawang, sehingga menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk dan alih fungsi lahan pertanian di Karawang. Kondisi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi padi di Karawang. Permasalahan tersebut mendorong petani untuk memproduksi beras organik memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras konvensional.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang mampu menghasilkan padi sebanyak 1.087.873,90 ton pada tahun 2020, 1.234.134,00 ton pada tahun 2021, dan 9.433.723,09 ton pada tahun 2022. Namun sebagian besar padi yang dihasilkan adalah padi anorganik. Sedangkan produksi padi organik masih belum meluas sehingga para petani yang membudidayakan padi organik merasa kesulitan dalam memasarkan hasil panen. Selain itu, terdapat beberapa alasan petani Karawang untuk memproduksi beras organik diantaranya yaitu jumlah permintaan beras organik semakin meningkat secara nasional dan internasional (Echo, 2022); Menjadi salah satu upaya dalam pelestarian lingkungan dengan adanya pertanian organik membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk serta pestisida kimia (Sutrisno, 2022). Beras organik Karawang juga memiliki prospek cerah di pasar global.

Tidak sejalan dengan potensi beras organik, secara manajemen bisnis beras organik masih banyak mengalami kendala. Diantaranya yaitu masih terkendala dalam rantai pasok. Hal ini dikarenakan masih terkendala pada akses pasar. Industri pengolahan masih memiliki akses pasar terbatas, yang terbukti dari pemasaran produk sebagian besar bergantung kepada pihak distributor. Selain itu, terbatasnya sumber daya modal yang dimiliki menjadi kendala dalam rantai pasok (Purwandoko et al., 2018). Masalah tersebut membawa petani beras organik di Karawang kesulitan dalam mengakses pasar (Maulidya et al., 2024).

Guna mengatasi berbagai permasalahan dalam produksi dan pemasaran beras organik di Karawang, perlu adanya pengembangan model bisnis inklusif sebagai solusi yang cukup efektif untuk mengatasi permasalahan rantai pasok dan keterbatasan pemasaran dalam produksi beras organik. Implementasi model bisnis inklusif mendorong keterlibatan petani kecil dalam rantai nilai agribisnis, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam produksi, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Dengan dukungan dari model bisnis inklusif, petani beras organik dapat mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional yang menghargai produk organik (Bunyasiri, 2021). Salah satu penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh (Mulyati et al., 2024) menganalisis bisnis model inklusif yang telah diimplementasikan oleh petani kopi di Jawa Barat, dan menghasilkan bahwa meningkatkan inklusivitas rantai nilai kopi memerlukan keterlibatan yang kuat dari para pemangku kepentingan, khususnya dengan petani kecil, melalui pelatihan yang memberdayakan, berbagi pengetahuan, serta pemantauan dan evaluasi yang ketat.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, dan potensi yang dimiliki oleh petani beras organik, penelitian ini memiliki rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimana rantai pasok beras organik di Desa Pasirkaliki, Rawamerta, Kabupaten Karawang saat ini? 2). Bagaimana kendala dan tantangan pada rantai pasok beras organik di Desa Pasirkaliki, Rawamerta, Kabupaten Karawang saat ini? dan 3). Bagaimana pendekatan model bisnis inklusif untuk meningkatkan nilai bisnis pada rantai pasok beras organik di Desa Pasirkaliki, Rawamerta, Kabupaten Karawang. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi tujuan penelitian ini yakni: penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengeksplor rantai pasok saat ini pada petani beras organik di Desa Pasirkaliki,

Rawamerta, Kabupaten Karawang; 2). Mengidentifikasi tantangan dan kendala dari rantai pasok pada petani beras organik; dan 3). Membuat model bisnis inklusif untuk meningkatkan nilai rantai pasok pada beras organik. Adanya tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat menjadikan saran guna perbaikan dalam sistem pertanian beras organik di Karawang.

2. Metodologi

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini diprakarsai oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Lubis, 2017; Mulyati & Indrawan, 2021), ketiganya mengeksplor model bisnis inklusif pada sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan *framework* yang sama dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menginvestigasi model bisnis dari petani beras organik di Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Desa ini dipilih karena adanya keterbukaan masyarakat terhadap pendekatan baru dalam pertanian, serta tersedianya data dan informasi lapangan yang memadai, Desa Pasirkaliki memberikan peluang strategis bagi pengembangan model bisnis inklusif yang dapat meningkatkan nilai tambah petani beras organik (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022),

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara mendalam dan semi terstruktur. Wawancara tersebut dilakukan dengan mengeksplorasi rantai pasok beras organik dan praktik inklusivitas bisnis. Wawancara dilakukan kepada 2 orang petani, dua orang distributor beras organik, dan satu orang *representative* pemerintahan. Instrumen penelitian tentang model bisnis inklusivitas merujuk pada (Lundy et al., 2014), yang memaparkan mengenai model bisnis inklusivitas melalui *Link methodology*. Teori tersebut juga telah diimplementasikan oleh penelitian sebelumnya dengan menganalisis model bisnis inklusivitas. Penelitian dari (Permatasari et al., 2017) menganalisis mengenai model bisnis kopi Arabika di Bondowoso. Empat tahun kemudian, penelitian tersebut dikembangkan kembali oleh (Mulyati & Indrawan, 2021) dengan menambahkan perbandingan di wilayah Sumatera. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori *link methodology* untuk menilai inklusivitas suatu model bisnis.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengevaluasi praktik bisnis inklusif melalui *link methodology*, yang telah terbukti efektif sebagai alat strategis dalam pengembangan proses bisnis. Metodologi ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara petani dengan pasar modern, menjembatani perbedaan antara petani kecil, serta merumuskan strategi agar mereka dapat mengakses dan memanfaatkan peluang pasar (Lundy et al., 2014).

Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan. **Tahap pertama** adalah memetakan *value chain* beras organik, yang digambarkan secara visual menggunakan metode analisis rantai pasok (Kaplinsky dan Morris, 2000). Pemetaan ini mencakup proses internal bisnis, jaringan kemitraan, serta faktor eksternal yang mempengaruhinya. **Tahap kedua** adalah menyusun *Business Model Canvas* (BMC). Setelah rantai pasok beras organik dipetakan, disusunlah BMC yang mengadaptasi pendekatan dari untuk mengidentifikasi berbagai celah atau kesenjangan. Model ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tujuan dan praktik bisnis dalam industri beras organik. Dalam konteks ini, pemetaan rantai pasok digunakan bersama BMC sebagai alat untuk menghubungkan dengan bisnis model yang telah dilakukan dan kendala atau permasalahan dalam proses bisnis. **Tahap ketiga**, adalah menentukan model bisnis baru dengan mengembangkan prinsip model bisnis inklusivitas.

Data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis melalui tiga tahapan utama. Pertama, peneliti mengidentifikasi berbagai faktor struktural yang membentuk dan mempengaruhi lingkungan bisnis dalam rantai pasok beras organik. Kedua, dilakukan penelaahan terhadap tren-tren besar yang berkaitan dengan aspek inklusivitas dari faktor-faktor tersebut. Ketiga, dianalisis bagaimana hubungan antara investasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan dampaknya

terhadap petani kecil yang terlibat dalam rantai pasok. Penilaian dilakukan secara kualitatif dengan melihat seberapa besar kemungkinan dari tiap faktor atau aktivitas dalam rantai nilai tersebut. Untuk mengukurnya, digunakan skala ordinal dengan rentang nilai dari 1 (kemungkinan paling rendah) hingga 4 (kemungkinan paling tinggi). Dalam penyajian hasil analisis, skala ini kemudian diubah menjadi simbol plus (+) untuk menunjukkan tingkat masing-masing indikator secara lebih visual.

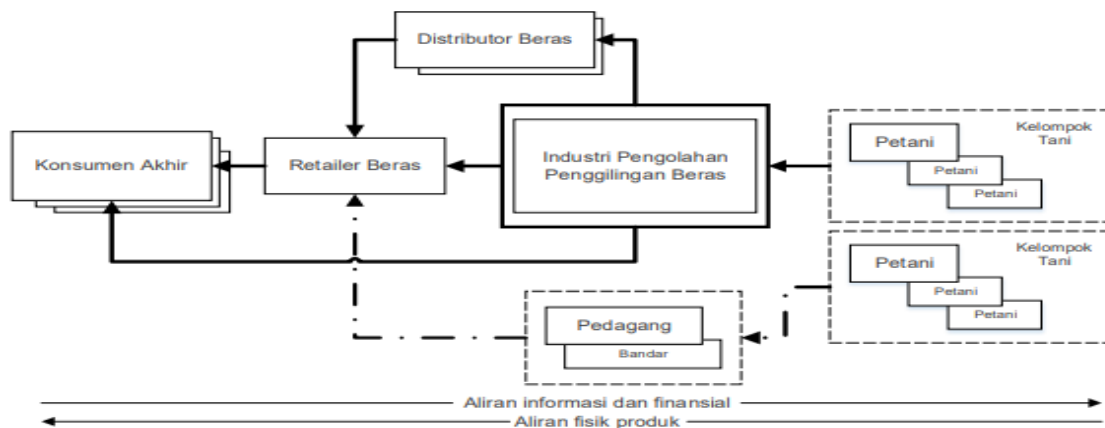
Penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai validasi data. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yang mana dicocokkan dengan sumber data primer yakni wawancara dan dengan sumber data sekunder berupa dokumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Hasil wawancara juga dicocokkan dengan berbagai informan untuk mendapatkan validitas data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1. Identifikasi Rantai Pasok Pada Industri Beras Organik di Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang

Pada identifikasi rantai pasok beras organik, diidentifikasi beberapa hal diantaranya: produksi, pasca panen, penggilingan, pengemasan, distribusi dan penjualan, serta konsumsi beras organik. Berdasarkan pengakuan dari beberapa petani terkait produksi beras organik. Berikut visual rantai pasok dari industri beras organik di Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.



Gambar 1. Rantai Pasok Beras Organik

Berdasarkan rantai pasok beras organik di Pasirkaliki tersebut, berikut beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam rantai pasok beras organik serta peranannya:

Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan rantai pasok utama dalam rantai pasok beras organik. Para petani anggota kelompok memiliki peran untuk melakukan kegiatan budidaya padi organik mulai dari pembenihan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan proses pascapanen. Dilihat dari sisi SDM, mayoritas kelompok tani berusia produktif dan berpendidikan formal dan non formal rendah. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi dinamika petani dalam mengembangkan produksi beras organik (Wahyuni et al., 2017). Berikut beberapa informasi yang didapatkan dari beberapa petani.

“jadi kami mulai dari penyiapan lahan, benih, dan pupuk organik. Semua petani anggota kelompok sudah sepakat tidak pakai pupuk kimia atau pestisida sintesis. Kami bikin pupuk sendiri dari kotoran hewan dan kompos. Setelah itu tanam dan rawat sekitar 3 bulan.” (AP-Petani)

“Setelah panen, padi dijemur, lalu digiling di penggilingan lokal yang juga kami sewa bareng. Nah, dari situ baru kami kemas, biasanya pakai kemasan 5 kg atau 10 kg, lalu dijual. Selama ini kami jual langsung ke konsumen lewat media sosial, atau lewat koperasi tani.” (TN - Petani)

Berdasarkan informasi tersebut, proses produksi beras organik berasal dari komitmen para petani untuk menggunakan bahan alami dalam proses penanaman padi. Setelah itu dilakukan penggilingan bekerja sama dengan penggilingan lokal.

Koperasi Pertanian

Koperasi petani berperan dalam memberikan informasi untuk penyuluhan terkait proses budidaya dan kendala dalam pembudidayaan. Namun sayangnya, fasilitas dari koperasi pertanian belum maksimal dalam membuka akses pada konsumen yang lebih luas. Adapun peran dari koperasi tani dan tantangannya juga disampaikan oleh perwakilan koperasi tani.

“Selamat pagi. Di P4S Bale Pare, kami melihat koperasi sebagai tulang punggung dalam pengembangan pertanian organik. Koperasi membantu petani dalam berbagai aspek, mulai dari penyediaan sarana produksi, pelatihan, hingga pemasaran hasil panen.” (RT - Koperasi)

“Tantangan tentu ada, terutama dalam hal edukasi petani tentang pentingnya pertanian organik dan menjaga konsistensi kualitas produk. Ditambah juga dengan kami masih membutuhkan akses pasar yang lebih luas.” (RT - Koperasi)

Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah *stakeholder* yang berperan dalam penggilingan padi menjadi beras. Proses pengolahan dilakukan oleh industri penggilingan apabila ada pesanan dari konsumen. Adapun konsumen industri pengolahan dapat berupa distributor, *retailer*, atau konsumen akhir (individu).

Pedagang Pengumpul

Dalam kenyataannya, tidak semua hasil panen gabah dari kelompok tani dapat diserap oleh industri pengolahan, karena adanya keterbatasan dalam akses pasar dan ketersediaan modal. Akibatnya, gabah yang tidak terserap tersebut biasanya dibeli oleh pedagang pengumpul (tengkulak). Dalam proses pembelian, pedagang pengumpul tidak membedakan apakah gabah tersebut dihasilkan secara konvensional atau organik. Mereka cenderung membeli berdasarkan jumlah yang tersedia. Selanjutnya, gabah yang telah dibeli digiling sendiri oleh pedagang dan kemudian dipasarkan ke toko-toko retail.

Distributor

Distributor merupakan pihak dalam rantai pasok yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Perannya terbatas pada pendistribusian dan penjualan beras organik yang telah diproses oleh industri. Selain itu, distributor juga bertanggung jawab menyediakan kemasan yang akan digunakan untuk produk tersebut.

Pada proses rantai pasok tersebut, petani beras organik di Karawang masih memiliki kendala dalam pengembangan teknologi produksi dalam menghadapi keterbatasan air serta harga beras organik yang cukup fluktuatif. Kemungkinan hal ini terjadi karena banyak pemain pada *supply chain* beras organik (Fitriyani, 2022).

Tabel 1. Analisis Kondisi Rantai Pasok Beras Organik di Karawang

Analisis Deskriptif	Produk Beras Organik di Pasirkaliki, Karawang
Struktur rantai	Rantai pasok terdiri dari 7 anggota: Produsen (petani dan kelompok tani), koperasi tani, industri pengolahan beras, pedagang pengumpul, distributor, retailer dan konsumen akhir. (Nurmahdy et al., 2020).
Sasaran rantai	individu atau komunitas sehat
Manajemen rantai	• Hubungan kerja sama antara produsen dan industri pengolahan dapat terbentuk melalui kemitraan, baik yang bersifat formal maupun non-formal. • Terdapat perjanjian kontraktual antara pihak industri pengolahan dengan distributor. • Perjanjian tersebut mencakup kesepakatan mengenai jumlah produk, standar kualitas, serta harga yang disepakati. Sumber: (Purwandoko et al., 2018)
Sumber Daya rantai	• Lahan pertanian organik masih sangat terbatas • Teknologi pertanian beras organik masih sangat kurang • kualitas SDM petani masih perlu dikembangkan
Proses bisnis rantai	• Menyusun rencana secara kolaboratif antara pihak produsen dan industri pengolahan. • Secara umum, proses distribusi dilakukan dengan model <i>distributor storage with package carrier delivery</i>, yaitu produk disalurkan ke konsumen melalui perantara distributor.

Sumber: Data Primer

3.1.2. Tantangan Pada Rantai Pasok Industri Beras Organik di Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang

Tabel 2. Pengaruh Faktor Struktural terhadap Bisnis Inklusif dalam *Supply chain* Beras Organik di Karawang

Kondisi Pendukung Bisnis Inklusif dalam Rantai Pasok	Beras Organik Karawang
Value Chain Stakeholder	
Jumlah Aktor yang Terlibat	+++
Frekuensi Kontak Antar Aktor	+++
Jumlah Hubungan pada Setiap Tahapan Rantai	++++
Internal Value Chain	
Tingkat koordinasi	++
Kemampuan dalam basis <i>supply chain</i>	+++
Kompleksitas transaksi	++
Pengaruh Eksternal Pada Supply Chain	
Pemerintah	+++
Asosiasi Petani	++
Sektor Bank	++
Koperasi	+++
NGO	++++
Praktik Bisnis Inklusif	
Inisiatif petani kecil	+++
Inisiatif pihak swasta	++++
Inisiatif pemerintah	+++
Inisiatif non pemerintah	+++

Sumber: Data Primer

Hasil analisis tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan berbagai *stakeholder* terkait. Pertama, terkait hubungan antar aktor yang terlibat dalam proses rantai pasok beras organik di Pasirkaliki, Karawang.

"Biasanya kami komunikasi lewat grup WhatsApp yang dibuat koperasi. Di situ kami dapat informasi soal jadwal panen, permintaan pasar, atau standar kualitas. Komunikasi ini terjadi hampir tiap minggu, tapi kadang kalau musim panen lagi ramai, bisa tiap hari. Tapi ya, jujur,

kadang ada kendala. Misalnya, kami kurang cepat merespon atau tidak semua petani aktif membaca pesan. Kadang juga ada miskom soal jumlah yang harus disetor atau jadwal pengiriman. Jadi menurut saya, komunikasi itu penting banget, tapi memang belum semua petani terbiasa disiplin dalam hal ini." (DD - Petani)

"Tantangan kami itu datang dari beberapa sisi. Yang pertama adalah ketidakkonsistenan pasokan. Karena beras organik sangat tergantung musim, cuaca, dan standar organik yang ketat, tidak semua petani bisa memenuhi permintaan secara kontinu. Ini menyulitkan kami saat harus memenuhi kontrak ke retail atau toko online." (AI - Distributor)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diidentifikasi bahwa komunikasi antar aktor masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses rantai pasok beras organik. Serta akses distributor pada pasar beras organik yang jauh lebih luas perlu adanya dukungan dan pengembangan yang lebih kuat. Selain itu, juga diwawancarai beberapa aktor eksternal seperti pemerintah terkait dalam hal dukungan dan tantangan dalam rantai pasok beras organik di Pasirkaliki, Karawang.

"Kami mendukung penuh pengembangan beras organik di Karawang, termasuk di Pasirkaliki. Dukungan kami antara lain berupa pelatihan pertanian organik, fasilitasi sertifikasi organik, serta bantuan alat pascapanen. Kami juga dorong kemitraan petani dengan koperasi dan pasar. Namun, tantangannya cukup banyak. Pertama, belum semua petani mau beralih ke organik karena prosesnya lebih rumit dan hasil panen awalnya lebih rendah. Kedua, kami masih terbatas dalam pengawasan dan pendampingan karena SDM kami juga terbagi untuk wilayah lain. Ketiga, kami lihat komunikasi antarpelaku rantai pasok masih belum optimal, dan ini berdampak ke distribusi." (HD - Dinas Pertanian Karawang)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diidentifikasi bahwa komunikasi dan sinergi antar aktor pada internal maupun eksternal rantai pasok beras organik sangat penting dan perlu dilakukan.

3.2. Pembahasan

Pada pembahasan ini dideskripsikan beberapa hal dari hasil analisis pada penelitian yang telah dituliskan di atas, yaitu: Mengidentifikasi rantai pasok beras organik di Karawang, mengidentifikasi tantangan rantai pasok pada industri beras organik di Karawang

3.2.1. Identifikasi Rantai Pasok Pada Beras Organik di Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang

Rantai pasokan beras organik di Pasirkaliki, Karawang memiliki struktur yang relatif kompleks, melibatkan tujuh aktor utama, masing-masing produsen (petani dan kelompok tani), koperasi tani, industri pengolahan beras, pedagang pengumpul, distributor, *retailer*, dan konsumen akhir. Struktur ini merupakan refleksi keterlibatan berbagai pihak dari proses produksi sampai distribusi beras organik yang memerlukan koordinasi yang baik untuk menyelesaikan prosesnya agar efisien. Menurut (Nurmahdy et al., 2020), adanya semua elemen ini menunjukkan bahwa pengelolaan rantai pasok beras organik tidak hanya tergantung pada produsen, melainkan juga memerlukan negara institusi lainnya, misalnya koperasi dan industri pengolahan, yang berpotensi untuk menjembatani proses dari hulu ke hilir. Manajemen rantai pasok yang efektif memerlukan pertumbuhan yang simultan efisiensi operasional internal dari setiap aktor yang terlibat dalam jaringan distribusi (Zutsara & Numena, 2022).

Sasaran rantai pasok beras organik ini jauh lebih cenderung kepada segmen konsumen individu atau komunitas yang sadar akan kesehatan. Diketahui bahwa beras organik adalah bahan baku yang bebas dari bahan kimia sintesis, sehingga konsumen yang sadar akan bahan kimia tentu

tertarik dengan produk ini. Oleh karena itu, strategi rantai pasok tidak hanya sebatas pada efisiensi distribusi, tetapi pemenuhan standar kualitas yang tinggi termasuk kepastian produk organik menjadi fokus penting dari sisi *supply chain*. Hal tersebut memunculkan bahwa aspek manajerial pada *supply chain* menjadi elemen yang sangat krusial supaya produk yang berhasil mencapai konsumen dapat dipertanggungjawabkan.

Rantai pasok beras di Karawang menunjukkan pola kemitraan yang terdapat pada produsen dan industri pengolahan yang bersifat formal atau non-formal. Kemitraan memiliki peran sangat penting untuk memastikan kesinambungan pasokan dan kualitas beras. Sementara itu, pada sisi lainnya, hubungan industri pengolahan dengan distributor umumnya terjalin secara kontrak-perjanjian. Pada perjanjian, terdapat penetapan tentang hal-hal penting, seperti volume pasokan, standar mutu yang harus dipenuhi, serta harga yang telah disepakati bersama. Berdasarkan (Purwandoko et al., 2018), bentuk kontrak semacam ini penting untuk menciptakan kejelasan tanggung jawab serta mengurangi risiko dalam kegiatan distribusi.

Namun, tantangan dalam pengelolaan rantai pasok ini cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan lahan pertanian organik, yang membuat skala produksi belum optimal. Selain itu, teknologi pertanian untuk mendukung praktik organik masih minim, sehingga produktivitas belum maksimal. Kualitas sumber daya manusia, khususnya petani, juga menjadi perhatian karena masih perlu peningkatan dari sisi pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian organik. Tanpa adanya intervensi dalam bentuk pelatihan atau dukungan teknologi, maka kapasitas rantai pasok sulit berkembang lebih jauh.

Dalam aspek proses bisnis, terlihat adanya kolaborasi antara produsen dan industri pengolahan dalam menyusun perencanaan produksi. Pendekatan ini memungkinkan adanya keselarasan antara kapasitas produksi dan kebutuhan pasar. Secara distribusi, model yang digunakan adalah *distributor storage with package carrier delivery*, di mana produk disimpan oleh distributor dan dikirimkan ke konsumen melalui jasa pengiriman. Model ini cukup efektif untuk menjangkau konsumen akhir, namun memerlukan sistem logistik yang handal dan terkoordinasi dengan baik. Penguatan di sektor ini dapat membantu mempercepat waktu pengiriman dan menjaga kualitas produk hingga sampai ke tangan konsumen.

3.2.2. Identifikasi Tantangan Pada Rantai Pasok Beras Organik di di Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang

Sehubungan dengan analisis identifikasi rantai pasok beras organik, penulis mengidentifikasi penilaian terhadap faktor struktural dari bisnis beras organik di Karawang. Rantai nilai beras organik Karawang menggambarkan ada partisipasi aktor relatif banyak di sepanjang proses produksi hingga distribusi. Tingkat besar aktor yang terlibat (+++) memberi kesan bahwa aktivitas rantai nilainya tidak hanya memerlukan petani saja, melainkan juga menarik koperasi tani, penggilingan atau industri pengolahan, pedagang pengumpul, distributor, hingga *retailer*. Hal ini kompatibel dengan hasil penemuan Nurmahdy et al. (2020) yang menguraikan bahwa kompleksitas rantai pasok beras di Karawang dirancang dengan partisipasi multi-aktor dengan peran dan kontribusi yang satu dengan yang lain berbeda, yang menunjukkan ada sistem kerja kolektif dalam memelihara keberlangsungan produksi dan distribusi produk beras organik.

Tingginya frekuensi kontak antar aktor (+++) menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar pelaku dalam rantai nilai beras organik cukup intens. Hal ini penting dalam menjamin kualitas produk, kepastian pasokan, dan respons cepat terhadap dinamika pasar. Menurut Purwandoko et al. (2018), dalam rantai pasok beras organik, khususnya antara petani dan industri pengolahan, sering terjadi komunikasi informal dan formal untuk menyesuaikan standar kualitas serta kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Frekuensi interaksi ini menjadi faktor penting dalam mempertahankan

kepercayaan dan efisiensi dalam hal terkait informasi yang berkaitan dengan rantai pasok beras organik di Karawang.

Selain itu, jumlah hubungan pada setiap tahapan rantai nilai yang sangat banyak (++++), menunjukkan adanya jalinan kerja sama yang cukup luas, baik secara vertikal maupun horizontal. Di setiap titik dalam rantai nilai, satu aktor biasanya terhubung dengan lebih dari satu mitra kerja lainnya, misalnya petani bisa bermitra dengan beberapa koperasi atau penggilingan. Ini menciptakan fleksibilitas dalam rantai, tetapi juga menuntut sistem manajemen yang baik agar tidak terjadi konflik atau inefisiensi. Menurut analisis Purwandoko et al. (2018), struktur hubungan semacam ini memperkuat ketahanan sistem distribusi, tetapi memerlukan dukungan regulasi dan kelembagaan yang memadai agar tetap terkendali dan adil bagi semua pihak.

Identifikasi *Internal Value Chain*

Tingkat koordinasi dalam rantai nilai internal beras organik di Karawang berada pada level sedang (++) , yang mencerminkan adanya kerja sama antar aktor utama seperti petani, koperasi tani, dan industri pengolahan, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis. Koordinasi ini biasanya berlangsung secara informal, terutama dalam pengambilan keputusan produksi dan distribusi. Menurut (Situmeang, 2019), koordinasi yang efektif dalam rantai pasok beras organik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko ketidakpastian dalam distribusi produk.

Kemampuan dalam basis *supply chain* berada pada level tinggi (+++), menunjukkan bahwa meskipun koordinasi belum optimal, aktor-aktor dalam rantai pasok beras organik di Karawang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing dalam alur rantai pasok. Misalnya, petani mengetahui standar mutu yang harus dipenuhi, Menurut (Pangestu, 2023), sementara industri pengolahan memahami jadwal panen dan volume yang dibutuhkan. menekankan pentingnya manajemen rantai pasok yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap permintaan pasar.

Kompleksitas transaksi dalam internal *value chain* beras organik Karawang tergolong sedang (++) . Ini berarti proses transaksi antar pelaku, seperti antara petani dan penggilingan atau antara penggilingan dan distributor, tidak terlalu rumit tetapi tetap memerlukan kesepakatan tertentu. Kompleksitas ini muncul dari adanya negosiasi harga, volume, dan kualitas yang tidak selalu terdokumentasi secara formal. Menurut Situmeang (2019), transaksi dalam rantai nilai beras semi organik sering kali berbasis kesepakatan jangka pendek atau musiman, yang membuatnya fleksibel tetapi juga rentan terhadap ketidakpastian dan konflik kepentingan apabila komunikasi tidak berjalan lancar.

Identifikasi Pengaruh Eksternal Pada *Value Chain*

Beberapa pihak eksternal yang menjadi asesmen keterlibatan dalam rantai pasok beras organik Karawang diantaranya yaitu: Pemerintah, asosiasi petani, sektor perbankan, koperasi dan NGO. Pemerintah memiliki peran signifikan dalam mendukung rantai pasok beras organik di Karawang melalui berbagai kebijakan dan program. Melalui regulasi seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan beras di pasaran. Selain itu, pemerintah juga mendukung pengembangan pertanian organik melalui program-program pelatihan dan penyuluhan kepada petani, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti infrastruktur pertanian dan akses pasar.

Asosiasi petani berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Mereka membantu petani dalam mengadopsi praktik pertanian organik yang berkelanjutan, menyediakan informasi pasar, serta memfasilitasi

akses terhadap input pertanian dan teknologi. Dengan adanya asosiasi, petani dapat meningkatkan daya tawar mereka dalam rantai pasok dan memperluas jaringan pemasaran produk organik. Disisi lain, sektor perbankan memberikan dukungan finansial kepada pelaku rantai pasok beras organik melalui penyediaan kredit usaha tani dan layanan keuangan lainnya. Dengan akses terhadap pembiayaan, petani dan pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan produktivitas. Namun, tantangan seperti persyaratan agunan dan prosedur yang kompleks masih menjadi hambatan bagi sebagian petani dalam mengakses layanan perbankan.

Koperasi memainkan peran penting dalam mengorganisir petani, menyediakan sarana produksi, serta memfasilitasi pemasaran produk beras organik. Mereka juga membantu dalam pengolahan dan distribusi produk, serta memberikan pelatihan kepada anggotanya. Sementara itu, LSM berkontribusi dalam memperkuat kapasitas petani melalui program pemberdayaan, pelatihan, dan advokasi kebijakan. LSM juga membantu dalam membangun jaringan antara petani, pasar, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga memperkuat posisi petani dalam rantai pasok beras organik.

Identifikasi Praktik Bisnis Inklusif

Praktik bisnis inklusif dalam rantai pasok beras organik di Karawang menunjukkan sinergi antara petani kecil, sektor swasta, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan ketahanan pangan. Petani di Karawang, khususnya yang tergabung dalam Koperasi Paguyuban Saripati Tani, telah berinisiatif mengembangkan pertanian organik. Mereka beralih dari pertanian konvensional ke organik dengan memanfaatkan pupuk alami dan mengurangi penggunaan pestisida kimia (Fitriyani, 2022). Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas hasil panen tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Perubahan ini menunjukkan kesadaran petani akan pentingnya praktik pertanian berkelanjutan. Perusahaan seperti PT Pertamina EP Zona 7 Subang *Field* telah meluncurkan program "Jejak Setapak" yang mendukung petani dalam mengadopsi pertanian organik. Program ini mencakup pelatihan, pendampingan, dan bantuan dalam membentuk koperasi. Hasilnya, jumlah petani organik meningkat, dan mereka berhasil meningkatkan produktivitas serta pendapatan. Inisiatif ini menunjukkan peran penting sektor swasta dalam mendukung pertanian berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengintegrasikan pertanian organik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Melalui program ini, pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan, penyuluhan, dan bantuan teknis kepada petani. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan praktik pertanian organik dan memperluas akses pasar bagi produk mereka. (Pemerintah Kabupaten Karawang, 2025). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil di Karawang juga aktif dalam mendukung pertanian organik. Mereka memberikan pelatihan, pendampingan, dan membantu petani dalam membentuk kelompok tani serta koperasi. Selain itu, mereka juga berperan dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya produk organik, sehingga menciptakan permintaan pasar yang lebih besar. Secara keseluruhan, praktik bisnis inklusif dalam rantai pasok beras organik di Karawang menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak dapat menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

3.2.3. Pengembangan Bisnis Model Inklusif di Pasirkaliki, Karawang untuk Meningkatkan Nilai Rantai Pasok Pada petani Beras Organik

Setelah menganalisis rantai pasok beras organik di Karawang dan mengidentifikasi aktor yang terlibat serta pengaruhnya pada rantai pasok beras organik. Penulis mengembangkan bisnis model inklusif untuk petani beras organik di Karawang.

Tabel 3. Rancangan Bisnis Model Inklusif Petani Beras di Karawang

Komponen	Rancangan Strategi Inklusif
<i>Value Proposition</i>	Beras organik berkualitas tinggi, bersertifikat, sehat, ramah lingkungan, dan memberdayakan petani kecil.
<i>Customer Segment</i>	Konsumen rumah tangga sadar kesehatan, komunitas urban sehat, pasar ekspor, institusi (hotel, restoran, sekolah).
<i>Key Activities</i>	Pelatihan pertanian organik, penguatan koperasi, pendampingan NGO, sertifikasi organik, promosi digital.
<i>Key Partners</i>	Pemerintah daerah, koperasi, swasta (misal: CSR BUMN), NGO (misal: Rikolto), dan lembaga sertifikasi.
<i>Channels</i>	Penjualan langsung via e-commerce koperasi, marketplace organik, retail modern, dan mitra distribusi.
<i>Revenue Streams</i>	Penjualan beras organik kemasan, produk turunan (beras merah/coklat), dan layanan edukasi pertanian organik.
<i>Cost Structure</i>	Biaya produksi, sertifikasi, distribusi, pelatihan, dan promosi.
<i>Customer Relationship</i>	Edukasi konsumen, label transparansi rantai pasok, komunitas pelanggan loyal organik.

Sumber: Data Primer (Diolah oleh Penulis)

Beras organik Karawang menawarkan nilai utama berupa produk yang sehat, bebas residu kimia, dan ramah lingkungan. Nilai tambah lainnya adalah keberpihakan pada petani kecil karena produksi dilakukan melalui pola bisnis inklusif yang melibatkan koperasi, NGO, dan mitra swasta. Produk ini tidak hanya menyehatkan konsumen, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Sertifikasi organik menjadi penjamin mutu yang membedakan produk dari beras konvensional. Segmen pelanggan yang ditargetkan meliputi rumah tangga perkotaan yang sadar kesehatan, komunitas pecinta produk organik, restoran dan hotel berbasis *eco-friendly*, serta pasar ekspor yang menuntut produk organik tersertifikasi. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan juga dapat menjadi konsumen potensial melalui program pengadaan pangan sehat untuk sekolah dan instansi publik.

Penyaluran produk dilakukan melalui berbagai saluran distribusi, mulai dari toko retail modern, toko organik, dan koperasi langsung, hingga platform digital seperti *marketplace*, media sosial, dan situs resmi koperasi. Distributor regional juga dilibatkan untuk memperluas jangkauan pasar. Kanal digital berperan besar dalam promosi dan penjualan langsung ke konsumen akhir. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui edukasi dan kampanye kesadaran akan pentingnya pertanian organik dan perdagangan adil (*fair trade*). Transparansi proses produksi (misalnya melalui QR code

pada kemasan) memperkuat kepercayaan konsumen. Komunitas pelanggan loyal dibangun melalui program berlangganan, edukasi kesehatan, dan testimoni dampak sosial dari setiap pembelian produk. Pendapatan utama berasal dari penjualan beras organik dalam berbagai kemasan. Tambahan pendapatan dapat diperoleh dari produk turunan (beras merah, tepung organik), layanan pelatihan pertanian organik, dan kemitraan B2B (hotel, katering, retail). Sertifikasi kolektif dan efisiensi rantai pasok menekan biaya, sehingga margin tetap kompetitif meski harga bersaing.

Sumber daya kunci meliputi petani kecil yang terlatih, koperasi sebagai pengelola, lahan pertanian organik, fasilitas pascapanen dan pengemasan, serta mitra pendukung seperti LSM dan sektor swasta. Teknologi pertanian organik, sistem informasi rantai pasok, serta jejaring pasar menjadi modal penting untuk mendukung keberlanjutan model ini. Aktivitas utama mencakup pelatihan petani, proses budidaya dan sertifikasi organik, pengumpulan dan pengemasan hasil panen, pemasaran dan distribusi produk, serta manajemen kemitraan multipihak. Proses ini dijalankan secara kolaboratif dan berorientasi pada peningkatan kualitas dan efisiensi produksi. Kemitraan strategis mencakup: Pemerintah (dalam hal regulasi, insentif, dan pembinaan), Swasta (dalam program CSR atau *off-taker*), Lembaga keuangan (pembiayaan mikro), NGO (pendampingan teknis dan sosial), Lembaga sertifikasi (jaminan mutu organik), Platform digital (penjualan dan promosi). Struktur biaya meliputi: Biaya produksi (pupuk organik, tenaga kerja, panen), Pelatihan dan sertifikasi organik, Distribusi dan logistik, Promosi dan pemasaran, Operasional koperasi. Biaya ditekan melalui kolaborasi, subsidi, dan penggunaan pendekatan kolektif (misalnya dalam sertifikasi dan pelatihan).

Model bisnis inklusif beras organik Karawang dirancang untuk memperkuat posisi petani kecil melalui kemitraan strategis dengan koperasi, swasta, pemerintah, dan NGO. Nilai utama yang ditawarkan adalah produk beras sehat, ramah lingkungan, dan memberdayakan, dengan saluran distribusi yang mencakup retail modern hingga platform digital. Dengan dukungan pelatihan, sertifikasi kolektif, serta sistem distribusi yang efisien, model ini tidak hanya memperluas akses pasar bagi petani, tetapi juga menjawab kebutuhan konsumen akan produk pangan berkelanjutan. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui edukasi dan transparansi, sementara pendapatan diperoleh dari penjualan beras organik, produk turunan, serta jasa pelatihan. Seluruh aktivitas ini dijalankan dengan dukungan sumber daya lokal, sistem logistik kolaboratif, dan mitra strategis dari berbagai sektor.

Melalui penerapan model bisnis ini, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan petani kecil karena terbukanya akses ke pasar premium yang lebih menguntungkan. Selain itu, adopsi pertanian organik oleh petani baru akan mendorong perluasan lahan organik secara signifikan. Dalam jangka panjang, model ini akan membentuk ekosistem agribisnis organik yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, serta menciptakan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pertanian yang adil dan ramah lingkungan.

4. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil analisis terhadap rantai pasok beras organik di Karawang, dapat disimpulkan bahwa struktur rantai pasok terdiri dari tujuh aktor utama, yaitu petani (individu maupun kelompok), koperasi tani, industri pengolahan beras, pedagang pengumpul, distributor, retailer, dan konsumen akhir. Rantai ini menunjukkan sistem yang cukup kompleks, namun secara umum berjalan melalui alur yang terstruktur. Keterbatasan lahan organik, rendahnya teknologi pertanian, dan kualitas SDM petani masih menjadi tantangan utama. Meski demikian, proses distribusi telah menggunakan model "*distributor storage with package carrier delivery*", yang memungkinkan produk sampai ke konsumen dengan lebih efisien.

- Hubungan antar aktor dalam rantai pasok menunjukkan frekuensi interaksi yang tinggi, dengan jumlah hubungan yang cukup luas di setiap tahapan. Kemitraan antara produsen dan industri pengolahan telah berjalan, baik secara formal maupun informal, dengan adanya kontrak kerja sama yang mengatur volume, kualitas, dan harga produk. Penilaian terhadap internal *value chain* menunjukkan tingkat koordinasi dan kompleksitas transaksi yang sedang, namun kemampuan dasar dalam manajemen rantai pasok cukup baik. Dukungan dari aktor eksternal seperti NGO, koperasi, dan pemerintah juga memperkuat dinamika rantai pasok, meskipun keterlibatan asosiasi petani dan sektor perbankan masih perlu ditingkatkan.
- Sebagai respons terhadap tantangan dan potensi tersebut, pengembangan model bisnis inklusif menjadi langkah strategis sebagai upaya dalam meningkatkan nilai pada rantai pasok beras organik di Pasirkaliki, Karawang. Model ini menempatkan petani kecil sebagai aktor utama yang didukung oleh mitra koperasi, sektor swasta, NGO, dan pemerintah. Melalui pendekatan kolaboratif, model ini tidak hanya meningkatkan akses pasar dan pendapatan petani, tetapi juga memperluas lahan organik dan membangun sistem agribisnis yang transparan dan berkelanjutan. Praktik inklusif ini menciptakan hubungan yang sinergis antar aktor serta memperkuat fondasi ekosistem pertanian organik di Karawang untuk jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Bunyasiri, I. N. (2021). A Case Study of Inclusive Business Model Using Business Model Canvas For Contract Farming. *International Journal of Entrepreneurship*, 25(5). 1-8
- Chofyan, I., Rustan, U., & Hariyanto, A. (2016). Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional. *Ethos Jurnal*, 4(1). 149-160.
- Echo, P. (2022, April 7). *Prospek Cerah Beras Organik Indonesia di Pasar Global*. FPP Universitas Muhammadiyah Kotabumi. https://fpp.umko.ac.id/2022/04/07/prospek-cerah-beras-organik-indonesia-di-pasar-global/?utm_source=chatgpt.com (Diakses pada 5 Mei 2025).
- Fitriyani, E. (2022, November 10). *Jejak Setapak Petani Karawang Beralih ke Organik: Omzet Meningkat, Badan Sehat*. Kumparan Bisnis. (Diakses Pada 5 Mei 2025).
- Fitriyani, E. (2022, November 10). *Jejak Setapak Petani Karawang Beralih ke Organik: Omzet Meningkat, Badan Sehat*. Kumparan Bisnis.
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2000). *A Handbook for Value Chain*. Brighton: Institute of Development Studies. University of Sussex.
- Lubis, A. (2017). Inclusive business models in the Arabica coffee sector: A case study of Bondowoso District, East Java. *Thesis Bogor Agricultural University*.
- Lundy, M., Amrein, A., Bermúdez, H., Becx, G., Zamierowski, N., Rodriguez, F., & Mosquera, E. (2014). *LINK Methodology: A Participatory Guide To Business Models That Link Smallholders To Markets*. Ed. ke-2.
- Maulidya, N., Abubakar, & Bayfurqon, F. M. (2024). Strategi Pemasaran Beras Organik (Studi Kasus Pada Pusat Pelatihan Pertanian Dan Pedesaan Swadaya (P4S) Bale Pare Pertanian Organik Di Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 543-551.
- Mulyati, H., & Indrawan, D. (2021). Inclusive business models in coffee value chain: Comparing practical evidence between East Java and North Sumatera. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 18(2), 122–130.
- Mulyati, H., & Indrawan, D. (2021). Inclusive Business models In Coffee value chain: comParIng Practlcal evidence Between east Java anD north sumatera. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 18(2).
- Mulyati, H., Indrawan, D., Abdullah, A., & Yusri, D. (2024). Leading Inclusive Growth: Comparing Business Models in The Coffee Value Chain, West Java Province. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 1(3).
- Nurmahdy, A. I., Dewi, R. K., & Susilowati, S. H. (2020). Kinerja Rantai Pasok Beras di Kabupaten Karawang. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(2), 101-115. <https://doi.org/10.29244/jai.2020.8.2.101-115>
- Nurmahdy, A. I., Machfud, & Syuaib, M. F. (2020). Kinerja Rantai Pasok Beras di Kabupaten Karawang. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.17358/jabm.6.2.325>
- Pangestu, A. D. (2023). Evaluasi *Supply chain* pada Pabrik Beras Jaya Subur Makmur di Kabupaten Karawang. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1131-1140.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2025). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025.

- Permatasari, P. C., Basith, A., & Mulyati, H. (2017). Model Bisnis Inklusif Rantai Nilai kopi Arabika di Bondowoso Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 17(2), 111-125.
- Purwandoko, P. B., Seminar, K. B., Sutrisno, & Sugiyanta. (2018). Analisis Rantai Pasok Beras Organik di Provinsi Jawa Barat. *PANGAN*, 27(3), 187 – 194.
- Purwandoko, P. B., Seminar, K. B., Sutrisno, & Sugiyanta. (2018). Analisis Rantai Pasok Beras Organik di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pangan*.
- Purwandoko, P. B., Suprayogi, W., & Arifianto, D. (2018). Analisis Rantai Pasok Beras Organik di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pangan*, 27(1), 11-20. <https://jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/390>
- Purwanto, A. (2022, Juli 25). Kabupaten Karawang: Lumbung Padi yang Jadi Kawasan Industri Terbesar. *Kompas Pedia*.
- Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian kementerian Pertanian. (2018). Kajian Rendeman dan Rantai Pasok Komoditas Beras.
- Situmeang, L. M. (2019). Analisis dan Strategi Mitigasi Risiko Rantai Pasok Beras Semi Organik di Desa Watugede, Kecamatan Singosari. *Skripsi Universitas Brawijaya*.
- Sutrisno, E. (2022, April 4). *Beras Organik Indonesia Diminati Pasar Global*. Portal Informasi Indonesia. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4587/beras-organik-indonesia-diminati-pasar-global?utm_source=chatgpt.com
- Wahyuni, S., Sumardjo, Lubis, D. P., & Sadano, D. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Dinamika Kelompok dan Kapasitas Petani dalam Agribisnis Padi Organik. *Sosiohumaniora*, 19(1).



Policy Brief

Volume 03, Nomor 1: Juni 2025

ISSN xx-xxxx

Website: <https://jika.karawangkab.go.id>

PAMALI (PAKET MAKAN LANSIA): Alternatif implementasi KARAWANG NYAAH KA KOLOT

*PAMALI (Meal Package for the Elderly):
An Alternative Implementation of Karawang Nyaah ka Kolot*

Eka Setiawati

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

email: setiawatieka@gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program “KARAWANG NYAAH KA KOLOT” merupakan derivasi dari program “JABAR NYAAH KA INDUNG” yang diluncurkan oleh Bupati Karawang sebagai bentuk kepedulian aparatur sipil negara (ASN) terhadap lanjut usia (lansia). Di tengah meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Karawang yang berimplikasi pada bertambahnya jumlah lansia, muncul kebutuhan untuk merancang intervensi sosial yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berkeadilan. *Policy brief* ini bertujuan mengusulkan alternatif aktivitas dari program tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar lansia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari data BPS dan kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan fisiologis seperti pangan menjadi prioritas utama bagi lansia, terutama yang tergolong tidak potensial dan rentan secara sosial ekonomi. Dalam implementasinya, diusulkan aktivitas *PAMALI (Paket Makan Lansia)* yaitu pemberian makan gratis harian kepada lansia rentan usia 75 tahun ke atas. Dengan potensi donasi dari 8.004 ASN PNS kurang lebih Rp. 889,750,000 per bulan, program ini dapat menjangkau 1.854 lansia rentan di 309 desa/kelurahan. Di samping itu, PAMALI dapat menggerakkan perekonomian khususnya sektor makanan dan minuman yang besar. Berdampak langsung pada penambahan omset KUKM (warung nasi, kemasan makanan, LPG), serta peningkatan pendapatan petani dan nelayan. Kesimpulannya, PAMALI direkomendasikan sebagai strategi *pro growth dan pro poor* yang dapat membantu pelaku usaha kecil, menciptakan lapangan kerja informal dan memberikan gizi kepada lansia

Kata Kunci: Lansia, peduli, kebutuhan

EXECUTIVE SUMMARY

The "KARAWANG NYAAH KA KOLOT" program is a local adaptation of the "JABAR NYAAH KA INDUNG" initiative, launched by the Regent of Karawang as a form of civil servant (ASN) solidarity and care for the elderly. Amid the increasing life expectancy in Karawang Regency, which results in a growing elderly population, there is an urgent need to design a more targeted, sustainable, and equitable social intervention. This policy brief aims to propose an alternative activity within the program by taking into account the basic needs of the elderly. The study employs a qualitative approach through literature review and secondary data analysis, using data from the Central Bureau of Statistics (BPS) and relevant policy documents. The findings highlight that physiological needs—particularly access to food—are the top priority for the elderly, especially for those categorized as non-productive and socioeconomically vulnerable. In its implementation, the PAMALI (Paket Makan Lansia – Elderly Meal Package) activity is proposed, which provides free daily meals to vulnerable elderly individuals aged 75 and above. With potential donations from 8,004 civil servants (ASN/PNS) totaling approximately Rp889,750,000 per month, this program could reach 1,854 vulnerable elderly people across 309 villages/urban neighborhoods. In addition, PAMALI has the potential to stimulate the economy, particularly the large food and beverage sector. It directly impacts the increase in turnover for micro and small enterprises (such as food stalls, food packaging, and LPG providers), and also boosts the income of farmers and fishers. In conclusion, PAMALI is recommended as a pro-growth and pro-poor strategy that can support small business actors, create informal job opportunities, and provide nutritional support for the elderly.

Keywords: *elderly, care, needs*

1. Pendahuluan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan program "JABAR NYAAH KA INDUNG" sebagai bentuk kepedulian sosial aparatur sipil negara (ASN) kepada para lansia yang kemudian diderivasikan ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kabupaten Karawang meluncurkan "KARAWANG NYAAH KA KOLOT" ini pada hari Jum'at 11 April 2025 di Plaza Pemda Karawang dalam bentuk pemberian bantuan sosial secara sukarela dari ASN sebagai kepedulian dan rasa empati kepada lanjut usia (lansia).

Tujuan penulisan *Policy Brief* ini memberikan usulan mekanisme pelaksanaan program yang lebih adil, efektif, dan akuntabel dan mempunyai dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi kecil, dengan memperhatikan kondisi ASN dan karakteristik lansia penerima manfaat.

2. Deskripsi Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Sumber data berasal dari dokumen Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 2025, literatur psikologi lansia, kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, serta studi kasus terkait efektivitas bantuan sosial untuk lansia. Data dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan bantuan sosial lansia dan merumuskan strategi yang efektif untuk keberlanjutan implementasinya.

a. Jumlah Lansia Kabupaten Karawang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lansia dikelompokkan menjadi 2 yaitu (1) Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, dan (2) Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi : a).pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b). pelayanan kesehatan; c).pelayanan kesempatan kerja; d). pelayanan pendidikan dan pelatihan; e).pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f). pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; g). bantuan sosial. Sedangkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial tidak dalam hal pelayanan kesempatan kerja dan pelayanan diklat.

Data BPS dalam dokumen Karawang Dalam Angka Tahun 2025, jumlah penduduk lansia tahun 2024 sebanyak 231.834 orang dari total penduduk Kabupaten Karawang 2,581,245 orang atau 8.98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Lansia Kabupaten Karawang Tahun 2024

Usia	Jumlah (orang)
60 - 64	103,901
65 - 69	76,232
70 - 74	7,568
75 +	44,133
	231,834

Sumber: Karawang Dalam Angka Tahun 2025

b. Kebutuhan Lansia

(Stanley& Beare,2007) dalam Yusniana dkk mengenalkan Teori Penuaan yang terdiri dari teori biologis dan psikologis (Stanley& Beare,2007). Teori biologis menjelaskan bahwa tubuh dan selnya mengalami kerusakan karena sering digunakan dan disalahgunakan (*overuse and abuse*). Teori psikologis menjelaskan bahwa untuk menuju penuaan yang sukses maka individu harus tetap beraktivitas.

Menurut Abraham Maslow kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Beberapa aspek yang mempengaruhi penurunan fungsi organ pada lansia yaitu aspek lingkungan yang mempengaruhi munculnya depresi, aspek keuangan yaitu penurunan pendapatan, aspek gaya hidup seperti kurangnya olahraga dan mengkonsumsi makanan yang tidak teratur dan tidak sehat dapat menimbulkan penyakit. Program permakanan merupakan program yang sangat membantu masyarakat yang membutuhkan karena merasakan bahwa bantuan yang mereka didapatkan cukup meringankan beban mereka dalam mendapatkan makanan yang bergizi (Tito dkk, 2021)

RSO Soeharso,2023 dalam artikel pada lamannya menguraikan bahwa makanan seimbang bagi lansia adalah dengan mengurangi asupan lemak dan garam, memberikan protein yang pas, diet kaya kalsium dipadukan dengan suplementasi vitamin D dan minum susu secara teratur, memperbanyak konsumsi serat untuk mengatasi berbagai gangguan yang berkaitan dengan penuaan seperti konstipasi, diabetes, dan penyakit jantung, memilih ragam makanan seperti produk susu, puding, telur rebus, sayuran (yang telah dikukus), buah lembut seperti papaya, pisang dan jeruk, kurangi asupan karbohidrat, khususnya glukosa/ gula, meningkatkan frekuensi makanan dalam sehari dengan kudapan (selingan), menghindari perut kosong di malam hari (> 12 jam) dengan memundurkan jam makan malam serta mengawalkan sarapan pagi dan atau memberikan kudapan, memberikan makanan dengan nilai kalori tinggi dan atau protein tinggi, memodifikasi tekstur makanan menurut kemampuan mengunyah dan menelan.

Adapun perhitungan kebutuhan gizi pada Lansia yaitu:

- a. Kebutuhan energi lansia sehat 25 -30 kkal/kg/hari;
 - b. Kebutuhan Protein 1 – 1,2 gram protein/kg/BW/hari;
 - c. Kebutuhan Lemak Total lemak 200 - 300 mg /hari
 - d. Kebutuhan Kolesterol 20 -35% dari total kalori
 - e. Kebutuhan cairan harian lansia 25 – 30 ml/kg
- c. Permasalahan yang dialami Lansia
- Merujuk pada teori penuaan, teori piramida kebutuhan maslow, dan contoh penerapan kebijakan permakanan di Kota Surabaya, permasalahan yang dialami lansia ada 3 yaitu: masalah biologis/fisiologis terdiri dari 1. Layanan Kesehatan 2. Makanan 3. Kebutuhan psikologis (Interaksi Sosial).

Dengan menggunakan Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menentukan prioritas isu strategis, dengan mengukur tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan masalah, dari ke-3 masalah tersebut diperoleh prioritas sebagai berikut:

Tabel 2. Metode USG dalam menentukan prioritas isu strategis

No	Permasalahan	U	S	G	Total	Keterangan
1	Makanan bergizi harian	5	5	4	14	Paling Prioritas karena kelaparan bisa memicu kematian dini
2	Kesehatan	3	5	4	12	Penting, tetapi bisa ditunda sesaat dibanding makanan, dan sudah memadai dilayani oleh Dinas Kesehatan
3	Interaksi Sosial	2	3	3	8	Kurang mendesak; dampak psikososial jangka panjang

Penelitian terdahulu dilakukan oleh agus dkk mengenai sejauh mana program permakanan di kelurahan Kebonsari Kota Surabaya mampu memenuhi kebutuhan makanan sehat bagi lanjut usia miskin, menyimpulkan bahwa program berhasil sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi lanjut usia miskin agar memperoleh derajat kesehatan yang layak.

d. Sumber Dana Program

Dalam kehidupan masyarakat Sunda terdapat kearifan budaya yang meletakkan pentingnya keharmonisan hubungan antarmanusia dalam kehidupan masyarakatnya yang saling ketergantungan dengan tidak melupakan jati-diri dan habitatnya masing-masing, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Kearifan budaya tersebut terdapat dalam konsep *silih asih, silih asah, silih asuh (silas)* yang mengandung nilai moral kebaikan dalam membangun kebersamaan melalui kehidupan masyarakatnya (Firdaus dkk, 2013)

Program Karawang nyaah ka kolot rencananya akan dibiayai dengan sumber anggaran *rereongan* Aparatur Sipil Negara, konsep *silih asih, silih asah, silih asuh (silas)* diadopsi sebagai landasan nilai moral dalam pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia Kabupaten Karawang.

Berdasarkan data dalam Karawang Dalam Angka tahun 2025, PNS Kabupaten Karawang berjumlah 8.000 orang dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan Occupation	2024		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(5)	(6)	(7)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	23	3	26
Administrator/ Administrator	137	47	184
Pengawas/ Supervisor	293	124	417
Eselon V/ 5th Echelon	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	1.595	2577	4172
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	364	1121	1485
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	456	277	733
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position	661	326	987
Jumlah/ Total	3.529	4.475	8.004

Gambar 1: Jumlah PNS Kabupaten Karawang Tahun 2024

Sumber: Karawang Dalam Angka Tahun 2025

Dalam proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui suatu tahapan yang memiliki relevansi dengan konsep silas, yang dimulai dari tahap 'penyadaran' berlandaskan nilai asih melalui silih asih, tahap 'pengkapasitasan' berlandaskan nilai asah melalui silih asah, dan tahap 'pendayaan' berlandaskan nilai asuh melalui silih asuh. Keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat berlandaskan nilai silas yang berjalan baik dan benar dalam kehidupan masyarakat akan menghasilkan silih wangi, yang menunjukkan bahwa makna nilai wangi sebagai kualitas manusia utama dalam perspektif makhluk individu, sehingga

dalam kehidupan sosial akan menghasilkan masyarakat *tengtrek kartaraharja* (Firdaus dkk, 2013).

Berdasarkan Karawang Dalam Angka Tahun 2024, data jumlah PNS sebanyak 8.004 orang, bila diasumsikan bersedia mendonasikan besaran uangnya sebagaimana tabel 4 di bawah ini, maka diperoleh potensi penganggaran sebesar Rp. 889,750 juta per bulan.

Tabel 4. Potensi Anggaran

No	Jabatan	Banyaknya (orang)	Donasi (Rp)/bulan	Jumlah (Rp)/bulan
1	JPT	26	1,000,000	26,000,000
2	Administrator	184	500,000	92,000,000
3	Pengawas	417	200,000	83,400,000
4	JFT	6,390	100,000	639,000,000
5	Pelaksana	987	50,000	49,350,000
		8,004	Total	889,750,000

Sumber: penulis, proyeksi

Bila diasumsikan paket makan gratis Rp. 15.000,- setiap hari atau rata-rata 30 hari per bulan maka donasi tersebut bisa mengintervensi Lansia Rentan sebanyak 1.854 orang untuk 309 Desa & kelurahan (6 orang per desa) dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Calon Penerima Manfaat

Usia	Jumlah (orang)	Kebutuhan Pendanaan (Rp)
75 +	1,854	834,300,000
Honor dan BBM distributor (309) orang @ Rp. 175.000,-		54,075,000
Jumlah Kebutuhan Anggaran		888,375,000.00

Sumber: penulis

Karena cakupan lansia yang bisa dilayani masih sedikit (0,80% dari total lansia), maka dilakukan prioritas dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usia 75 tahun ke atas;
- 2) Prioritas berdasarkan tingkat kerentanan;
- 3) Tidak ada *support* keluarga/ orang lain/pemerintah/pihak lainnya; Dan lain-lain (bisa ditambahkan)

Asumsi-asumsi di atas merupakan rasionalisasi agar program KARAWANG NYAAH KA KOLOT dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal dan berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan khususnya terhadap sektor makanan dan minuman.

- e. Mekanisme Pengelolaan
 1. Perencanaan;

- a. Aktivitas yang akan dilaksanakan
- b. Potensi Anggaran
- c. Jumlah Calon Penerima Calon Lokasi
- d. Indikator Kinerja
2. Pelaksanaan;
 - a. Kebutuhan Anggaran
 - b. SDM Pengelola: Penyedia dan Pendistribusi
 - c. Standar Operasional Prosedur:
3. Pemantauan: pengaduan dapat memanfaatkan aplikasi TANGKAR
4. Evaluasi: Pengukuran Kinerja

3. Rekomendasi Kebijakan

Program “KARAWANG NYAAH KA KOLOT” ini merupakan program yang tepat dan sangat bermanfaat mengingat angka harapan hidup di Kabupaten Karawang terus meningkat sehingga Lansia semakin panjang umur dan semakin banyak jumlahnya. Kondisi ini mendesak untuk disikapi lebih lanjut agar panjangnya usia harapan hidup ini diimbangi dengan kesejahteraan fisik dan mental lansia, untuk menjaga lanjut usia agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Untuk itu agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan, serta tujuan program ini dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, maka perlu diidentifikasi aktivitas yang relevan dengan kebutuhan lansia saat ini. Untuk memetakan intervensi yang efektif, maka program PAMALI ini dianalisis dengan analisis SWOT dan diperoleh tahapan sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis SWOT - PAMALI

Internal	Eksternal	Intervensi
Strength	Opportunity	
Tersedia Potensi Anggaran	Potensi ekonomi rantai penyedia barang dan jasa makan bergizi lansia	1. Penyediaan makanan bergizi untuk lansia diuji coba disatu desa untuk menilai efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya. bekerjasama dengan warung makan setempat. 2. Diawali dengan pembinaan oleh tenaga kesehatan setempat kepada warung penyedia perihal menu sederhana dan mudah yang memenuhi kebutuhan gizi lansia dan waktu siap santap yang tepat (untuk pagi atau malam)
Weakness	Threat	3. pembinaan juga dilakukan kepada kurir pengantar makanan 4. Menyusun SOP/perjanjian dengan para pihak untuk meminimalisir kerugian. Resiko penyimpanan: a. Penyediaan anggaran dari ASN tidak tepat waktu b. Penyaluran uang ke rekening penyedia tidak tepat waktu dan tidak utuh, c. Paket makanan tidak sesuai dengan standar gizi dan harga yang ditetapkan d. tuntutan honor tenaga kesehatan dalam pembinaan pengetahuan gizi e. pemotongan honor/BBM kurir f. keterlambatan waktu pengantaran makanan 5. Menyusun Indikator Kinerja yang SMART untuk mengukur dampak
Keterbatasan SDM pelaksana di lapangan (memasak dan mengantar makanan), Cakupan Lansia terlayani masih rendah	Pemenuhan Gizi yang Memadai, Terdapat resiko penyimpangan wewenang	

Sumber: Penulis, hasil Analisis

Berdasarkan teori dan regulasi yang telah diuraikan sebelumnya mengenai piramida kebutuhan maslow, teori penuaan dan permasalahan yang dihadapi lansia, dimana kebutuhan yang sangat mendasar untuk lansia yang mobilitasnya sudah sangat terbatas adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis yaitu pangan siap makan, maka kajian ini merekomendasikan “PAMALI (PAKET MAKAN LANSIA)”: Alternatif implementasi KARAWANG NYAAH KA KOLOT dalam bentuk pemberian makan gratis bagi lansia rentan.

Di samping memenuhi gizi lansia, PAMALI juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya sektor makanan dan minuman. Memberikan multiplier efek yang cukup besar. Memberikan dampak peningkatan pendapatan sektor KUKM (warung nasi, kemasan makanan, LPG dan lain-lain), meningkatkan penjualan petani dan nelayan dan memberikan lapangan pekerjaan untuk 309 orang pengantar makanan. Dengan demikian PAMALI merupakan strategi *pro growth dan pro poor* karena membantu pelaku usaha kecil, menciptakan lapangan kerja informal, dan memberikan gizi kepada lansia.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat

<https://rejabar.republika.co.id/berita/sujdgr472/pemkab-karawang-launching-program-karawang-nyaah-ka-kolot> diakses pada 12 April 2025

Karawang Dalam Angka Tahun 2025

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/39579/34611> diakses pada 30 Mei 2025

<https://jurnal.mercubaktijaya.ac.id/index.php/mercusuar/article/view/3/1> diakses pada 30 Mei 2025

<https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5745/3057> diakses pada 31 Mei 2025

<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/9722/5842> diakses pada 31 Mei 2025;

<https://rso.go.id/kebutuhan-gizi-pada-lansia> diakses pada 1 Juni 2025

